



DJKA

**BALAI PENGUJIAN
PERKERETAAPIAN**

**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN**

RENCANA STRATEGIS

**BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN
TAHUN 2025 – 2029**



KATA PENGANTAR

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka setiap Kementerian/Lembaga diharuskan menyusun sistem perencanaan berjenjang yang dimulai dari perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek dimana pada setiap rencana mengacu kepada dokumen perencanaan yang ada di atasnya sehingga dapat saling terkait antara perencanaan pada tingkat nasional sampai dengan perencanaan teknis dimasing-masing Kementerian/Lembaga.

Balai Pengujian Perkeretaapian merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan dimana sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2023 memiliki tugas untuk melaksanakan pengujian prasarana, sarana dan sumber daya manusia perkeretaapian. Balai Pengujian Perkeretaapian perlu menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana arahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2025-2029 dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian dalam penyelenggaraan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam rangka mewujudkan perkeretaapian yang handal menuju Indonesia Emas 2045.

Semoga dokumen Rencana Strategis (Renstra) ini dapat menjadi panduan yang jelas dan bermanfaat dalam upaya kami untuk terus meningkatkan kualitas perkeretaapian di Indonesia, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan bangsa dan negara.

Bekasi, 31 Desember 2025

Kepala Balai Pengujian Perkeretaapian

Ronald Jackson Simbolon

NIP. 197903032005021002



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB 1. PENDAHULUAN	1-2
1.1 Kondisi Umum.....	1-2
1.1.1 Latar Belakang	1-2
1.1.2 Gambaran Perkeretaapian Nasional	1-3
1.1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian	1-5
1.1.4 Evaluasi Capaian Tahun 2020 - 2024	1-6
1.2 Potensi dan Permasalahan	1-18
1.2.1 Perkembangan Lingkungan Strategis	1-21
1.2.2 Permasalahan Transportasi Perkeretaapian	1-23
1.2.3 Peluang dan Tantangan serta Penuangan Risiko	1-26
1.3 Mandat dan Penugasan.....	1-27
1.3.1 Mandat Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian	1-27
1.3.2 Penugasan RPJMN 2025 – 2029 kepada Balai Pengujian Perkeretaapian	1-27
BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	2-33
2.1 Visi	2-33
2.1.1 Visi Indonesia Emas 2045	2-33
2.1.2 Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024 – 2029.....	2-38
2.1.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025 – 2029	2-44



2.1.4	Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 – 2029 ...	2-45
2.1.5	Visi Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 - 2029	2-46
2.2	Misi	2-46
2.2.1	Misi Indonesia Emas 2045	2-46
2.2.2	Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025 - 2029	2-48
2.2.3	Misi Kementerian Perhubungan 2025 – 2029	2-49
2.2.4	Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 – 2029 ..	2-50
2.2.5	Misi Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029	2-50
2.3	Tujuan	2-50
2.3.1	Tujuan Pembangunan Nasional 2045	2-50
2.3.2	Tujuan Pembangunan Nasional 2025 – 2029	2-52
2.3.3	Tujuan Kementerian Perhubungan 2025 – 2029	2-53
2.3.4	Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 – 2029	2-54
2.3.5	Tujuan Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029 ...	2-56
2.4	Sasaran	2-56
2.4.1	Sasaran Pembangunan Nasional 2025 – 2029	2-56
2.4.2	Sasaran Prioritas Nasional 2025 – 2029	2-57
2.4.3	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025 – 2029	2-59
2.4.4	Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 - 2029	2-60
2.4.5	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029	2-61
BAB 3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....		3-69
3.1	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	3-69
3.1.1	Arah Kebijakan dan Dukungan Sektor Transportasi dalam RPJPN 2025 - 2045.....	3-69



3.1.2	Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi dalam RPJMN 2025 - 2029	3-75
3.2	Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025 - 2029	3-77
3.3	Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029	3-81
3.4	Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029	3-87
3.4.1	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 - 2029	3-87
3.4.2	Kegiatan – Kegiatan Strategis Perkeretaapian Yang Masih Perlu Dilakukan Penajaman Kesiapan dan Pembiayaan	3-89
3.5	Kerangka Regulasi Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029	3-94
3.6	Kerangka Kelembagaan.....	3-102
3.6.1	Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian	3-102
3.6.2	Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Perkeretaapian 2025 - 2029	3-104
3.6.3	Hubungan Interaksi Balai Pengujian Perkeretaapian dengan Pemangku Kepentingan.....	3-107
3.7	Manajemen Risiko.....	3-109
BAB 4.	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	4-122
4.1	Target Kinerja.....	4-122
4.2	Indikasi Kegiatan Strategis.....	4-127
4.2.1	Indikasi Program Kegiatan dan Proyek Prioritas Bidang Transportasi Perkeretaapian dalam RPJMN 2025 – 2029	4-127
4.2.2	Indikasi Program Kegiatan dan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 – 2029	4-129



4.2.3 Program dan Kegiatan Direktif Presiden Bidang Transportasi Perkeretaapian	4-132
4.3 Kerangka Pendanaan	4-133
4.3.1 Kerangka Pendanaan Secara Umum Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 - 2029	4-133
4.3.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Bidang Transportasi Perkeretaapian	4-134
4.3.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Non APBN Bidang Transportasi Perkeretaapian	4-141
4.3.4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Bidang Transportasi Perkeretaapian 2025-2029	4-144
BAB 5. PENUTUP.....	5-149
5.1 Arahan Pelaksanaan.....	5-149
5.2 Mekanisme Perubahan dan Pelaksanaan Evaluasi.....	5-149
LAMPIRAN	
1 Matriks Kinerja dan Pendanaan	
2 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Balai Pengujian Perkeretaapian	
3 Matriks Kerangka Regulasi	
4 Matriks Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian	



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1-1	Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024	1-8
Tabel 1-2	Isu Strategis Transportasi berdasarkan Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024	1-19
Tabel 1-3	Isu Strategis Nasional-Global dalam Bidang Transportasi Perkeretaapian	1-21
Tabel 1-4	Peran Transportasi Perkeretaapian dalam Menyelesaikan Isu Prioritas	1-22
Tabel 2-1	Sasaran Utama Tahun 2029	2-35
Tabel 2-2	Visi, Misi, Program Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029	2-41
Tabel 2-3	Tujuan Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 2045	2-51
Tabel 2-4	Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029	2-59
Tabel 2-5	Peta Sasaran Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian 2025-2029	2-63
Tabel 2-6	Rumusan IKK Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029	2-65
Tabel 3-1	Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Kementerian Perhubungan	3-78
Tabel 3-2	Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Transportasi Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	3-83
Tabel 3-3	Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Balai Pengujian Perkeretaapian	3-91
Tabel 3-4	Kebutuhan Revisi Regulasi Balai Pengujian Perkeretaapian	3-96
Tabel 3-5	Jumlah Pegawai PNS dan PPPK Balai Pengujian Perkeretaapian	3-105
Tabel 3-6	Kebutuhan Pegawai Balai Pengujian Tahun 2025-2029	3-107
Tabel 3-7	Identifikasi dan Mitigasi Risiko Utama Sasaran Kegiatan dan Rencana Tindaklanjuti Pengendalian	3-111
Tabel 3-8	Hal-hal yang dapat Mengancam dan Melemahkan Unit Pemilik Risiko (Ancaman Internal)	3-116
Tabel 3-9	Hal-hal yang dapat Mengancam dan Melemahkan Unit Pemilik Risiko (Ancaman Eksternal)	3-117



Tabel 4-1 Target Kinerja Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029 (Persentase)	4-122
Tabel 4-2 Target Kinerja Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029 (Angka)	4-123
Tabel 4-3 Pagu Indikatif Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029	4-136
Tabel 4-4 Indikasi Pendanaan Non APBN Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029	4-141



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1-1 Target dan Realisasi IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024	1-10
Gambar 1-2 Target dan Realisasi IKK Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024	1-11
Gambar 1-3 Target dan Realisasi IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024	1-12
Gambar 1-4 Target dan Realisasi IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024	1-13
Gambar 1-5 Target dan Realisasi IKK Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2024	1-14
Gambar 1-6 Realisasi Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian 2020-2024	1-16
Gambar 1-7 Asta Cita	1-28
Gambar 1-8 Struktur Dukungan Sektor Transportasi Perkeretaapian	1-30
Gambar 2-1 Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045	2-37
Gambar 2-2 Visi, Misi, Program Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029	2-40
Gambar 2-3 Peta Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029	2-28
Gambar 2-4 Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan (PN)	2-49
Gambar 2-5 Keterkaitan antara PN dalam RPJMN 2025-2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025-2045	2-53
Gambar 2-6 Sasaran Pembangunan Nasional 2025 - 2029	2-58
Gambar 3-1 Trajektori GNI per Kapita Indonesia (USD)	3-71
Gambar 3-2 Tahapan Transformasi Ekonomi	3-71
Gambar 3-3 Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian	3-104
Gambar 3-4 Komposisi Jabatan Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029	3-106
Gambar 4-1 Realisasi IKM pada Aplikasi SKM	4-125
Gambar 4-2 Peta Dukungan Kementerian Perhubungan terhadap Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)	4-130



Gambar 4-3 | Peta Indikasi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Penguatan Konektivitas Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

..... 4-131

Gambar 4-4 | Peta Indikasi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Pendukung
Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Barang

..... 4-131



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

BAB 1 PENDAHULUAN





BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

1.1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan urat nadi kehidupan masyarakat yang mempunyai fungsi sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya bahkan penunjang aspek pertahanan dan keamanan serta politik. Secara nasional saat ini masih banyak permasalahan dalam penyelenggaraan transportasi yang perlu dibenahi, diantaranya penyebaran pembangunan dan pengembangan transportasi yang masih terpusat di beberapa daerah, keterbatasan pendanaan pembangunan di sektor transportasi, SDM dan kelembagaan yang masih rendah kualitasnya, kondisi fisik prasarana serta sarana transportasi yang masih banyak mengalami *backlog* pemeliharaan yang berlangsung secara terus menerus.

Pertumbuhan ekonomi nasional 5 (lima) tahun terakhir cukup baik, walaupun perekonomian dunia mengalami krisis. Hal ini disebabkan karena pemerintah terus mendorong sektor investasi, menjaga konsumsi pemerintah, dan mempercepat belanja pemerintah. Walaupun ada ancaman menurunnya ekspor akibat melemahnya kondisi perekonomian negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Dalam pembangunan ekonomi, transportasi sangat berperan dalam hal menjaga ketersediaan barang, stabilitas dan penyamaan harga, penurunan harga, peningkatan nilai tanah, spesialisasi antar wilayah, berkembangnya usaha skala besar, dan terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk.

Selain memiliki keterkaitan langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, transportasi juga berperan secara spasial dalam membentuk struktur ruang (pusat-pusat pertumbuhan akan terhubung dengan wilayah pendukungnya), penyebaran penduduk, distribusi logistik, serta mobilitas penduduk, sehingga transportasi dapat menjadi alat untuk penyebaran pembangunan ke wilayah yang masih terbelakang ekonominya melalui subsidi pemerintah di bidang transportasi.



Konsep pengembangan wilayah nasional yang telah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), kemudian dijabarkan dalam *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) untuk mendorong sektor dan komoditas unggulan supaya cepat sampai ke pasar melalui sistem konektivitas dalam bentuk koridor-koridor ekonomi.

Salah satu prasyarat keberhasilan pembangunan adalah penciptaan konektivitas antar wilayah, dimana pemerintah mejadi motor penciptaan konektivitas antar wilayah yang diwujudkan dalam bentuk :

- a. Merealisasikan sistem yang terintegrasi antara logistik nasional, sistem transportasi nasional, pengembangan wilayah, dan sistem komunikasi dan informasi;
- b. Identifikasi simpul-simpul transportasi dan pusat distribusi untuk memfasilitasi kebutuhan logistik bagi komoditas utama dan penunjang;
- c. Penguatan intra dan antar koridor dan konektivitas internasional;
- d. Penguatan jaringan komunikasi dan teknologi informasi untuk memfasilitasi seluruh aktivitas ekonomi, aktivitas pemerintahan, dan sektor pendidikan nasional.

Dalam upaya membangun koherensi kebijakan spasial dengan kebijakan lainnya, maka dibutuhkan suatu *tools* yang dapat menjadi alat dialog berbagai pihak. Pengembangan *tools* dimaksud adalah untuk memberikan gambaran berbagai kemungkinan dampak yang dihasilkan dari kebijakan yang diterapkan melalui suatu simulasi dinamika *spasial*. Dengan pemanfaatan *tools* tersebut maka pengambilan keputusan terkait kebijakan yang akan dijalankan menjadi lebih mudah. Perangkat semacam tersebut dapat dikategorikan sebagai sistem pendukung pengambilan kebijakan, dalam hal ini adalah kebijakan spasial.

1.1.2 Gambaran Perkeretaapian Nasional

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 menunjukkan perkembangan jumlah transportasi/lintas pelayanan per tahun 2020-2024. Pada lintas pelayanan antarkota tahun 2020 mencapai 155 relasi, tahun 2021 mencapai 152 relasi, tahun 2022 mencapai 155 relasi. Setelah mencapai puncak pada tahun 2023 (166 relasi), jumlah relasi lintas pelayanan antarkota mengalami penurunan pada tahun 2024 mencapai 160 relasi.



Sedangkan, pada lintas pelayanan perkotaan tahun 2020 mencapai 101 relasi, tahun 2021 mencapai 99 relasi, tahun 2022 mencapai 102 relasi, tahun 2023 mencapai 83 relasi, dan tahun 2024 mencapai 84 relasi.

Wilayah Pulau Jawa, jumlah stasiun kereta api yang melayani naik/turun penumpang tahun 2020 mencapai 463 unit, tahun 2021 dan 2022 mencapai 451 unit, capaian tertinggi pada tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 489 unit. Jumlah stasiun kereta api yang melayani naik/turun penumpang pada wilayah Pulau Sumatera tahun 2020 mencapai 166 unit, tahun 2021 mencapai 173 unit, tahun 2022 terjadi penurunan yaitu mencapai 146 unit, tahun 2023 terjadi peningkatan kembali mencapai 171 unit dan tahun 2024 mencapai 172 unit.

Jumlah stasiun kereta api pada wilayah Pulau Sulawesi tahun 2020 dan tahun 2021 tidak melayani naik/turun penumpang, dan baru melayani pada tahun 2022 hingga tahun 2024, yaitu pada tahun 2022 mencapai 10 unit serta tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 11 unit.

Panjang jalur kereta api di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024, dibagi menjadi beberapa kategori utama : Panjang Jalur KA (*Total Railway Line*) mencapai 6.944.994 m pada tahun 2024, Panjang Jalur Ganda mencapai 3.880.456 m pada tahun 2024, Panjang Jalur Tunggal mencapai 3.064.538 m pada tahun 2024, Panjang Jalur Elektrifikasi mencapai 1.092.389 m pada tahun 2024, Panjang Jalur Non-Elektrifikasi mencapai 5.852.605 m pada tahun 2024, serta Panjang Jalur KA Perkotaan mencapai 1.118.922 m pada tahun 2024. Panjang jalur kereta api per tahun 2020-2024 mengalami peningkatan signifikan menunjukkan perkembangan pertumbuhan yang positif.

Jumlah sarana kereta api di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024, dibagi menjadi beberapa kategori utama berdasarkan jenis kereta dan wilayah operasi. Kereta api kecepatan normal mengalami peningkatan stabil dalam jumlah selama periode 2020-2024, meskipun ada fluktuasi kecil. Jenis-jenis kereta api lainnya, seperti monorel, trem, kereta api levitasi magnetik, dan kereta api gantung, masih belum tersedia atau belum tercatat selama periode tersebut.

Selama periode 2020-2024, penyebab kecelakaan dan korban angkutan kereta api yang menunjukkan bahwa anjlok adalah jenis kecelakaan kereta api yang paling sering terjadi, meskipun jumlahnya menunjukkan tren penurunan.



Tabrakan KA dengan KA, terguling dan terbakar memiliki jumlah kejadian yang sangat rendah, dengan insiden sporadis pada tahun tertentu. Total kecelakaan menunjukkan penurunan secara keseluruhan selama periode 2020-2024.

Data jumlah kecelakaan kereta api berdasarkan penyebab selama periode 2020 hingga 2024. Prasarana adalah penyebab yang cukup signifikan, meskipun jumlahnya menunjukkan tren penurunan. Sarana juga menjadi penyebab yang cukup signifikan, tetapi jumlahnya lebih relatif rendah dibandingkan prasarana, SDM operator, eksternal dan alam memiliki jumlah kejadian yang sangat rendah.

1.1.3 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian

Balai Pengujian Perkeretaapian yang merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai PM Perhubungan Nomor 56 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian, antara lain:

Tugas:

Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian.

Fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategis bisnis, dan rencana bisnis anggaran;
2. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian;
3. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian;
4. Pelaksanaan pengujian kecakapan dan keahlian sumber daya manusia bidang perkeretaapian;
5. Pelaksanaan pengujian komponen, sistem serta peralatan pendukung prasarana dan sarana perkeretaapian lainnya;
6. Pelaksanaan analisis isu aktual perkembangan perkeretaapian;
7. Pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pelaksanaan pengujian perkeretaapian;
8. Pelaksanaan pemeriksaan intern;



9. Pelaksanaan urusan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama; dan
10. Pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, ketatausahaan, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, serta evaluasi dan pelaporan.

1.1.4 Evaluasi Capaian

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian Periode Tahun 2020 – 2024 dilakukan terhadap Pelaksanaan Kegiatan Strategis, Pencapaian Sasaran dan Realisasi Anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan dengan pendekatan *gap analysis* yang membandingkan antara rencana dengan realisasi, sebagai berikut :

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Strategis dilakukan dengan membandingkan antara rencana kegiatan strategis yang dicanangkan dalam Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan sampai dengan tahun 2024.
2. Evaluasi Pencapaian Sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target capaian Sasaran Kegiatan (SK) yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dicanangkan dalam Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 terhadap realisasi yang dilaporkan melalui LKIP Balai Pengujian Perkeretaapian antara Tahun 2020 hingga Tahun 2024.
3. Evaluasi Realisasi Anggaran uang dilakukan dengan membandingkan antara rencana kebutuhan anggaran dalam Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020 – 2024 terhadap realisasi alokasi anggaran (khususnya APBN) sesuai DIPA untuk Balai Pengujian Perkeretaapian antara Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.

Evaluasi Pelaksanaan

Di dalam Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian 2020 – 2024 disampaikan selama tahun 2020 – 2024 diharapkan dapat menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan status kelembagaan Balai Pengujian Perkeretaapian merupakan langkah yang perlu diambil dalam upaya menjadikan Balai Pengujian Perkeretaapian dapat berjalan secara mandiri baik finansial maupun SDM. Perubahan status menjadi BLU juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pengujian sarana, prasarana dan SDM perkeretaapian di tahun yang akan datang.



Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 392/KMK/05/2022 tanggal 23 September 2022 tentang Penetapan Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dan Balai Pengujian Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/1293/M.KT.01/2023 tanggal 30 Oktober 2023 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor dan Balai Pengujian Perkeretaapian.

Menindaklanjuti penetapan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang lebih efektif dan efisien, maka disusun Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian.

Evaluasi Pencapaian Sasaran

Hasil evaluasi renstra Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2020-2024 menunjukkan beberapa perubahan, dimulai dengan perubahan terhadap indikator kinerja, perubahan satuan indikator kinerja, serta perubahan nilai target. Hal ini mengindikasikan adanya tidak sesuaian indikator kinerja setelah diimplementasikan.

Tabel 1-1 | Target dan Realisasi Kinerja Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SK 1	Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian	IKK S1	Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	%	3.000 (Unit)	496	17%	22	23,3	106%	46,56	50,63	108,74%	77,35	79,73	103,08%	100	109,52	109,52
SK 2	Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian	IKK S2	Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	%	3.000 (Orang)	706	24%	19	19,24	101%	24,49	24,6	100,45%	44,63	44,83	100,45%	65,66	71,15	108,36
SK 3	Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian	IKK S3	Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	%	95	39	41%	26	27,99	108%	40,69	44,83	110,17%	80,83	85,21	105,42%	98,82	101,06	102,27
SK 4	Meningkatnya Pelayanan Publik di Bidang Pengujian Perkeretaapian	IKK S4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,2	3,65	114,06%	3,66	3,86	105,46
SK 5	Terwujudnya Good Governance Dan Clean Government di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	IKK S5.1	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	98	98	100%	97,25	96,69	99%	99,24	98,7	99,46%	90	96,46	107,18%	96,50	87,04	90,20
		IKK S5.2	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian	%	-	-	-	100	100	100%	100	80,28	80,28%	100	98,43	98,43%	100	101,66	101,66

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		IKK S5.3	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81	81,85	101,05%	82	80,30	97,93
		IKK S5.4	Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Level	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	100,00%	3	3	100

Sumber: Dokumen LKIP Balai Pengujian Perkeretaapian Periode 2020-2024

Keterangan:



Baik : realisasi >95%



Cukup : realisasi 75-95%



Kurang : realisasi <75%



Kegiatan tidak terlaksana refocusing anggaran



Adanya penggabungan kegiatan pengadaan dan pengoperasian pada IKK pemenuhan kebutuhan sarana perkeretaapian milik negara

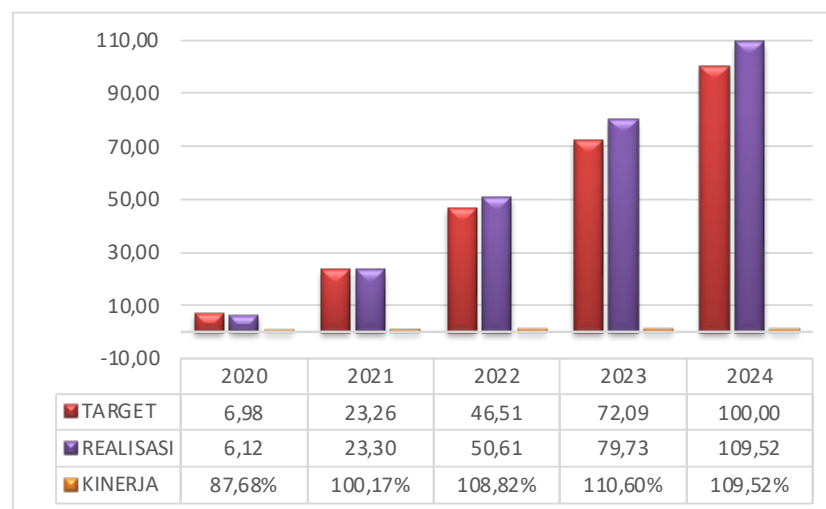


Penentuan target berdasarkan prognosa tahun berjalan



a. IKK 1 Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkertaapian

Pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, target Indikator Kinerja Kegiatan masih berupa *output* yaitu jumlah pengujian sarana perkeretaapian dan dilakukan revisi sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kementerian PANRB terkait Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar IKK yang masih bersifat *output*/kerja diubah menjadi IKK yang bersifat *outcome*/kinerja dengan tetap mengacu *cascading* Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.



Gambar 1-1 | Target dan Realisasi IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Target sesuai Rencana Strategi (Renstra) Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2020-2024 sebanyak 43.000 Unit, dengan realisasi pengujian sarana perkeretaapian dari tahun 2020-2024 sebanyak 47.094 Unit, sehingga capaian kinerja adalah 109,52%.

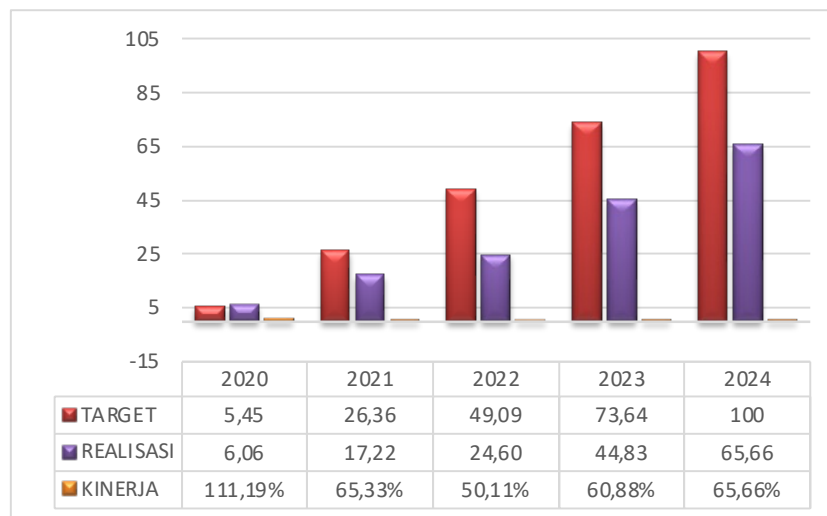
Beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain :

- Keterhubungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengujian sarana perkeretaapian diantaranya PT KAI, PT KCIC, PT KCI, PT Railink, PT Angkasa Pura, PT LRT Jakarta, PT MRT Jakarta, PT TELPP, PT INKA, Direktorat Sarana Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Balai Perawatan Perkeretaapian, dan Balai Teknik Perkeretaapian Medan.



b. IKK 2 Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian

Pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, target Indikator Kinerja Kegiatan masih berupa *output* yaitu jumlah pengujian SDM perkeretaapian dan dilakukan revisi sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kementerian PANRB terkait Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar IKK yang masih bersifat *output*/kerja diubah menjadi IKK yang bersifat *outcome*/kinerja dengan tetap mengacu *cascading* Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.



Gambar 1-2 | Target dan Realisasi IKK Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Target sesuai Rencana Strategi (Renstra) Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2020-2024 sebanyak 55.000 Orang, dengan realisasi pengujian SDM perkeretaapian dari tahun 2020-2024 sebanyak 39.134 Orang, sehingga capaian kinerja adalah 65,66%. Capaian kinerja yang kurang dari 90% ini sangat dipengaruhi karena munculnya *Covid-19* pada awal tahun 2020 dimana pelaksanaan pengujian SDM perkeretaapian lebih banyak dilaksanakan secara tatap muka, sehingga pengujian SDM perkeretaapian mengalami pembatasan yang berdampak pada realisasi kinerja.

Beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain :

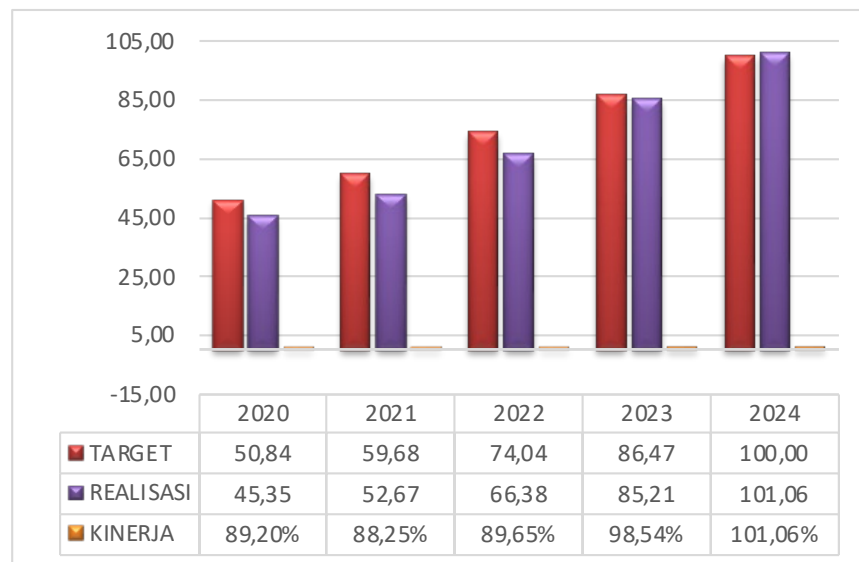
- Keterhubungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengujian SDM perkeretaapian diantaranya PT KAI, PT KCI, Divisi LRT Jabodebek, PT Railink, PT MRT Jakarta, PT LRT Jakarta, PT LEN, PT LRS, PT KAPM,



BTP Kelas II Padang, PPI Madiun, PT CRI, PT IMSS, PTDI STTD, PT KCIC, PT SKA, PT RPI, PT ELSICOM, PT KSI, PT KAU, Balai Perawatan Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan dan Dinas Perhubungan.

c. IKK 3 Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian

Pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, target Indikator Kinerja Kegiatan masih berupa *output* yaitu jumlah pengujian prasarana perkeretaapian dan dilakukan revisi sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Kementerian PANRB terkait Indikator Kinerja Kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian agar IKK yang masih bersifat *output*/kerja diubah menjadi IKK yang bersifat *outcome*/kinerja dengan tetap mengacu *cascading* Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2020-2024.



Gambar 1-3 | Target dan Realisasi IKK Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024

Target sesuai Rencana Strategi (Renstra) Balai Pengujian Perkeretaapian tahun 2020-2024 sebanyak 990 Unit dan 5.277 km, dengan realisasi pengujian prasarana perkeretaapian dari tahun 2020-2024 sebanyak 1.137 Unit dan 4.605,58 km, sehingga capaian kinerja adalah 101,06%.

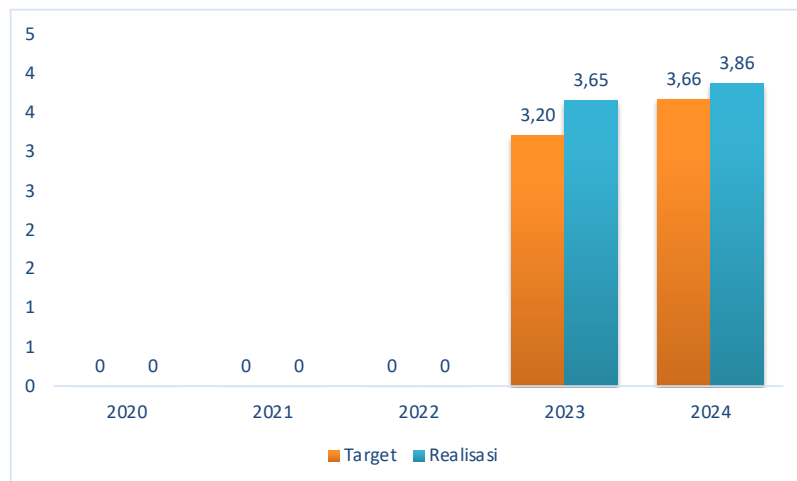
Beberapa hal yang telah memperhatikan data/kinerja/hubungan dengan bidang lain (*crosscutting*) antara lain :



- Keterhubungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian diantaranya Balai Teknik Perkeretaapian, Balai Pengelola Kereta Api, Direktorat Teknis, serta Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- d. IKK 4 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian

Pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, tidak terdapat target Indikator Kinerja Kegiatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian, dikarenakan IKK ini muncul di Tahun 2023 setelah penetapan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum di akhir Tahun 2022. Untuk itu perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis belum dapat dilakukan pada penyusunan Laporan Kinerja periode ini dikarenakan IKK belum tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Balai Pengujian Perkeretaapian telah melaksanakan *survey* kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan pengujian. *Survey* ini dilakukan menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB) Kementerian Perhubungan dengan skala hasil 1-4.



Gambar 1-4 | Target dan Realisasi IKK Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024



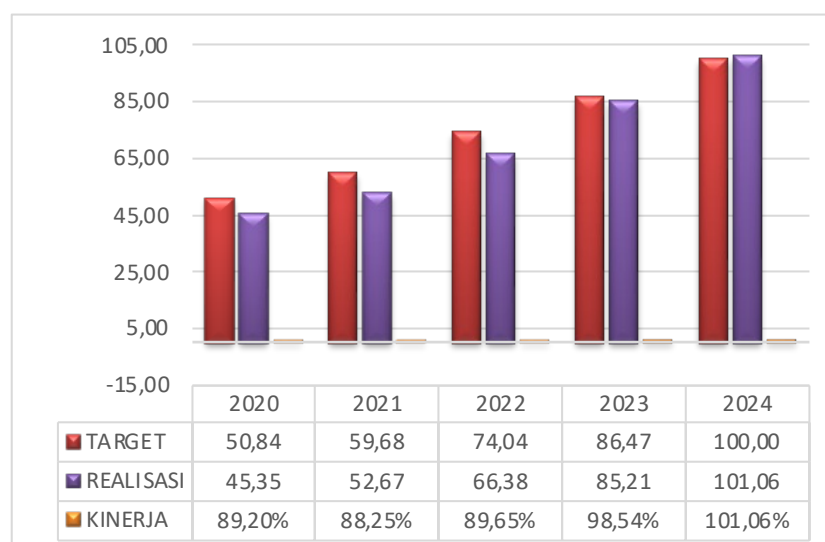
e. IKK 5 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Perhitungan persentase kualitas pelaksanaan anggaran berupa Nilai Kinerja Anggaran (NKA) mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 yang nilainya diperoleh pada *Dashboard* Aplikasi SMART Balai Pengujian Perkeretaapian. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA tersebut dikelompokkan pada kategori :

- Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik;
- 80% - 90% : Kategori Baik;
- 60% - 80% : Kategori Cukup;
- 50% - 60% : Kategori Kurang;
- Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang.

Target yang tercantum pada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020-2024 masih mengacu pada perhitungan atas penyerapan anggaran dan pencapaian *output*, sedangkan pada Tahun 2023 perhitungan mengacu pada PMK Nomor 22/PMK.02/2021 sehingga terdapat perbedaan metode perhitungan termasuk adanya tambahan parameter penilaian. Target Tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024 sebesar 99%.

Perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis (konversi dalam bentuk persentase) dapat dilihat pada **Tabel 1-1**.



Gambar 1-5 | Target dan Realisasi IKK Persentase
Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020-2024



f. IKK 6 Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Bidang Perkeretaapian

Pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, tidak terdapat target Indikator Kinerja Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian, dikarenakan PNBP muncul di Tahun 2021 dikarenakan adanya Pengembalian Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Untuk itu perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis belum dapat dilakukan pada penyusunan Laporan Kinerja periode ini dikarenakan IKK belum tercantum dalam Dokumen Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

g. IKK 7 Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian

Evaluasi AKIP dilakukan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 dan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor SE 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Variabel-variabel dalam LKE tersebut, diuraikan sebagai berikut :

- komponen terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- sub-komponen dibagi dengan gradasi keberadaan, kualitas dan pemanfaatan pada setiap komponen; dan
- kriteria merupakan gambaran kondisi yang perlu dicapai di setiap subkomponen untuk dapat dinilai apakah kondisi tersebut sudah atau belum dicapai dan dapat digambarkan atau tidak.

Pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, tidak terdapat target Indikator Kinerja Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian, untuk itu perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis belum dapat dilakukan pada penyusunan Laporan Kinerja periode ini dikarenakan IKK belum tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024.



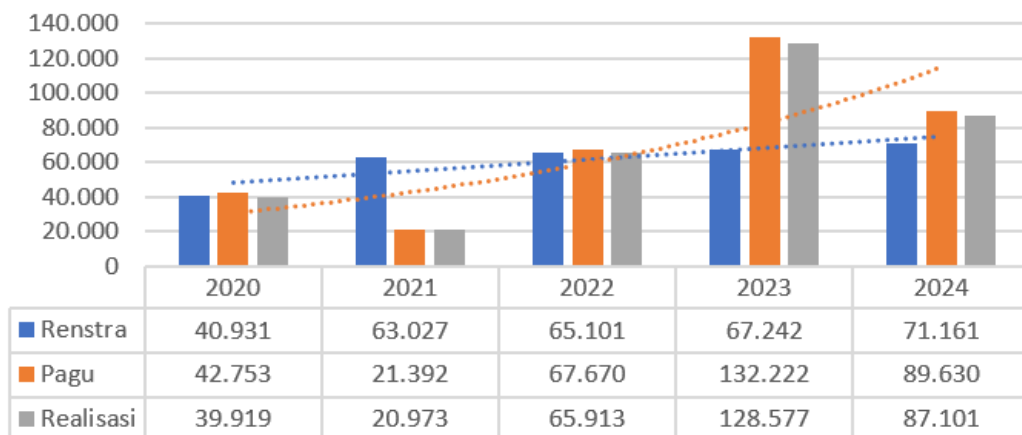
h. IKK 8 Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Perhubungan serta Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 205 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pada Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024, tidak terdapat target Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP Balai Pengujian Perkeretaapian, untuk itu perbandingan realisasi dengan target Rencana Strategis belum dapat dilakukan pada penyusunan Laporan Kinerja periode ini dikarenakan IKK belum tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2020-2024.

Evaluasi Realisasi Anggaran

Kebutuhan pendanaan yang direncanakan dalam Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian sepanjang tahun 2020-2024 total sekitar Rp 307,462 milyar. Namun, realisasi alokasi pendanaan APBN sampai dengan tahun 2024 terlepas adanya sumber dana Badan Layanan Umum (BLU) sebesar 13,84% (Rp 350,022 milyar) dari pagu kebutuhan pendanaan dan Renstra. Oleh karena itu, Balai Pengujian Perkeretaapian perlu melakukan evaluasi dan optimalisasi sumber pendanaan alternatif melalui transformasi regulasi terkait kerjasama dan peran swasta dalam pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian. Profil data rencana vs alokasi vs realisasi anggaran (APBN) Balai Pengujian Perkeretaapian 2020-2024 disampaikan pada **Gambar 1.1**.



Gambar 1-6 | Realisasi Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian 2020-2024



Terlepas dari adanya dampak Covid-19, profil alokasi anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian dari tahun ke tahun selama periode 2020-2024 terlihat stabil pada angka Rp 21-132 Milyar per tahun. Memperhatikan kecenderungan tersebut, maka perencanaan anggaran untuk periode Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 akan dibuat setara dari tahun ke tahun dengan memperhatikan perkembangan pagu anggaran pada tahun berjalan.

Realisasi penyerapan anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian pada periode 2020-2024 relatif tinggi, dengan rata-rata sekitar 96,65%. Realisasi anggaran terbesar terjadi pada Tahun 2021 sebesar 98,04%. Balai Pengujian Perkeretaapian terus melakukan upaya peningkatan realisasi anggaran, di mana dalam rentang 3 tahun pertama (Tahun 2020 sd Tahun 2022 yang masih terdampak Covid-19) realisasi anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian terus mengalami peningkatan, namun pada 2 tahun terakhir (2023-2024) pagu Balai Pengujian Perkeretaapian mengalami tren kenaikan 2 sumber pendanaan (rupiah murni, badan layanan umum, dan SBSN).

Pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan dampak yang signifikan pada stabilitas perekonomian nasional, sehingga pemerintah pusat melakukan realokasi dan refocusing anggaran melalui Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)¹. Implikasi dari peraturan tersebut mengarahkan Kementerian Perhubungan untuk melakukan penyesuaian anggaran pada Tahun Anggaran 2020 s.d Tahun 2022 melalui perubahan program di lingkungan Kementerian Perhubungan sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas² (semula memiliki 9 program menjadi 4 program sesuai Unit Kerja Eselon I) serta *Redesign* Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)³ yang mencakup *Redesign* Program, *Redesign* Kegiatan, dan *Redesign Output/Keluaran*, yang berlaku secara efektif sejak Tahun Anggaran 2021.

Penganggaran Balai Pengujian Perkeretaapian pada tahun 2020 berbasis jenis belanja (belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal) dan berbasis jenis sumber pendanaan (rupiah murni, badan layanan umum, SBSN dan KPBU). Sedangkan penganggaran Balai Pengujian Perkeretaapian Perkeretaapian pada tahun 2021-2024 mengalami perubahan berdasarkan jenis kegiatan atau dikenal dengan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) (adalah pendekatan untuk menyusun rencana kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L)



yang berbasis kinerja. RSPP bertujuan untuk perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat sasaran dan *fleksibel*).

1.2 Potensi dan Permasalahan

Transportasi merupakan pendorong pertumbuhan ekonomi dan tulang punggung dari proses distribusi orang maupun barang serta memiliki peran sebagai pembuka keterisolasian wilayah. Ketersediaan infrastruktur transportasi merupakan salah satu aspek dalam meningkatkan daya saing produk nasional sehingga harus didukung dengan sumber daya manusia yang profesional, tanggap terhadap perkembangan teknologi dan kondisi sosial masyarakat.

Selain penekanan pada aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, Kementerian Perhubungan juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas transportasi secara berkelanjutan pada aspek keselamatan dan keamanan, serta pelayanan dan ketersediaan kapasitas. Ketiga aspek diatas akan menjadi perhatian penting pada rencana kerja Kementerian Perhubungan untuk memberikan dukungan kelancaran proses distribusi orang dan barang.

Proses transformasi ekonomi perlu segera dimulai pada tahun 2020-2024 untuk memberikan landasan kokoh menuju Indonesia Maju. Dalam arahan RPJMN 2020- 2024 telah tercatat tantangan yang akan dihadapi meliputi: Produktivitas Tenaga Kerja Rendah, Produktivitas Kapital Rendah (ICOR tinggi 6,7), dan *Total Factor Productivity* Rendah. Disisi lain, target pertumbuhan ekonomi 2020-2024 berada pada kisaran 5,2%-5,5% (rendah) hingga pada kisaran 5,4% - 6,5% (tinggi) agar dapat keluar dari Middle Income Trap (MIT) menuju Negara Sejahtera Berpendapatan Tinggi di Tahun 2036. Target pertumbuhan 5,4% - 6,0 % memerlukan dukungan aspek transportasi baik dari sisi permintaan ataupun sisi produksi.

Isu strategis transportasi yang masih dihadapi saat ini sangat beragam sehingga perlu pendekatan secara menyeluruh dari berbagai aspek untuk menyelesaikannya. Kendati demikian, Kementerian Perhubungan selalu berupaya menyelesaikan berbagai permasalahan transportasi yang ada, diantaranya yaitu:



**Tabel 1-2 | Isu Strategis Transportasi berdasarkan Rencana Strategis
Badan Kebijakan Transportasi Tahun 2022-2024**

Indikator	Isu Strategis Transportasi
Konektivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan angkutan keperintisan. 2. Masih kurangnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi. 3. Kondisi infrastruktur transportasi yang masih belum memadai. 4. Terdapat beberapa PKN/PKW/KSN dan simpul transportasi belum terhubung dengan jalur darat baik jalan ataupun kereta api. 5. Peningkatan aksesibilitas dan penyediaan layanan transportasi pada Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan Terluar (DTPK).
Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunnya peran angkutan umum dan maraknya transportasi <i>online</i>. 2. Belum adanya penyuluhan/perbaikan pelayanan untuk pelaksanaan angkutan pepadu yang diharapkan melalui subsektor, dimana standar pelayanan maksimal dirasakan masih perlu ditingkatkan. 3. Belum optimalnya peran angkutan laut, yakni karena adanya ketimpangan muatan dari kawasan barat dan kawasan timur. 4. Belum optimalnya peralihan transportasi barang yang didominasi moda jalan. 5. Belum optimalnya pelayanan transportasi multimoda dan antarmoda yang terintegrasi. 6. Adanya keterbatasan infrastruktur bandar udara terutama dalam menyediakan slot time yang mengakibatkan sulitnya melakukan penambahan kapasitas angkutan udara. 7. Sebagian bandar udara mengalami <i>overcapacity</i> sementara upaya pembangunan bandar udara tidak mungkin dapat terselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Keselamatan dan Keamanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya tingkat kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi. 2. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi.



Indikator	Isu Strategis Transportasi
	<ol style="list-style-type: none"> Kurang optimalnya pelaksanaan perlindungan lingkungan yang diakibatkan penyelenggaraan transportasi. Belum optimalnya penanganan perlintasan tidak sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dukungan kebutuhan percepatan pariwisata	<ol style="list-style-type: none"> Kemudahan akses dari simpul utama terdekat menuju sepuluh destinasi baru tujuan wisata. Penyediaan layanan moda transportasi hingga ke pusat tujuan wisata prioritas untuk mengakomodasi 400 juta perjalanan wisatawan nusantara dan 22,3 juta wisatawan mancanegara. Kurangnya tenaga profesional operator transportasi yang dapat memenuhi standar SDM untuk mendukung layanan bagi wisatawan mancanegara.
Dukungan kebutuhan percepatan logistik	<ol style="list-style-type: none"> Masih tingginya biaya logistik terhadap PDB dan masih rendahnya skor <i>Logistic Performance Index</i> (LPI). Permasalahan kelembagaan pada operator transportasi multimoda. Tenaga profesional operator transportasi multimoda yang belum memenuhi standar kompetensi SDM untuk mendukung layanan logistik nasional.
Perkembangan Teknologi dan Kebutuhan Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya kualitas, kuantitas, standar kompetensi Sumber Daya Manusia Transportasi dan tenaga pendidik transportasi. Belum optimalnya tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan masih kurangnya kualitas dan kuantitas tenaga auditor internal serta penggunaan aspek pengaruh teknologi informasi secara optimal. Kurangnya Analisis Kebijakan adalah modal utama yang cukup menentukan kualitas dan produktivitas hasil perumusan kebijakan transportasi. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan bidang perhubungan. Masih tingginya penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil dalam penyelenggaraan transportasi.
Pemindahan Ibu Kota Negara	Perencanaan Hub Transportasi Antarmoda dan mendorong adopsi investasi penyediaan moda transportasi ramah lingkungan pada Ibu Kota Negara.

Sumber: Rencana Strategis Badan Kebijakan Transportasi tahun 2022-2024



1.2.1 Perkembangan Lingkungan Strategis

1. Isu Transportasi Nasional

Transportasi perkeretaapian tahun 2025-2029 dipengaruhi oleh beberapa lingkungan strategis, antara lain:

Tabel 1-3 | Isu Strategis Nasional - Global dalam Bidang Transportasi Perkeretaapian

Lingkungan	Potensi	Isu Permasalahan
Sosial	<ol style="list-style-type: none"> Pada tahun 2045 diperkirakan Indonesia akan menjadi negara ke 6 dengan populasi penduduk mencapai 324,05 Juta orang; Urbanisasi semakin meningkat Pada tahun 2020 56,7% (155 juta jiwa) tinggal di perkotaan. Diprediksi pada 2045 70% masyarakat akan tinggal di kota; dan Pembangunan perkotaan menjadi bagian prioritas dalam RPJPN, difokuskan di 10 Wilayah Metropolitan 	<ol style="list-style-type: none"> Sebagian besar (59%) tinggal di Jawa (terutama wilayah perkotaan), diperkirakan pada tahun 2045 masih sekitar 55% penduduk Indonesia tinggal di Jawa dan Bali, dengan tingkat kepadatan penduduk 1.303 jiwa/km²; dan masih minimnya kesadaran masyarakat dalam menjaga berbagai fasilitas kereta api yang sudah ada;
Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> Tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjad kebijakan dan strategi global; Pemanfaatan energi baru dan terbarukan menjadi sumber energi utama dunia; dan Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan tahun 2045 diperkirakan sekitar 5,1%-6,4%, dengan pertumbuhan industri 5,2%-7,8% per tahun 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya integrasi konektivitas domestik dan global dengan kawasan pertumbuhan ekonomi; Kesenjangan pembangunan sarana dan prasarana dasar antar jawa dan luar jawa; Pusat pertumbuhan belum berkembang diluar jawa; dan
Teknologi	<ol style="list-style-type: none"> Perkembangan inovasi dalam pemanfaatan teknologi dan informasi mendorong adanya penyesuaian permintaan terhadap perjalanan kereta api; dan Perkembangan teknologi semaki masif dan dorongan penggunaan <i>Artificial Inteligen</i> (AI) 	<ol style="list-style-type: none"> Perlunya pembaharuan dan peningkatan penguasaan teknologi dalam negeri; Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaatif dari masyarakat; Perkembangan teknologi akan mempengaruhi manufaktur;
Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> Pembangunan Rendah Karbon (dekarbonisasi transportasi), mendorong angkutan umum perkotaan menjadi strategi utama 	<ol style="list-style-type: none"> Konsumsi energi pada sektor transprotasi terus meningkat dan berdampak terhadap polusi udara; dan



Lingkungan	Potensi	Isu Permasalahan
		2. Isu perubahan iklim dan bencana alam yang dapat mempengaruhi layanan perkeretaapian.
Politik	1. Kinerja layanan perkeretaapian sebagai komoditas politik	1. Tuntutan daerah /publik untuk perluasan maupun reaktivasi jaringan perkeretaapian;
Regulasi	1. Transformasi regulasi di sektor transportasi menuju sistem yang modern dan terbuka	1. Belum ada kelembagaan transformasi metropolitan; 2. Dampak berbagai regulasi di luar sektor perkeretaapian (moda lain, tata ruang, industri, perdagangan, pariwisata, energi dan lingkungan

2. Isu Prioritas

Di dalam Dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, terdapat beberapa isu prioritas atau permasalahan utama yang akan menjadi fokus Kementerian Perhubungan pada periode 2025-2029. Pemilihan permasalahan utama didasarkan pada 3 (tiga) kriteria yakni : (1) *Responsive*, merupakan respon terhadap permasalahan transportasi yang sudah menjadi perhatian masyarakat (*public concern*), (2) *Relevant*, mendukung kebijakan, janji kampanye, dan prioritas Presiden/Wakil Presiden khususnya yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 dan (3) *Impactive*, memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja *core business* transportasi (konektivitas, pelayanan, keselamatan) dan/atau manfaat kepada publik (ekonomi, sosial, lingkungan).

Tabel 1-4 | Peran Transportasi Perkeretaapian dalam Menyelesaikan Isu Prioritas

Isu Prioritas	Peran	Strategi Implementasi
Peningkatan Integrasi Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan integrasi transportasi di simpul stasiun kereta api Menurunkan biaya pengeluaran transportasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan integrasi/keterpaduan antarmoda di stasiun kereta api melalui penyediaan prasarana alihmoda Koordinasi dengan operator penyedia jaringan pelayanan angkutan lanjutan Pengembangan tiket terintegrasi dengan pelayanan angkutan lanjutan
Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah angkutan kereta api penumpang perkotaan Meningkatkan pelayanan perkeretaapian perkotaan Menurunkan biaya pengeluaran transportasi publik di perkotaan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan kereta api perkotaan di metropolitan perkotaan prioritas melalui peningkatan dan penambahan frekuensi perjalanan, peningkatan sarana perkeretaapian, peningkatan elektrifikasi jalur kereta api perkotaan Peningkatan ketepatan waktu (<i>on time performance/OTP</i>) pelayanan kereta api perkotaan Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan berbasis rel seperti LRT, MRT dan teknologi lainnya



Isu Prioritas	Peran	Strategi Implementasi
		<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan tata kelola subsidi Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) agar tepat sasaran, pelayanan sesuai standar pelayanan minimal dan penggunaan anggaran subsidi dilakukan secara efektif dan akuntabel
Penanganan <i>Over Dimension Over Load</i> (ODOL)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan jumlah angkutan kereta api barang Menurunkan biaya transportasi angkutan barang Mendorong perpindahan (<i>moda shifting</i>) dari penggunaan angkutan barang moda jalan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan angkutan barang komoditas barang utama dengan skala pengangkutan besar melalui peningkatan dan penambahan frekuensi perjalanan menuju kawasan produksi, kawasan industri dan simpul distribusi barang Peningkatan prasarana dan sarana perkeretaapian barang Penerapan insentif penggunaan angkutan kereta api untuk jenis barang tertentu yang cenderung ODOL karena sifatnya yang <i>high volume, low value</i> (migas, batu bara, mineral, pasir, CPO, kayu, semen, baja, dll) Penyediaan layanan angkutan kereta api barang dengan tarif kompetitif
Pengaturan Transportasi Online	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan kepada pengguna kereta api untuk memperoleh pelayanan angkutan lanjutan yang disediakan transportasi online 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan operator penyedia transportasi online Pengembangan tiket terintegrasi dengan pelayanan transportasi online (saat ini sudah angkutan lanjutan)

Terdapat 4 isu prioritas yang akan ditangani Kementerian Perhubungan dalam 5 tahun ke depan, yakni : (1) Peningkatan integrasi transportasi, (2) Penanganan kemacetan lalu lintas perkotaan, (3) Penanganan *Over Dimension Over Load* (ODOL) dan (4) Pengaturan Transportasi Online. Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai tugas dan fungsinya berperan cukup strategis dalam menyelesaikan keempat isu prioritas tersebut seperti dirangkum sebagai berikut.

1.2.2 Permasalahan Transportasi Perkeretaapian

Potensi permasalahan terkait penyelenggaraan transportasi perkeretaapian terkategori ke dalam beberapa aspek, yakni: Aspek Regulasi, Aspek Kelembagaan, Aspek Pendanaan, Aspek Sumber daya manusia, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Lalu-Lintas Angkutan Kereta Api, dan Aspek Teknologi dan Informasi. Setiap aspek permasalahan akan dijelaskan pada uraian berikut.

Pertama Aspek Regulasi, dibutuhkannya penguatan regulasi bidang perkeretaapian dengan menyempurnakan dan melengkapi NSPK sesuai perkembangan penyelenggaraan perkeretaapian (perbaikan tata kelola perizinan, investasi serta penyelenggaraan PSO, IMO dan TAC, penerapan regulasi yang melibatkan pemerintah daerah) dan penerapan teknologi perkeretaapian (kereta cepat, LRT (GoA3), dan teknologi lainnya).



Kedua aspek kelembagaan, yakni dibutuhkannya penguatan kelembagaan DJKA sebagai regulator dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya: (1) Perkuatan tugas dan fungsi Balai Teknik Perkeretaapian untuk meningkatkan pengawasan layanan dan keselamatan perjalanan kereta api melalui pembentukan Satuan Pelayanan di Tahun 2023; (2) Penugasan ke Balai Teknik Perkeretaapian untuk pengelolaan aset perkeretaapian termasuk perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang akan dimulai Tahun 2024. Kelembagaan dalam kerangka penyelenggaraan perkeretaapian perlu ditransformasikan diantaranya dengan pembentukan badan usaha penyelenggara prasarana milik negara (sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2007) dalam mewujudkan multi operator pada prasarana perkeretaapian milik negara. Sinkronisasi tugas dan wewenang kelembagaan serta perencanaan pembangunan antar Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah.

Ketiga, aspek pendanaan. Indikasi kebutuhan investasi dalam RIPNAS sampai dengan Tahun 2030 untuk pengembangan perkeretaapian nasional sangat besar, namun skema pendanaan alternatif (KPBU, swasta, non APBN lainnya) saat ini masih terbatas dan belum optimal sehingga sumber pendanaan masih bergantung pada APBN. Oleh karena itu, Diperlukan optimalisasi pemanfaatan aset perkeretaapian untuk peningkatan pendapatan negara bukan pajak BLU sebagai alternatif pembiayaan.

Keempat, aspek sumber daya manusia. Berdasarkan RIPNAS, kebutuhan SDM regulator perkeretaapian sebanyak 2.330 orang dan SDM operator perkeretaapian sebanyak 101.440 orang pada Tahun 2030 dengan berbagai kompetensi. Namun jumlah tersebut belum memenuhi kebutuhan kuantitas dan kualitas SDM sebagai regulator dan operator penyelenggaraan perkeretaapian. Oleh karena itu, Perlunya penguasaan dan peningkatan kompetensi SDM terhadap teknologi terkini bidang perkeretaapian.

Kelima, aspek sarana dan prasana. Kebutuhan pengembangan jaringan kereta api dan peningkatan kapasitas prasarana dengan target panjang jalur kereta api yang beroperasi pada Tahun 2024 sepanjang 7.451 km berdasarkan target RPJMN Tahun 2020- 2024 dan pada Tahun 2030 sepanjang 10.524 km mengacu pada target RIPNAS. Selain itu, pengembangan jaringan dan layanan kereta api di kawasan perkotaan juga semakin mendesak untuk mengurangi tingkat kemacetan jalan perkotaan.



Dengan rencana pengembangan jaringan kereta api yang tinggi, maka kebutuhan untuk jumlah sarana kereta api juga meningkat. Mengacu pada RIPNAS, terdapat kebutuhan sarana kereta api pada Tahun 2030 sejumlah 5.314 lokomotif, 27.949 kereta, 48.364 gerbong, dan 6.229 kereta perkotaan.

Kebutuhan pengendalian dan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian yang sangat penting untuk mendukung peningkatan keselamatan perjalanan kereta api. Kebutuhan untuk penanganan perlintasan sebidang, diantaranya melalui pembangunan perlintasan tidak sebidang (*flyover, underpass*), peningkatan fasilitas keselamatan/pintu perlintasan/early warning system dan penutupan perlintasan sebidang liar.

Hal tersebut diperlukan guna meningkatkan layanan (*on time performance*) dan keamanan perjalanan kereta api serta kelancaran lalu lintas pada lokasi perlintasan jalur kereta api dengan jalan. Perlunya peningkatan koordinasi antar stakeholders termasuk dukungan industri perkeretaapian dalam kegiatan pembangunan prasarana dan sarana serta pengembangan layanan kereta api.

Keenam, aspek lalu lintas angkutan kereta api. Keterpaduan/integrasi antar moda transportasi sangat diperlukan untuk meningkatkan level of service layanan transportasi perkeretaapian terutama pada simpul stasiun kereta api. Integrasi antar moda diantaranya mencakup keterpaduan jadwal pelayanan, tarif dan tiket serta fasilitas perpindahan antar moda di lokasi stasiun kereta api. Manajemen Grafik Perjalanan Kereta Api (GAPEKA) diterapkan sesuai prinsip multi operator. Peningkatan kinerja pelayanan angkutan kereta api barang dan penumpang termasuk penyelenggaraan skema perintis dan PSO yang tepat sasaran.

Ketujuh, Aspek Teknologi dan Informasi. Diperlukan pembaruan teknologi perkeretaapian saat ini untuk meningkatkan kehandalan, pemenuhan demand angkutan kereta api serta mendukung keselamatan perjalanan kereta api termasuk mengikuti perkembangan teknologi perkeretaapian global (seperti kereta cepat, Autonomous Rail Rapid Transit, lainnya). Pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan transportasi kereta api sebagai upaya peningkatan daya saing dan kualitas layanan.



Informasi yang tepat dan akurat, serta sarana dan prasarana berteknologi tinggi akan memberikan impresi yang baik terhadap layanan perkeretaapian yang sudah bertransformasi lebih modern, efisien, dan ramah lingkungan. TIK juga perlu dioptimalkan untuk peningkatan layanan regulator perkeretaapian seperti perijinan, sertifikasi dan lainnya.

1.2.3 Peluang dan Tantangan serta Penuangan Risiko

Di dalam dokumen Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, diinventarisasi peluang dan tantangan bagi penyelenggaraan transportasi nasional, termasuk transportasi perkeretaapian yang perlu diidentifikasi potensi risikonya agar dapat diantisipasi arah kebijakan penanganannya.

Risiko yang dituangkan dalam tabel tersebut merupakan landasan untuk melakukan identifikasi risiko untuk pencapaian masing-masing Sasaran Kegiatan (SK) Balai Pengujian Perkeretaapian serta penetapan strategi/mitigasi penanganannya.

Peluang dan Tantangan	Penuangan Risiko
<p>Peluang Eksternal : Pembangunan IKN dan agenda pemerataan pembangunan</p> <p>Peluang Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stok infrastruktur transportasi nasional yang relatif sudah cukup besar meskipun belum merata dan memadai • Dukungan politik untuk alokasi dana sektor transportasi yang cukup besar, meskipun belum sesuai kebutuhan • Daya serap tenaga kerja sektor transportasi besar <p>Tantangan Eksternal : Transformasi teknologi (Industri 4.0 dan Society 5.0)</p> <p>Tantangan Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingginya emisi GRK sektor transportasi termasuk bidang perkeretaapian 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko : kurangnya dukungan konektivitas transportasi perkeretaapian terhadap pusat produksi (SDA/hilirisasi, KSPP/<i>Food State</i>, KI/KEK) dan koridor logistik utama • Risiko : belum berkembangnya integrasi transportasi dan multimoda termasuk moda kereta api • Risiko : Ketidakpastian biaya investasi dan operasional pelayanan transportasi perkeretaapian • Risiko : tidak terpenuhinya kebutuhan pengembangan kapasitas dan fasilitas pelayanan transportasi perkeretaapian • Risiko : lambatnya proses transformasi teknologi untuk efisiensi dan penyesuaian tantangan persaingan dan perubahan iklim • Risiko : tidak tercapainya target <i>Zero Accident</i> dan <i>Zero Incident</i> transportasi perkeretaapian



Peluang dan Tantangan	Penuangan Risiko
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Zero Accident/Zero Incident</i> transportasi perkeretaapian belum tercapai • Belum optimalnya dukungan TIK/Teknologi dalam peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian • Belum optimalnya transformasi tata kelola pemerintahan di Direktorat Jenderal Perkeretaapian 	<ul style="list-style-type: none"> • Risiko : lambatnya proses reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian

1.3 Mandat dan Penugasan

Selain memperhatikan kondisi umum bidang transportasi perkeretaapian saat ini (Sub Bab 1.1) serta potensi dan permasalahan yang akan dihadapi (Sub Bab 1.2) Rencana Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029 juga disusun dengan memperhatikan mandat dari peraturan perundang-undangan di bidang transportasi serta penugasan dokumen perencanaan terkait juga khususnya RPJMN 2025–2029.

1.3.1 Mandat Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

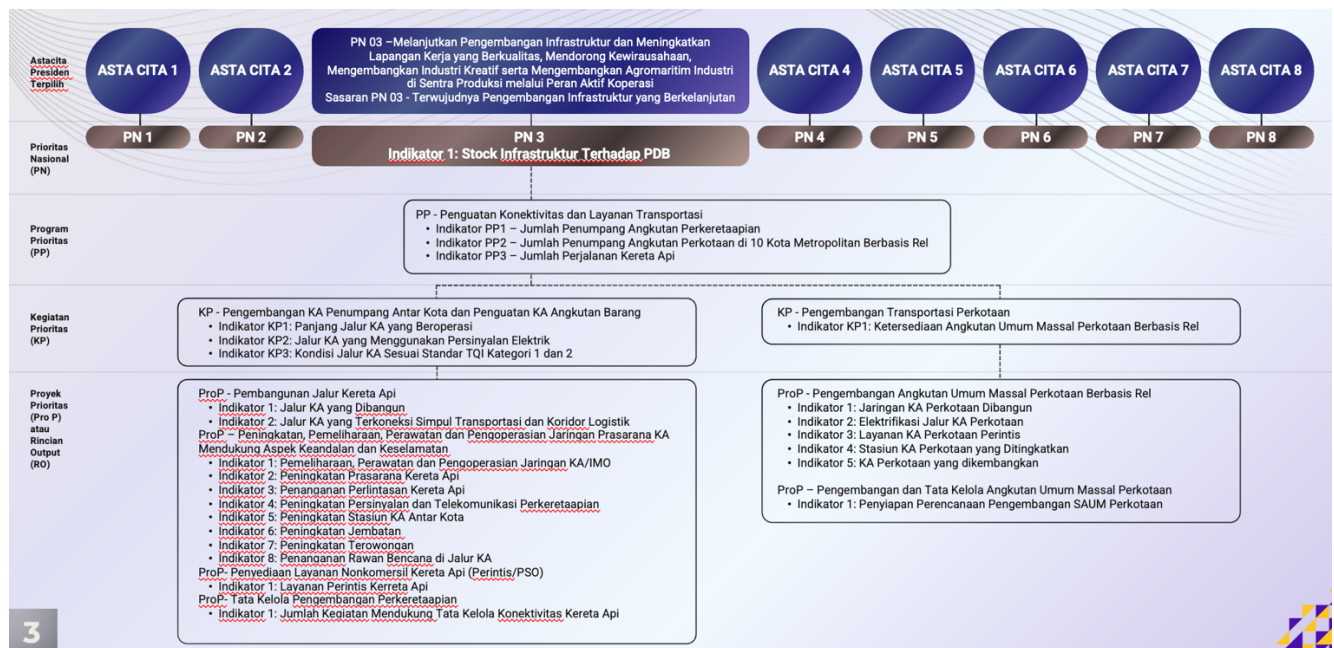
Terdapat mandat penyelenggaraan dari sejumlah peraturan perundang – undangan di bidang transportasi perkeretaapian yang harus diperhatikan dalam menyusun muatan pokok dari Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian, khususnya terkait dengan lingkup bidang, tujuan penyelenggaraan, serta cakupan kewenangan pemerintah. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 56 Tahun 2023, Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian sarana, prasarana dan SDM perkeretaapian

1.3.2 Penugasan RPJMN 2025 – 2029 kepada Balai Pengujian Perkeretaapian

Dukungan transportasi perkeretaapian dalam Prioritas Nasional (PN) 03 yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian difokuskan pada Program Prioritas (PP) 03.01 Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda. Dalam mengimplementasikan Program Prioritas (PP) tersebut dijabarkan dalam Kegiatan



Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas (ProP) disertai indikator pencapaian 2025-2029, sebagaimana terlihat pada **Gambar 1.7**.



Gambar 1-7 | Asta Cita

(Sumber: Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029)

Dukungan sektor Transportasi Perkeretaapian yang diampu oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian difokuskan pada Prioritas Nasional (PN) 3 yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi. Dalam implementasi PN3 dalam sektor Transportasi Perkeretaapian dijabarkan ke dalam Program Prioritas (PP) 03.01 Penguatan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda, dengan indikator sektor transportasi perkeretaapian yakni: (1) Jumlah Perjalanan Kereta Api, (2) Jumlah Penumpang Angkutan Kereta Api dan (3) Jumlah Penumpang Angkutan Perkotaan di 10 Kota Metropolitan.

Program Prioritas (PP) 03.01 sektor Transportasi Perkeretaapian dijabarkan ke dalam 2 Kegiatan Prioritas (KP), yakni:

- Kegiatan Prioritas (KP) 03.01.02 Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang. Sasaran dari KP 03.01.02 ini adalah Peningkatan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Angkutan Barang Yang Andal. Terdapat 3 indikator pada KP



03.01.02 yaitu indikator (1) Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi, (2) Jalur Kereta Api yang Menggunakan Persinyalan Elektrik dan (3) Kondisi Jalur Kereta Api Sesuai Standar *Track Quality Index* (TQI) Kategori 1 dan 2.

Dalam implementasi kegiatan, Kegiatan Prioritas (KP) 03.01.02 terdiri dari beberapa Proyek Prioritas (ProP), yakni:

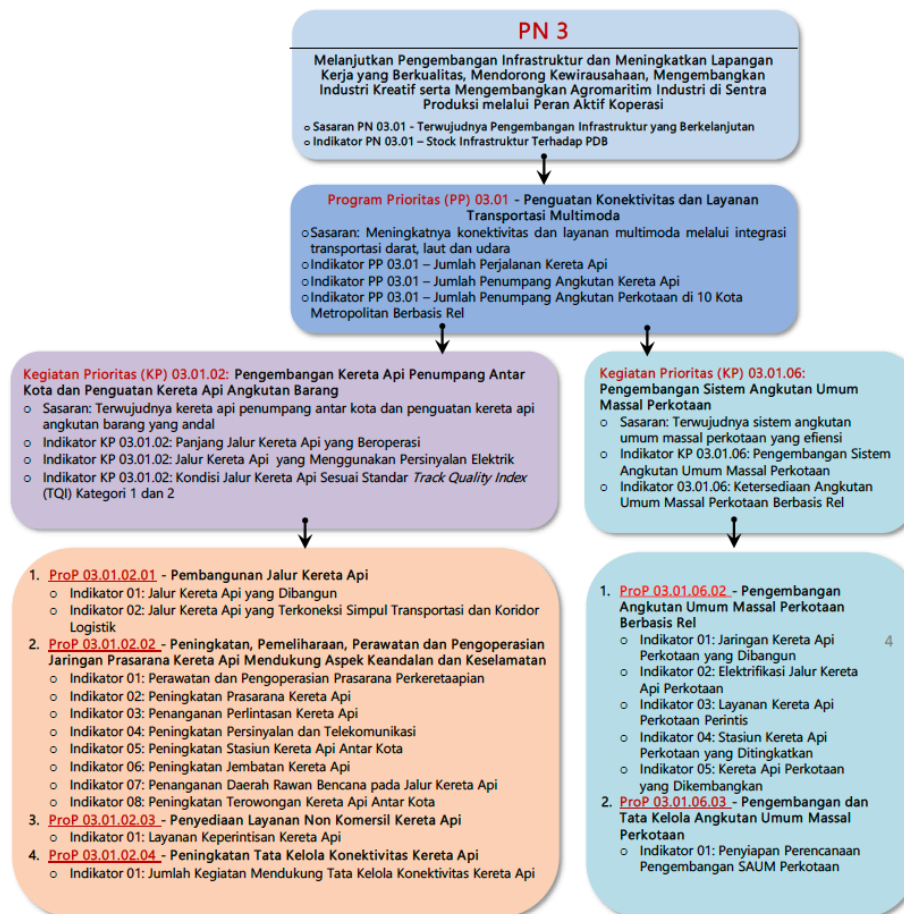
- 1) Proyek Prioritas (Prop) 03.01.02.01 - Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota. Proyek Prioritas (Prop) menggunakan 2 indikator.
 - 2) Proyek Prioritas (Prop) 03.01.02.02 - Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api Mendukung Aspek Keandalan dan Keselamatan. Proyek Prioritas (Prop) menggunakan 9 indikator.
 - 3) Proyek Prioritas (Prop) 03.01.02.03 - Penyediaan Layanan Non Komersial Kereta Api. Proyek Prioritas (Prop) menggunakan 1 indikator.
 - 4) Proyek Prioritas (Prop) 03.01.02.04 - Peningkatan Tata Kelola Konektivitas Kereta Api. Proyek Prioritas (Prop) menggunakan 1 indikator.
- b. Kegiatan Prioritas (KP) 03.01.06 Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan. Sasaran dari KP 03.01.06 ini adalah Terwujudnya Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan. Terdapat 2 indikator pada KP 03.01.06 yaitu indikator (1) Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan dan (2) Ketersediaan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel.
- Dalam implementasi kegiatan, Kegiatan Prioritas (KP) 03.01.06 terdiri dari beberapa Proyek Prioritas (ProP), yakni:
- 1) Proyek Prioritas (Prop) 03.01.06.02 - Pengembangan Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel. Proyek Prioritas (Prop) menggunakan 5 indikator.
 - 2) Proyek Prioritas (Prop) 03.01.06.03 - Pengembangan Tata Kelola Angkutan Umum Massal Perkotaan. Proyek Prioritas (Prop) menggunakan 1 indikator.

Selain penugasan RPJMN 2025 – 2029 yang sifatnya *mandatory* (terkait sektor transportasi perkeretaapian langsung) terdapat pula penugasan yang sifatnya dukungan (*supporting*) terhadap sejumlah agenda prioritas nasional lainnya, yakni:



- a. Dukungan terhadap PSN sektor transportasi perkeretaapiian yang tercantum adalah : (1) Pembangunan Jakarta Metropolitan *Mass Rapid Transit* Koridor Timur – Barat (*Carry Over*) dan (2) Pembangunan Pelabuhan Patimban (*Carry Over*).
- b. Dukungan terhadap kawasan prioritas/pusat ekonomi yang menjadi agenda pembangunan utama pada sejumlah Prioritas Nasional RPJMN 2025 – 2029, diantaranya : Kawasan Sentra Produksi Pangan/KSPP, Destinasi Pariwisata Nasional (DPN), KEK/KI/KPBPB, Hilirisasi, Kawasan Transmigrasi, dsb.
- c. Dukungan terhadap pelaksanaan 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat dari Presiden/Wakil Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025 – 2029.

Berikut disampaikan target dukungan sektor transportasi perkeretaapiian terhadap Prioritas Nasional (Asta Cita) 2025 – 2029 pada tabel dibawah ini.



Gambar 1-8 | Struktur Dukungan Sektor Transportasi Perkeretaapiian



Pelaksanaan dari penugasan RPJMN 2025 – 2029 tersebut dalam Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029 dilakukan melalui 1 (satu) Indikator KP RPJMN 2025 – 2029 yaitu Panjang Jalur Kereta Api yang Beroperasi, Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai pemberi dukungan untuk Proyek Prioritas (ProP 03.01.02.02 Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api Mendukung Aspek Keandalan dan Keselamatan) memiliki tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana dan sumber daya manusia perkeretaapian yang diakomodir dalam 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN

DAN SASARAN





BAB 2. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi

2.1.1 Visi Indonesia Emas 2045

Visi Indonesia Emas 2045 adalah: ***"Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan"***. Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. **Negara Kesatuan Republik Indonesia** merupakan negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia;
- b. **Bersatu** yang dicapai melalui kesatuan kuat berdasarkan Pancasila dan semangat Bhineka Tunggal Ika;
- c. **Berdaulat** yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil;
- d. **Maju** yang dicapai berbasiskan pengetahuan dan inovasi yang berakar pada budaya nusantara. Indonesia menjadi negara berdaya, modern, inovatif, tangguh dan adil; dan
- e. **Berkelanjutan** melalui pembang unan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima sasaran visi, yaitu:

a. Pendapatan per kapita setara negara maju;

Pendapatan per kapita setara negara maju. Pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara negara maju sekitar \$23.000 – 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjdai 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif



dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan layak (decent job) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80%.

b. Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang;

Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang. Sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,377-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.

c. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional yang meningkat;

Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Index (GPI) di peringkat 15 besar dunia.

d. Meningkatnya Daya saing sumber daya manusia;

Meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan indeks modal manusia (Human Capital Index) menjadi 0,73 pada tahun 2045.

e. Intensitas emisi GRK menuju net zero emission.

Intensitas emisi GRK menuju net zero emission. Dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010, dan menuju net zero emission pada tahun 2060.



Tabel 2-1 | Sasaran Utama Tahun 2029

No	Sasaran	Indikator	Baseline 2025	Target 2029
1.	Pendapatan perkapita setara negara maju	GNI Per Capita (USD)	5.500	7.400 – 7.670
		Kontribusi PDB Sektor Maritim (%)	8,1	9,1
		Kontribusi PDB Sektor Manufaktur (%)	20,8	21,9 – 23,0
2.	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 – 7,0	4,5 – 5,0
		Rasio Gini (Index)	0,379 – 0,382	0,372 – 0,375
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	23,3
3.	Kepemimpinan dan pengaruh di Dunia Internasional meningkat	Global Power Index (Peringkat)	34 (2023)	29
4.	Daya saing SDM meningkat	Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,54 (2022)	0,61
5.	Intensitas Emisi GRK menurun menuju NZE	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	62,37

Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2025 – 2029

Tema dan arah kebijakan RPJMN Teknokratik Tahun 2025-2029 meliputi 5 (lima) penguatan fondasi transformasi, yaitu:

- 1. Transformasi Sosial:** Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial;
- 2. Transformasi Ekonomi:** Hilirisasi SDA seta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja;
- 3. Transformasi Tata Kelola:** Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pember-dayaan masyarakat sipil;
- 4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia:** Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi; dan
- 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi:** Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi (agenda) pembangunan. Delapan agenda ini pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:



a. Transformasi Indonesia 3 (tiga) Agenda, yaitu:

1. Transformasi Sosial, mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing;
2. Transformasi Ekonomi, mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan profuktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi biru, pertanian, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan konektivitas global, serta pembangunan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan; dan
3. Transformasi Tata Kelola, mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

b. Landasan Transformasi 2 (dua) Agenda, yaitu:

1. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, memantapkan agenda supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan; dan
2. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

c. Kerangka Implementasi 3 (tiga) agenda, yaitu:

1. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia,



serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah;

2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi; dan
3. Mewujudkan Kesenambungan Pembangunan, kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan.

Kedelapan agenda tersebut dilaksanakan melalui tujuh belas arah kebijakan menuju Indonesia Emas 2045 (17 IE), seperti terlihat dalam gambar di bawah ini



Gambar 2-1 | Misi (Agenda) dan Arah (Tujuan) Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045

2.1.2 Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2024 – 2029

Dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029 mewujudkannya kedalam Visi, Misi dan Program untuk periode 2025-2029 berikut:

Visi :

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045



Misi :

"AstaCita"

Dalam rangka mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045, maka untuk mewujudkan visi tersebut dituangkan kedalam 8 misi (Astacita), yaitu sebagai berikut:

- 1) Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
- 2) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3) Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
- 4) Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
- 5) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
- 7) Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
- 8) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Program Prioritas:

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan 17 program prioritas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mencapai swasembada pangan, energi, air
- 2) Penyempurnaan sistem penerimaan negara
- 3) Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
- 4) Pencegahan dan pemberantasan korupsi
- 5) Pemberantasan kemiskinan
- 6) Pencegahan dan pemberantasan narkoba



- 7) Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
- 8) Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
- 9) Penguatan pertahanan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
- 10) Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
- 11) Menjamin pelestarian lingkungan hidup
- 12) Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.
- 13) Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
- 14) Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
- 15) Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
- 16) Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, perawatan rumah ibadah
- 17) Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga.

Program Hasil Terbaik:

Dalam 5 tahun, fondasi Indonesia Emas 2045 harus diwujudkan dengan 8 Program Hasil Terbaik Cepat yang dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten
- 3) Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
- 4) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yg perlu renovasi
- 5) Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut



- 6) Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara
- 7) Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan
- 8) Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara PDB ke 23%.

VISI

BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045



8 Misi
(Astacita)

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, **ekonomi hijau**, dan **ekonomi biru**.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan **melanjutkan pengembangan infrastruktur**.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta **penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas**.
5. **Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri**.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan **pemberantasan kemiskinan**.
7. Memperkuat **reformasi politik, hukum, dan birokrasi**, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan **lingkungan**, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

17 Program
Prioritas

1. Mencapai swasembada pangan, energi, air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan IKN
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Gambar 2-2 | Visi, Misi, Program Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

Untuk lebih detailnya terkait Visi, Misi, Program Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 khususnya yang terkait dengan bidang transportasi diresumekan pada tabel di bawah ini



Tabel 2-2 | Visi, Misi, Program Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

Astacita	Program	Rencana terkait Sektor Transportasi
Asta Cita 2 Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Ekonomi Hijau	60. Akselerasi rencana dekarbonasi untuk mencapai target net zero emision. 63. Melanjutkan program biodiesel dan bio-avtur dari kelapa sawit.
	Ekonomi Biru	69. Membangun armada transportasi laut rakyat untuk melayani pulau-pulau terpencil dan terluar dengan harga terjangkau. 70. Pengembangan pelabuhan simpul transshipment sebagai tulang punggung pembangunan infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan baik. 71. Memperkuat kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik. 79. Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu. Pembentukan kelembagaan integrator dari arus barang untuk mengkoordinasi layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik. 80. Melakukan pembangunan infrastruktur yang tepat guna untuk menopang industri berbasis pendekatan partisipatif.
Asta Cita 3 Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur	Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur	25. Membangun dan memperbaiki jalan daerah yang tidak mampu ditangani oleh pemerintah daerah. 27. Mengembangkan pelabuhan simpul transshipment sebagai infrastruktur terhubung dengan simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia yang dibangun untuk meningkatkan muatan baik. 28. Mengembangkan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas orang, barang dan informasi. 29. Mensinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara dan pengembangan kawasan strategis yang dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu.



Astacita	Program	Rencana terkait Sektor Transportasi
Asta Cita 4 Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	Menguatkan Peran Perempuan, Pemuda dan Penyandang Disabilitas	47. Mendorong pemabngunan infrastrukyur yang ramah bagi warga penyandanga disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum. 49. Meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi , mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat. 51. Membangun sarana, prasaranam dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas.
Asta Cita 5 Melanjutkan hilirasi dan industrialisasi untuk meninngkatkan nilai tambah di dalam negeri	Mengembangkan Hilirasi untuk Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru	2. Membangun infrastruktur secara berkeadilan, dengan mengutamakan akses terhadap akwasan industri, lahan produksi pertanian, perikanan, dan perkebunan, dengan mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal.
	Melanjutkan Infrastruktur Penunjang Hilirasi dan Industrialisasi	7. Mengembangkan infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama dan koridor penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi. 8. Mengembangkan konektivitas kereta api pada koriodor logistik untuk angkutan barang. 9. Mendorong standarisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama. 10. Membangun pelabuhan gerbang ekspor-impor serta pusat alih muatan (transshipment hub) internasional, terutama pada pelabuhan-pelabuhan dengan pangsa angkuta ekspor-impor yang signifikan.
Asta Cita 6 Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	Pemerataan Ekonomi	14. Melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru secara berkelanjutan.
	Memberantas Kemiskinan	21. Menyediakan transportasi publik murah bagi pekerja dan rakyat tidak mampu.
Asta Cita 7 Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	Reformasi Hukum	14. Membangun pengendalian korupsi pada Sistem Logistik Nasional yang mengintegrasikan sektor perhubungan, perdagangan dengan pertanian, perikananm kelautan dan pedesaan sehingga tidak saja mendorong ease of doing business, tetapi juga efisiensi pada biaya produksi.



Astacita	Program	Rencana terkait Sektor Transportasi
		16. Memberikan kepastian hukum untuk kendaraan roda dua sebagai transportasi umum, termasuk menjamin hak berserikat bagi pengemudi ojek online dan taksi online yang bermitra dengan perusahaan aplikasi, serta hal atas perjanjian kemitraan yang adil dan berkekuatan hukum.
	Reformasi Tata Kelola Pemerintahan	Hampir semua elemen RB terkait dengan program ini, sekitar 25 rencana aksi.
Asta Cita 8 Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Penanganan Bencana	25. Membangun infrastruktur yang berorientasi pada kesiapan dan ketahanan untuk menghadapi situasi bencana.



2.1.3 Visi Kementerian Perhubungan 2025 – 2029

Visi Kementerian Perhubungan 2025-2029 tidak terlepas dari Visi Indonesia Emas 2045 serta Visi Presiden dan Wakil Presiden Periode 2025-2029 yaitu:

Visi Indonesia Emas 2045: **Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan**¹⁾

- 1) Negara Nusantara adalah negara kepulauan besar yang terletak di antara dua samudera besar, yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia akan menjadi negara tangguh pada Tahun 2045, yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia;
 - Bersatu = Kesatuan kuat, Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.
 - Berdaulat = Ketahanan, kesatuan, mandiri, aman
 - Maju = Berdaya, modern, tangguh, inovatif, adil
 - Berkelanjutan = lestari dan seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029: **Bersama Indonesia Maju**²⁾
Menuju Indonesia Emas 2045

- 2) Bersama = Prabowo dan Gibran mengajak Putra Putri Terbaik Bangsa dari semua latar belakang yang memiliki kesamaan tekad untuk bekerja sama
 - Indonesia Maju = Membangun bangsa dengan dasar fondasi kuat yang dibangun oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo
 - Indonesia Emas = Negara yang setara dengan negara maju di tahun 2045 atau lebih cepat

Visi Kementerian Perhubungan:

"Transportasi Maju*) menuju Indonesia Emas 2045"

Visi Kementerian Perhubungan dirumuskan dengan metoda lingkup dipersempit (*task scoping*) sesuai lingkup tugas dan fungsi dalam Perpres No 23 Tahun 2022 yakni menyelenggarakan urusan pemerintahan di ³⁾**bidang transportasi** untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang mencakup penyelenggaraan pelayanan, keselamatan, dan keamanan transportasi, serta peningkatan aksesibilitas, konektivitas, dan kapasitas sarana dan prasarana transportasi.



Kondisi **Transportasi maju** artinya tersedianya jaringan dan layanan transportasi yang modern, handal, inklusif, berdaya saing dan memberikan nilai tambah, dengan pemahaman kata kunci sebagai berikut:

- 1) Handal: tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah NKRI;
- 2) Inklusif: tersedianya layanan transportasi yang adil dan merata serta dapat diakses oleh semua golongan masyarakat;
- 3) Berdaya saing: tersedianya layanan transportasi yang efisien dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional; dan
- 4) Memberikan nilai tambah: mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional 2025 – 2029 dalam RPJPN 2025-2045 dan mendukung Visi Presiden 2025-2029 guna menjalankan agenda pembangunan transportasi termasuk menjalankan visi Kementerian Perhubungan 2025-2029, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan. Misi ini sudah selaras dan sejalan dengan Arah Presiden untuk melaksanakan pembangunan di Sektor Perhubungan dengan mengacu pada amanat yang tertuang dalam Asta Cita.

2.1.4 Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 – 2029

Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 mempertimbangkan arah pembangunan nasional dan transportasi perkeretaapian sesuai muatan pokok Visi Indonesia Emas 2045 yang termuat di dalam Rancangan RPJPN 2045 dan Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 Visi Rencana Induk Perkeretaapian (RIP) Nasional Tahun 2030 dan Visi Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029.

Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029:

“Perkeretaapian Maju dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”



Penjelasan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- Visi DJKA 2025-2029 sesuai lingkup tugas Ditjen Perkeretaapian dalam PM 17 Tahun 2022 yakni **menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian.**
- Pengakomodasian visi Kementerian Perhubungan dalam visi Ditjen Perkeretaapian 2025-2029 melalui frasa **"Transportasi Indonesia Maju"**, yang mana sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggaraan **transportasi bidang perkeretaapian.**
- Pengakomodasian visi Pembangunan Nasional melalui frasa **"Menuju Indonesia Maju"**.
- Pengakomodasin visi RIP Nasional 2030 melalui **frasa "Perkeretaapian Maju"** meliputi: **berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan".**

2.1.5 Visi Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 - 2029

Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai penerima tugas dalam isu strategis dalam hal sarana perkeretaapian, maka kebijakan sarana perkeretaapian 2025 – 2029 akan tercermin dari visi Balai Pengujian Perkeretaapian

"Terwujudnya Balai Pengujian Perkeretaapian yang Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

2.2 Misi

2.2.1 Misi Indonesia Emas 2045

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 dilaksanakan delapan misi pembangunan yakni:

- 1) Transformasi Sosial.
- 2) Transformasi Ekonomi.
- 3) Transformasi Tata Kelola.

Yang ditopang oleh 2 agenda Landasan Transformasi yaitu:

- 1) Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia
- 2) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi.



Yang diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 agenda Kerangka Implementasi Transformasi yaitu:

- 1) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan.
- 2) Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.
- 3) Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.

Delapan misi (agenda) pembangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing.
- 2) Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas melalui peningkatan inovasi iptek, ekonomi produktif (termasuk industri manufaktur, ekonomi dan keuangan syariah, pertanian, ekonomi biru dan bioekonomi, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM dan koperasi, tenaga kerja, serta BUMN), penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, serta pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
- 3) Mewujudkan transformasi tata kelola untuk membangun regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- 4) Memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia dengan memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan nasional, serta memperkuat ketangguhan diplomasi Indonesia di tingkat global dan membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan.
- 5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
- 6) Pembangunan kewilayahan diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah.



- 7) Dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi.
- 8) Kesiambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pendanaan pembangunan. Kedelapan misi (agenda) tersebut dilaksanakan melalui 17 (tujuh belas) arah (tujuan) pembangunan.

2.2.2 Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025 - 2029

Dalam melaksanakan Misi Pembangunan 2045 pada periode pembangunan 2025 – 2029, maka 8 (delapan) Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025 – 2029 atau sering disebut sebagai Asta Cita ditetapkan sebagai misi pembangunan nasional dalam RPJMN 2025 – 2029.



Gambar 2-3 | Visi, Misi, Program Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029

Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 – 2029



Gambar 2-4 | Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan (PN)

Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 – 2029

2.2.3 Misi Kementerian Perhubungan 2025 – 2029

Pembangunan transportasi nasional merupakan salah satu strategi kebijakan untuk mewujudkan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif antar wilayah. Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional 2025 – 2029 dalam RPJPN 2025-2045 dan mendukung Visi Presiden 2025-2029 guna menjalankan agenda pembangunan transportasi termasuk menjalankan visi Kementerian Perhubungan 2025- 2029, maka ditetapkan misi Kementerian Perhubungan.

Misi Kementerian Perhubungan:

- Misi 1. Mewujudkan transportasi nasional yang berkelanjutan.
- Misi 2. Mewujudkan transformasi struktural dalam penyelenggaraan transportasi nasional.

M.1 Misi eksternal yang merepresentasikan upaya peningkatan kinerja sektor transportasi dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang.

M.2 Misi internal yang merepresentasikan upaya memperbaiki bisnis proses penyelenggaraan transportasi nasional.



2.2.4 Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 – 2029

Dalam mewujudkan Visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dalam menyelenggarakan transportasi perkeretaapian yang selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar disusun Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029. Misi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029:

- a) Misi 1: Mewujudkan konektivitas, pelayanan dan keselamatan perkeretaapian yang maju.
- b) Misi 2: Mewujudkan birokrasi dan layanan publik perkeretaapian yang maju.

Misi 1 merupakan misi eksternal berkaitan dengan bidang tugas dan fungsi DJKA dalam menyediakan pelayanan transportasi perkeretaapian yang maju yakni: berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan mampu menjawab tantangan perkembangan.

Misi 2 merupakan misi internal berkaitan dengan perbaikan birokrasi dan layanan publik dalam penyelenggaraan perkeretaapian yang didukung oleh kualitas kompetensi sumber daya manusia, kelembagaan, regulasi dan teknologi.

2.2.5 Misi Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai misi sebagai berikut:

1. Melanjutkan transformasi tata kelola dalam penyelenggaraan pengujian perkeretaapian nasional.
2. Meningkatkan pelaksanaan dan pengelolaan pengujian perkeretaapian guna mendukung transportasi perkeretaapian yang maju;
3. Meningkatkan kinerja pelayanan yang terintegrasi dan sinkron pada lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian.

2.3 Tujuan

2.3.1 Tujuan Pembangunan Nasional 2045

Implementasi visi dan misi pembangunan nasional 2025-2045 tersebut diwujudkan dalam 17 arah tujuan pembangunan nasional sebagai berikut:



Tabel 2-3 | Tujuan Pembangunan Nasional Tahun 2025 - 2045

	Misi (8 Agenda) Pembangunan Nasional	17 Arah Pembangunan Indonesia Emas
Transformasi Indonesia	Misi 1 Transformasi Sosial	IE1. Kesehatan untuk semua IE2. Pendidikan berkualitas yang merata IE3. Perlindungan sosial yang adaptif
	Misi 2 Transformasi Ekonomi	IE4. IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi IE5. Penerapan Ekonomi Hijau IE6. Transformasi Digital IE7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global IE8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi
	Misi 3 Transformasi Tata Kelola	IE9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif
Landasan Transformasi	Misi 4 Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	IE10. Hukum, Berkeadilan, Keamanan Nasional, Tangguh dan Demokrasi Substansial IE11. Stabilitas Ekonom Makro IE12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
	Misi 5 Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	IE13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju IE14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif IE15. Lingkungan Hidup Berkualitas IE16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan



	Misi (8 Agenda) Pembangunan Nasional	17 Arah Pembangunan Indonesia Emas
		IE17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
Kerangka Implementasi Transformasi	Misi 6 Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	
	Misi 7 Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	
	Misi 8 Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	

Misi pembangunan nasional bidang transportasi diwujudkan melalui:

- Misi 2 Transformasi Ekonomi melalui penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global.
- Misi 3 Transformasi Tata Kelola melalui regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.
- Misi 5 Ketahanan Sosial udaya dan Ekologi melalui resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

2.3.2 Tujuan Pembangunan Nasional 2025 – 2029

Dalam RPJMN 2025 – 2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025) disampaikan keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dengan Arah (Tujuan) Pembangunan Nasional 2045 serta Agenda Pembangunan RPJPN 2025 – 2045 seperti pada **Gambar 2-5**.



Gambar 2-5 | Keterkaitan antara Prioritas Nasional (PN) dalam RPJMN 2025 – 2029 dengan Arah (Tujuan) Pembangunan RPJPN 2025 - 2045

Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025 – 2029

2.3.3 Tujuan Kementerian Perhubungan 2025 – 2029

Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dicapai melalui beberapa tujuan yaitu:

- T.1 Terwujudnya nilai tambah transportasi dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Tujuan ke-1 (T.1) merupakan tujuan pada Level *Stakeholders Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan visi transportasi yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam mendukung pembangunan nasional di segala bidang. Nilai tambah tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap komponen pembangunan yang berkelanjutan, yakni: menurunkan biaya logistik nasional (Sasaran Nasional 20). dan menurunkan emisi gas rumah kaca (Sasaran Nasional 45).



- b) T.2 Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing.

Tujuan ke-2 (T.2) merupakan tujuan pada Level *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan visi transportasi yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan yang handal, inklusif, dan berdaya saing.

- c) T.3 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas.

Tujuan ke-3 (T.3) merupakan tujuan pada Level Internal *Business Perspectives* yang berkaitan dengan proses penyediaan sarana, prasarana, dan pelayanan transportasi nasional yang didasarkan kepada perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan yang cepat, akurat, dan manfaat yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang tepat guna dan dilakukan oleh SDM transportasi yang kompeten.

- d) T.4 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

Tujuan ke-4 (T.4) merupakan tujuan pada Level *Learning and Growth Perspectives* yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya internal di lingkungan Kementerian Perhubungan agar mampu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan transportasi secara efektif. Sumber daya yang menjadi input bagi pelaksanaan program/kegiatan Kementerian Perhubungan mencakup penyediaan pendanaan, kelembagaan dan SDM aparatur, regulasi, sistem informasi dan teknologi, serta sarana bantu kerja yang memadai.

2.3.4 Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 – 2029

Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 tidak terlepas dari penurunan/*cascading* tujuan dari Kementerian Perhubungan. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan memperhatikan visi yang sudah ditetapkan.

Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:

- a) T.0 Terwujudnya nilai tambah transportasi perkeretaapian dalam mendukung pencapaian sasaran nasional dalam RPJPN 2025-2045.
- b) T.1 Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan.



- c) T.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Penjelasan mengenai Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 sebagai berikut:

- a) Tujuan 0 (T.0) merupakan tujuan pada tingkatan *Stakeholders Perspectives* yang mengakomodir perspektif/kepentingan pemangku kepentingan (pengguna, operator, masyarakat dan lainnya) di bidang transportasi perkeretaapian yang diharapkan mampu memberikan nilai tambah dalam mendukung pembangunan nasional yang sesuai arahan Kementerian Perhubungan diwujudkan dalam bentuk dukungan terhadap komponen pembangunan yang berkelanjutan, yakni: menurunkan biaya logistik nasional (Sasaran Nasional 20). dan menurunkan emisi gas rumah kaca (Sasaran Nasional 45).
- b) Tujuan 1 (T.1) merupakan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan visi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian yang berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau, inklusif dan mampu menjawab tantangan perkembangan sesuai visi RIP Nasional 2030.
- c) Tujuan 2 (T.2) merupakan tujuan pada tingkatan *Internal Business Perspectives* dan *Learning and Growth Perspectives* yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan perkeretaapian yang berupa keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi, program, dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkualitas, penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, regulasi, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam rangka menjalankan tugas menyelenggarakan perumusan, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Indikator Tujuan 2 (T.2) yakni : Pemenuhan Capaian indikator Program Dukungan Manajemen.



Tujuan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 hanya akan dimuat T.1 dan T.2 karena sesuai dengan prinsip penjenjangan kinerja (Permen PAN RB No 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah), maka kewajiban K/L (termasuk unit kerja di bawahnya) hanya sampai *level outcome (customer perspectives)* sedangkan T.0 (pada *level stakeholders' perspectives*) akan diupayakan untuk dimuat dalam RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2020-2025.

2.3.5 Tujuan Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029

Tujuan Balai Pengujian Perkeretaapian dalam 5 tahun kedepan adalah:

1. Terlaksananya Penyelenggaraan Pengujian Perkeretaapian yang mendukung kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan;
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian.

2.4 Sasaran

2.4.1 Sasaran Pembangunan Nasional 2025 – 2029

Dalam RPJPN 2025-2045 ditetapkan 5 (lima) sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 dengan sejumlah indikator pencapaian antara lain :

1. Sasaran Pertama yaitu pendapatan per kapita setara negara maju, dimana pendapatan per kapita diharapkan mencapai USD 30.300 dan Indonesia masuk lima besar ekonomi dunia, yang didorong peningkatan kontribusi industri manufaktur 28,00% PDB dan kemaritiman 15,00% PDB;
2. Sasaran Kedua yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, dimana sejalan dengan peningkatan ekonomi, kemiskinan diharapkan menurun menjadi 0,5-0,8%. Rasio gini menurun ke angka 0,290-0,320 dan ketimpangan antarwilayah menurun dengan kontribusi PDRB KTI naik menjadi 28,5%;
3. Sasaran Ketiga yaitu kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Sejalan kemajuan yang diraih Indonesia, peran dan pengaruh dua dunia internasional meningkat yang diukur dengan peningkatan posisi *Global Power Indeks (GPI)* Indonesia ke peringkat 15 besar dunia;



4. Sasaran Keempat yaitu daya saing sumber daya manusia meningkat. Diharapkan terjadi peningkatan daya saing sumber daya manusia yang utamanya diukur melalui Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada tahun 2045;
5. Sasaran Kelima yaitu Intensitas Emisi GRK menurun menuju *net zero emission*, dimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan ditunjukkan melalui penurunan intensitas emisi GRK 93,5% dan peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi 83,00 Tahun 2045.

2.4.2 Sasaran Prioritas Nasional 2025 – 2029

Dalam menjalankan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 dijabarkan melalui 8 misi utama yang disebut dengan Asta Cita. Dari 8 misi Asta Cita, terdapat beberapa misi yang perlu didukung bidang infrastruktur (dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan lebih spesifik Direktorat Jenderal Perkeretaapian)

Terdapat arahan dari prioritas nasional yang menjadi penugasan Direktorat Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Prioritas Nasional (PN) Asta Cita yakni sebagai berikut:

- 1) PN 02–Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru.
 - 2) PN 03 –Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
 - 3) PN 05–Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
 - 4) PN 06–Membangun dari Desa dan Dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
 - 5) PN 07–Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyelundupan.
- Penugasan Direktorat Jenderal Perkeretaapian di jabarkan dalam bentuk Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP) dan Proyek Prioritas (ProP) dengan indikator kinerja dan target pencapaian indikator kinerja tahun 2025 dan 2029.

Gambar 2-6 | Sasaran Pembangunan Nasional 2025 - 2029

Sasaran Pembangunan Nasional

Representasi keberhasilan pembangunan tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut.



Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju

- ✓ Pertumbuhan ekonomi dari **5,05 (2024)** menjadi **5,3 (2025)** dan **menuju 8% (2029)**
- ✓ GNI per kapita meningkat dari **4.870 USD (2023)** menjadi **5.410 USD (2025)** dan **8.000 USD (2029)**
- ✓ Kontribusi PDB Maritim meningkat dari **7,9 % (2022)** menjadi **8,1% (2025)** dan **9,1% (2029)**
- ✓ Kontribusi PDB Manufaktur meningkat dari **18,67% (2023)** menjadi **20,8% (2025)** dan **21,9% (2029)**



Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat

- ✓ *Global Power Index* meningkat dari peringkat **34 (2023)** menjadi peringkat **33 (2025)** dan peringkat **29 (2029)**



Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

- ✓ Tingkat Kemiskinan turun dari **9,03% (Mar 2024)** menjadi **7,0-8% (2025)** dan **4,5-5,0% (2029)** serta kemiskinan ekstrem (2,15 PPP) hingga **<0,5% (2026)**
- ✓ Rasio gini turun dari **0,379 (Mar 2024)** menjadi **0,378-0,382 (2025)** dan **0,372-0,375 (2029)**
- ✓ Kontribusi PDRB KTI meningkat dari **20,9% (2023)** menjadi **21,4% (2025)** dan **22,4% (2029)**



Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat

- ✓ Indeks Modal Manusia (IMM) meningkat dari **0,54 (2020)** menjadi **0,56 (2025)** dan **0,59 (2029)**



Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission

- ✓ Penurunan intensitas emisi GRK dari **34,09% (2022)** menjadi **35,53% (2025)** dan **45,17% (2029)**
- ✓ Indeks kualitas lingkungan hidup meningkat dari **72,54 (2023)** menjadi **76,49 (2025)** dan **77,20 (2029)**



2.4.3 Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025 – 2029

Sasaran strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan merupakan penjabaran dari tujuan yang berada pada 3 level *Customer Perspective* (CP), (*Internal Business Perspectives*/IBP) dan (*Learning and Growth Perspectives*/LGP).

Tabel 2-4 | Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis
T.1 Terwujudnya transportasi nasional yang handal, inklusif, dan berdaya saing	a) SS 1 Meningkatnya konektivitas dan integrasi transportasi nasional b) SS2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi nasional c) SS3 Meningkatnya keselamatan transportasi nasional
T.2 Terwujudnya kebijakan dan SDM transportasi yang berkualitas	a) SSp4 Meningkatnya kualitas kebijakan transportasi nasional b) SSp5 Meningkatnya SDM transportasi yang kompeten
T.3 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Kementerian Perhubungan	a) SSp6 Meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik di Kementerian Perhubungan

Sasaran Strategis SS1, SS2, dan SS3 mewakili 3 kegiatan utama Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsi dalam Perpres No 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan, yakni: (1) konektivitas, aksesibilitas, dan kapasitas (2) pelayanan, dan (3) keselamatan dan keamanan transportasi. Ketiga sasaran strategis tersebut berada pada level *Customer Perspective* (CP) yang merepresentasikan hasil/outcome kinerja Kementerian Perhubungan dalam menyediakan pelayanan publik (*public service*) di bidang transportasi. Sasaran Strategis SS1, SS2, SS3 merupakan penurunan langsung dari Kementerian Perhubungan ke unit kerja eselon I (termasuk dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian).



Sasaran Strategis SSp4 dan SSp5 mewakili bisnis proses (*Internal Business Perspectives/IBP*) di Kementerian Perhubungan yang merupakan dukungan teknis (*technical support*) untuk menghasilkan kinerja pelayanan transportasi pada SS1, SS2 dan SS3. Bisnis proses utama dari Kementerian Perhubungan terkait teknis penyediaan layanan transportasi adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan transportasi yang berkualitas yang diejawantahkan melalui penyediaan sarana, prasarana, jaringan pelayanan sesuai standar teknis yang berlaku serta mengembangkan SDM transportasi yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan transportasi secara prima. Sasaran Strategis SSp4 dan SSp5 merupakan penurunan tidak langsung dari Kementerian Perhubungan ke unit kerja eselon I (termasuk dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian) sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

Sasaran Strategis SSp6 mewakili upaya Kementerian Perhubungan untuk menyediakan sumber daya dan pranata kerja yang baik sebagai landasan (*Learning and Growth Perspectives/LGP*) yang merupakan dukungan manajemen (*management support*) agar mampu menjalankan bisnis proses secara akuntabel sesuai prinsip good governance. Keberhasilan Kementerian Perhubungan dalam melaksanakan dukungan manajemen.

2.4.4 Sasaran Program Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 - 2029

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan perkeretaapian dalam menyelesaikan isu-isu strategis dalam pelaksanaan penyelenggaraan perkeretaapian. Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempertimbangkan sasaran strategis di Kementerian Perhubungan yang mana sasaran menggambarkan fokus utama menyelesaikan isu strategis dan permasalahan perkeretaapian berkaitan dengan meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian.

Sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029:

- 1) Sasaran Program 1 (SP1): Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian.
- 2) Sasaran Program 2 (SP2): Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian.



- 3) Sasaran Program 3 (SP3): Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian.
- 4) Sasaran Program 4 (SP4): Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik di Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Berikut disampaikan penjelasan masing-masing tujuan sebagai berikut:

- 1) Sasaran Program 1 (SP1), Sasaran Program 2 (SP2) dan Sasaran Program 3 (SP3) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan *Customer Perspectives* yang berkaitan dengan perwujudan konektivitas, pelayanan dan keselamatan transportasi perkeretaapian.
- 2) Sasaran Program 4 (SP4) merupakan sasaran untuk mewujudkan tujuan pada tingkatan Internal *Business Perspectives* dan *Level Learning and Growth Perspectives* yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan perkeretaapian yang berupa keberhasilan pelaksanaan kebijakan, strategi, program dan kegiatan penyelenggaraan perkeretaapian yang berkualitas, penyediaan sumber daya internal yang mencakup penyediaan pendanaan/anggaran, aset, kelembagaan dan organisasi, sumber daya manusia aparatur, sistem informasi serta prasarana dan sarana pendukung di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Sasaran Program (SP4) ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (sesuai Tujuan 2 (T.2)).

Tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029 disampaikan dalam bentuk gambaran peta strategi (*strategy map*) yang menunjukkan hubungan antara tujuan dan sasaran serta struktur dan hubungan antar sasaran dari berbagai perspektif.

2.4.5 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029

Analisis terhadap sasaran kegiatan merupakan langkah krusial dalam penyusunan rencana strategis kementerian/lembaga. Analisis ini dapat memastikan bahwa setiap sasaran yang ditetapkan memiliki relevansi dengan visi, misi, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Selain itu, analisis juga membantu mengidentifikasi indikator kinerja kunci (KPI) yang tepat untuk mengukur pencapaian setiap sasaran. Dengan demikian, analisis ini dapat memantau secara



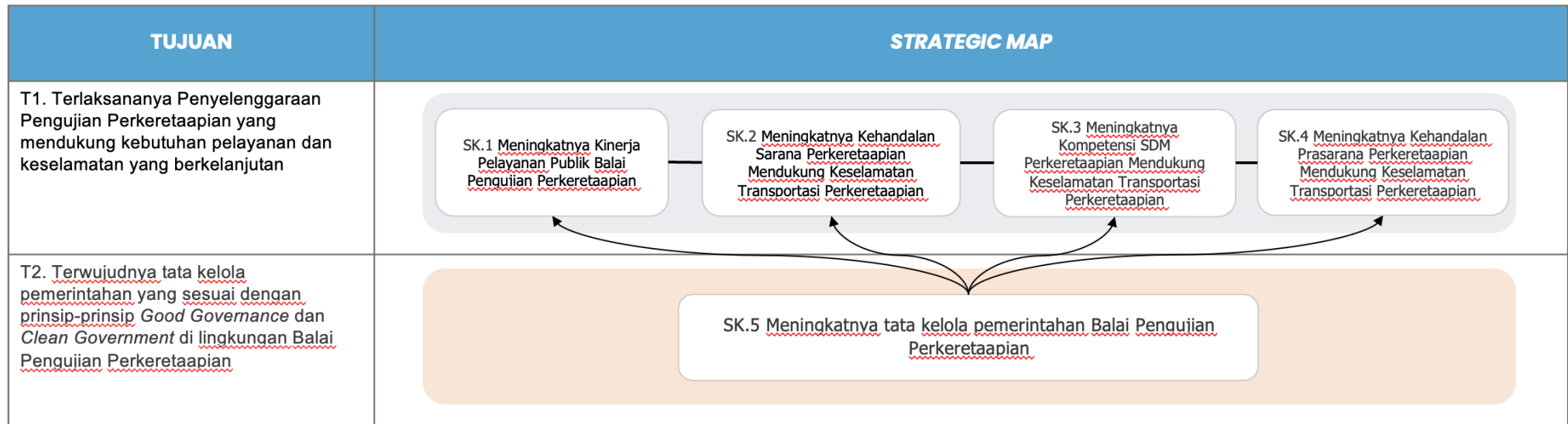
berkala progres pelaksanaan rencana strategis dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Salah satu alat yang efektif untuk menganalisis sasaran kegiatan adalah *balanced scorecard*. Alat ini memungkinkan untuk melihat kinerja organisasi dari berbagai perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. *Balanced scorecard* dapat mengidentifikasi keterkaitan antara berbagai sasaran dan memastikan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencapai satu sasaran tidak mengorbankan sasaran lainnya. Selain itu, *balanced scorecard* juga membantu dalam mengukur kinerja secara lebih holistik dan objektif. Berikut merupakan sasaran kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 berdasarkan hasil analisis *Balanced Scorecard (BSC)* terdiri dari:

- SK.1 Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik Balai Pengujian Perkeretaapian
- SK.2 Meningkatkan Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
- SK.3 Meningkatkan Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
- SK.4 Meningkatkan Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian
- SK.5 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian



Tabel 2-5 | Peta Sasaran Strategis Balai Pengujian Perkeretaapian 2025-2029





Indikator Kinerja Kegiatan Program (IKK) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 dirumuskan dengan menerapkan *SMART Analysis* yakni dengan memeriksa apakah rekomendasi indikator tersebut memenuhi kriteria berikut ini:

- 1) *Specific*: Indikator harus dibuat secara jelas dan spesifik, sehingga maksud atau pemahaman terhadap indikator tersebut tidak menyebar ke pengertian hal lain yang tidak sesuai.
- 2) *Measurable*: indikator tersebut harus bisa diukur secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dan akan lebih baik lagi jika terdapat standar sebagai acuan penilaiannya.
- 3) *Achievable*: target capaian indikator dapat dicapai dengan sumberdaya yang tersedia dan menjadi tantangan bagi organisasi sehingga menginspirasi seluruh elemen organisasi untuk mencapainya.
- 4) *Realistic*: selain harus bisa tercapai sesuai target waktu dan kapasitas sumberdaya, penetapan target capaian atas indikator juga harus realistis dan berorientasi pada hasil.
- 5) *Time Sensitive*: setiap indikator harus memiliki target waktu pencapaian dan memiliki kecenderungan berubah seiring waktu, sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan pencapaiannya.

Dengan menerapkan kriteria SMART tersebut diatas, maka pada **Tabel II.1** disampaikan rekomendasi rumusan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029.



Tabel 2-6 | Rumusan IKK Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 - 2029

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data																									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian sesuai Permenpan No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari aplikasi 3AS <i>Case Survey Management System</i>	<p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus : $IKM = SKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th><th>Nilai Interval IKM</th><th>Nilai Interval Konversi IKM</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1.00 – 2.5996</td><td>25.00 – 64.99</td><td>D</td><td>Tidak Baik</td></tr> <tr> <td>2</td><td>2.60 – 3.064</td><td>65.00 – 76.60</td><td>C</td><td>Kurang Baik</td></tr> <tr> <td>3</td><td>3.0644 – 3.532</td><td>76.61 – 88.30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>4</td><td>3.5324 – 4.00</td><td>88.31 – 100.00</td><td>A</td><td>Sangat Baik</td></tr> </tbody> </table> <p>Sumber: <i>Permenpan 14 tahun 2017</i></p>	Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik	2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik	3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik	4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik	Laporan kinerja pertahun
Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																									
1	1.00 – 2.5996	25.00 – 64.99	D	Tidak Baik																									
2	2.60 – 3.064	65.00 – 76.60	C	Kurang Baik																									
3	3.0644 – 3.532	76.61 – 88.30	B	Baik																									
4	3.5324 – 4.00	88.31 – 100.00	A	Sangat Baik																									
2	Persentase pemenuhan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian	Jumlah realisasi sarana perkeretaapian yang dilakukan pengujian kelaikan dari Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pengujian sarana perkeretaapian periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Sarana Perkeretaapian yang Dilakukan Pengujian dari tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Kebutuhan Pengujian Sarana Perkeretaapian periode 2025 – 2029 sesuai Renstra}} \times 100\%$	Laporan kinerja pertahun																									
3	Persentase pemenuhan pengujian kompetensi SDM perkeretaapian	Jumlah realisasi SDM perkeretaapian yang dilakukan pengujian kompetensi dari Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pengujian SDM perkeretaapian periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis	$\frac{\text{Jumlah Realisasi SDM Perkeretaapian yang Dilakukan Pengujian dari tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Kebutuhan Pengujian SDM Perkeretaapian periode 2025 – 2029 sesuai Renstra}} \times 100\%$	Laporan kinerja pertahun																									



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
4	Persentase pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian	Jumlah realisasi prasarana perkeretaapian (unit, km) yang dilakukan pengujian kelaikan dari Tahun 2025 s.d tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan pengujian prasarana perkeretaapian periode 2025-2029 sesuai dokumen Rencana Strategis	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Prasarana Perkeretaapian yang Dilakukan Pengujian dari tahun 2025 s.d Tahun Berjalan}}{\text{Kebutuhan Pengujian Prasarana Perkeretaapian periode 2025 –2029 sesuai Renstra}} \times 100\%$	Laporan kinerja pertahun
5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai AKIP Direktorat Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) diperoleh berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim di tingkat Ditjen Perkeretaapian terhadap penilaian mandiri (self assesment) implementasi penyelenggaraan SAKIP yang dilaksanakan pada tahun berjalan	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian (Nilai skala 1-100) Sumber : Permen Pan RB No 14 tahun 2017	Laporan kinerja pertahun
6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Penilaian Tingkat Manajemen Risiko Level 1-5 mengacu pada Peraturan Itjen Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penilaian Manajemen Risiko Dalam Mendukung Pengawasan Internal Berbasis Risiko Di Lingkungan Kementerian Perhubungan	Laporan kinerja pertahun



No	Indikator Kinerja Kegiatan	Definisi Operasional	Metode Perhitungan	Sumber Data
7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Persentase Realisasi Pendapatan Balai Pengujian Perkeretaapian	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran berupa NKA dikelompokkan pada kategori: Lebih dari 90% : Kategori Sangat Baik; 80% - 90% : Kategori Baik; 60% - 80% : Kategori Cukup; 50% - 60% : Kategori Kurang; Kurang dari 50% : Kategori Sangat Kurang. Sumber: PMK Nomor 22/PMK.02/2021	Laporan kinerja pertahun
8	Persentase realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	Perbandingan antara realisasi penerimaan PNBP dengan target pada tahun berjalan	$\frac{\text{Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Teknik Perkeretaapian}}{\frac{\text{Realisasi realisasi penerimaan PNBP}}{\text{Target penerimaan PNBP Balai Teknik Perkeretaapian pada tahun berjalan}}} \times 100\%$	Laporan kinerja pertahun
9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai pengawasan kearsipan internal yang terlaksana di Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diperoleh Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2021 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan	Laporan kinerja pertahun



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN





BAB 3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

3.1.1 Arah Kebijakan dan Dukungan Sektor Transportasi dalam RPJPN 2025 - 2029

Visi Indonesia Emas 2045 adalah: “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”. Adapun pengertian dari masing-masing frasa dalam visi tersebut Transportasi secara strategis mendukung Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045 yang berfokus pada Transformasi Ekonomi terutama pada penerapan ekonomi hijau, integrasi ekonomi domestik dan global serta perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan nasional bidang transportasi diwujudkan melalui Transformasi Ekonomi melalui penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global. Pembangunan ekonomi Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan menghadapi perubahan besar yang menuntut dilakukannya transformasi ekonomi. Beberapa perubahan besar tersebut adalah perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran geopolitik, dan geoekonomi. Di samping itu, transformasi ekonomi juga merupakan kunci untuk mewujudkan Indonesia ke luar dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap atau MIT).

Perekonomian juga akan lebih diarahkan untuk berorientasi ekspor nilai tambah tinggi. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan membuat negara dan masyarakat beradaptasi dengan perubahan tersebut dan perekonomian menjadi lebih efisien dan produktif sehingga memperkuat sektorsektor ekonomi yang potensial untuk tumbuh dan berkembang.

Transformasi ekonomi secara bertahap akan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari yang berbasis pada komoditas bernilai tambah rendah, menjadi berbasis pada industri yang bernilai tambah tinggi didukung oleh teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien, dan berdaya saing tinggi.



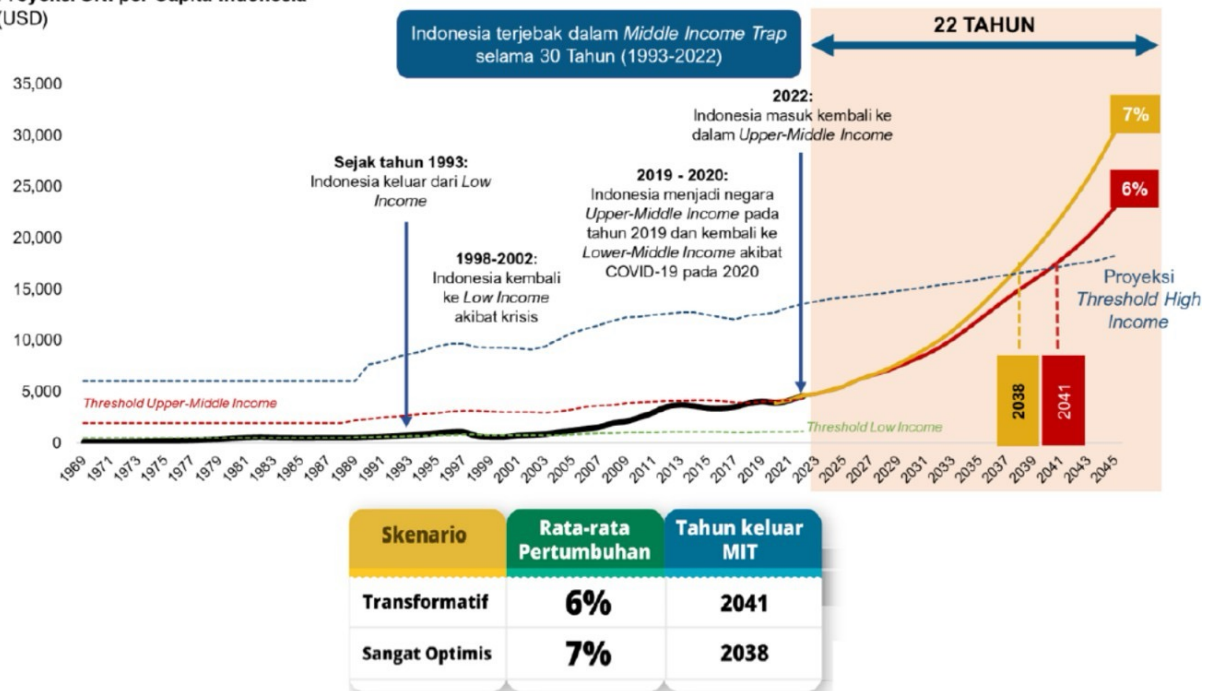
Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai kebijakan pemerintah dan reformasi struktural, termasuk pengembangan sektor ekonomi, terutama industri manufaktur dan pertanian, penerapan transformasi hijau dan biru, penerapan teknologi informasi, investasi yang besar dalam riset dan inovasi, serta didukung pembangunan infrastruktur. Transformasi ekonomi tidak bisa terjadi dengan cepat dan mudah, sehingga diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga sektor swasta, masyarakat, dan lembaga pendukung lainnya untuk menjamin pertumbuhan yang tinggi dan inklusif. Di sisi pemerintah, perlu adanya komitmen dan kebijakan yang tepat untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia telah terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (MIT) selama 30 tahun, dan harus meningkatkan produktivitas untuk keluar dari MIT. Saat ini produktivitas ekonomi Indonesia yang salah satunya tercermin dari Total Factor Productivity (TFP) berada pada posisi terendah di antara negara Wers. Melalui peningkatan produktivitas, diharapkan ekonomi dapat tumbuh rata-rata sebesar 6,0- 7,0% per tahun agar Indonesia dapat keluar dari MIT sebelum Tahun 2045 Indonesia memiliki Visi menjadi negara maju pada tahun 2045, termasuk dalam PDB lima besar tertinggi dunia dan penurunan emisi GRK hingga 93,5%. Dibutuhkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan, termasuk sektor transportasi.

Agenda transformasi ekonomi Indonesia 2045 diharapkan Indonesia keluar dari middle income trap (MIT) dengan angka PDB perkapita sebesar 155.287 USD. Dukungan transportasi terhadap sasaran visi RPJPN 2025-2045 diwujudkan dengan penurunan intensitas emisi GRK (%) menjadi 93,5% di tahun 2045 dan penurunan biaya logistik (% terhadap PDB) menjadi 8%.

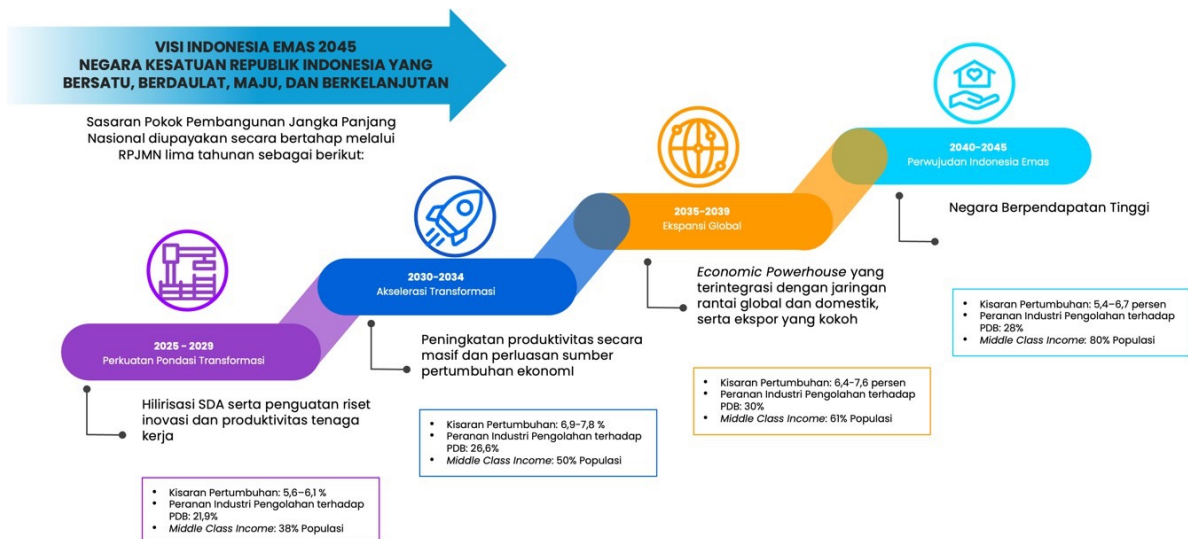


Proyeksi GNI per Capita Indonesia (USD)



Gambar 3-1 | Trajektori GNI per Kapita Indonesia (USD)

Berikut disampaikan tahapan transformasi ekonomi dalam RPJPN 2025-2029, terutama tahap 1 2025-2029 dengan tema penguatan transformasi. Fokus pada tahap 1 ini adalah hilirisasi sumber daya alam serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.



Gambar 3-2 | Tahapan Transformasi Ekonomi



Fokus penyediaan infrastruktur dikembangkan pada efisien dan efektivitas pergerakan orang maupun barang dengan mengadopsi prinsip smart logistics. Program pembangunan infrastruktur ke depannya menganut konsep green and sustainable infrastructure yang mengintegrasikan keseimbangan manfaat dan dampak infrastruktur terhadap ekonomi, sosial, dan lingkungan dengan didukung oleh kapasitas tata kelola yang mumpuni.

Arah kebijakan sektor transportasi dalam RPJPN 2025-2045 difokuskan pada efisiensi jaringan pelayaran dan penerbangan sebagai backbone konektivitas yang terintegrasi secara domestik dan terhubung secara global, penguatan integrasi antar moda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang dan Mewujudkan smart cities dan angkutan umum massal perkotaan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung transformasi sosial ekonomi diantaranya adalah :

- 1) Efisiensi jaringan angkutan pelayaran dan penerbangan sebagai tulang punggung konektivitas yang terpadu secara domestik dan terhubung secara global, melalui:
 - a. Pengembangan infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul untuk meningkatkan efisiensi layanan pelayaran (termasuk ukuran kapal yang lebih besar dan rute hub and spoke).
 - b. Pengembangan kawasan ekonomi pada backup area dan hinterland pelabuhan, serta konektivitas hinterland untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah;
 - c. Pengembangan pelabuhan simpul transshipment serta simpul logistik di Kawasan Timur Indonesia untuk meningkatkan muatan balik.
 - d. Penataan kelembagaan dan regulasi pengelolaan pelabuhan dan logistik diantaranya menyelaraskan pendapatan dari jasa labuh dengan pengelolaan pengerukan alur dan kolam.
 - e. Kebijakan tarif yang tepat untuk meningkatkan daya saing pelabuhan pada skala regional dan domestik.
 - f. Efisiensi layanan jasa pelabuhan melalui pengembangan sistem informasi dan pengelolaan tenaga kerja bongkar muat (TKBM).



- g. Mendorong pemanfaatan teknologi sarana secara terpadu dan lebih efisien, termasuk pemanfaatan kapal LoLo (Lift On-Lift Off) untuk angkutan barang jarak jauh, serta mengoptimalkan peran kapal RoRo (Roll On-Roll Off) untuk angkutan barang dan penumpang jarak dekat dan menengah.
 - h. Pengembangan kelembagaan untuk pengadaan dan pengelolaan aset kapal laut dan kapal penyeberangan untuk menjamin keberlanjutan layanan dari aspek teknis dan keselamatan pelayaran.
 - i. Pengembangan infrastruktur dan fasilitas pada bandara simpul utama, termasuk pengembangan kapasitas runway dan terminal selaras dengan pertumbuhan permintaan.
 - j. Pengembangan kawasan ekonomi, termasuk aerocity pada hinterland bandara untuk meningkatkan produktivitas ekonomi wilayah melalui keterpaduan infrastruktur bandara dan kawasan ekonomi.
 - k. Pengembangan infrastruktur dan layanan udara untuk mendukung aksesibilitas di Kawasan Timur Indonesia dan 3TP, termasuk melalui pengembangan airstrip, layanan angkutan udara keberintisan untuk penumpang dan barang.
 - l. Pengembangan teknologi seaplane untuk mendukung aksesibilitas pada provinsi perairan, sebagai bagian dari konektivitas multimoda dan antarmoda yang terpadu.
- 2) Penguatan integrasi antar moda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi logistik dan mobilitas penumpang, melalui:
- a. Sinergi perencanaan transportasi pengembangan kawasan strategis.
 - b. Pembentukan lembaga integrator untuk koordinasi layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik.
 - c. Mendorong standardisasi infrastruktur dan fasilitas di seluruh pelabuhan dan bandara yang menjadi simpul utama.
 - d. Mengembangkan infrastruktur dan jaringan jalan pada koridor utama dan koridor penghubung serta mendukung akses ke kawasan ekonomi dan simpul transportasi; dan
 - e. Mengembangkan konektivitas kereta api pada koridor logistik untuk angkutan barang dan penumpang melalui peningkatan kualitas pelayanan, keamanan, dan keselamatan perkeretaapian; serta



- meningkatkan aksesibilitas penumpang terhadap layanan kereta api melalui mekanisme pelayanan publik wajib (PSO);
- f. Mengembangkan skema pembiayaan untuk jalan daerah termasuk dana preservasi jalan dan pengadaan sarana angkutan.
 - g. Mengembangkan kebijakan tarif dan pengembangan skema pembiayaan yang berkelanjutan untuk pengadaan sarana angkutan.
 - h. Menyinergikan pembangunan jaringan transportasi (darat, laut, dan udara) dan pengembangan kawasan strategis dilakukan secara terintegrasi dalam suatu konsep perencanaan serta pengelolaan yang terpadu. Adanya kelembagaan yang dapat menjadi integrator dari arus barang untuk mengkoordinir layanan transportasi multimoda dan distribusi logistik.
 - i. Pengembangan konsep tata ruang untuk pembangunan jembatan gerak yang menghubungkan jaringan transportasi darat (kereta api dan jalan) dengan transportasi laut dan udara dalam rangka meningkatkan efisiensi logistik dan menyatukan jaringan transportasi darat nasional yang menyatu dan tidak terpisahkan.
- 3) Mewujudkan smart cities dan angkutan massal yang berkelanjutan, melalui:
- a. Mendorong penyusunan rencana mobilitas perkotaan di wilayah metropolitan, kota besar dan kota sedang yang terstandarserta mengimplementasikan pendekatan Transport Demand Management, termasuk perencanaan aspek penataan angkutan logistik perkotaan.
 - b. Pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah metropolitan.
 - c. Pengembangan skema integrasi pendanaan dan kelembagaan pengelolaan dan pengoperasian angkutan umum massal di wilayah metropolitan.
 - d. Mendorong e-mobility serta pengembangan ekosistem kendaraan berbasis EBT.



3.1.2 Arah Kebijakan Pembangunan Transportasi dalam RPJMN 2025 – 2029

Direktorat Jenderal Perkeretaapian mendukung arah kebijakan dalam prioritas nasional 3 melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Hal ini dilaksanakan melalui beberapa arah kebijakan berikut:

- a. Pengembangan Konektivitas dan layanan Transportasi Multimoda.
- b. Peningkatan konektivitas digital dan transisi energi listrik.
- c. Peningkatan produktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- d. Pendalaman sektor keuangan.
- e. Pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan.
- f. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan intelektual.

Pembangunan infrastruktur berkualitas, berkeadilan, berketahanan, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi digital diarahkan untuk mendukung terwujudnya prioritas nasional, program prioritas, dan program hasil terbaik cepat, terutama makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada air, swasembada energi, hilirisasi komoditas, dan transformasi digital.

Pembangunan infrastruktur, pengembangan industri kreatif, dan industri agromaritim bertujuan mendukung pemenuhan pelayanan dasar untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan pengurangan kemiskinan. Selain itu, pembangunan juga diarahkan untuk mendukung penciptaan kesempatan kerja dan mendorong kewirausahaan dengan melibatkan sepenuhnya usaha kecil, menengah, dan koperasi.

Pembangunan infrastruktur akan mengoptimalkan ketersediaan aset (stok infrastruktur) yang terbangun untuk meningkatkan akses; menurunkan biaya produksi, biaya transportasi dan biaya logistik; menguatkan konektivitas dan rantai nilai komoditas; serta mengembangkan ekonomi kreatif dan pariwisata.

Dalam lima tahun ke depan, pembangunan infrastruktur akan mencakup penyediaan air, pembangunan rumah dan kawasan permukiman, pengelolaan sanitasi dan persampahan, pembangunan jaringan transportasi, serta penyediaan listrik dan penguatan transformasi digital.



Selain itu, pembangunan infrastruktur yang terpadu, baik layanan transportasi, digital, maupun ketenagalistrikan dengan pengembangan industri kreatif diarahkan untuk memberi ruang yang luas bagi pengembangan kewirausahaan generasi muda, peningkatan inovasi dan perluasan kesempatan pekerjaan bagi banyak orang, serta pengembangan dan peningkatan ekosistem digital. Dengan keunikan budaya dan kekayaan sumber daya lokal, pengembangan industri kreatif melalui pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia.

Pembangunan infrastruktur terpadu dilakukan dengan memperhatikan pendekatan solusi berbasis alam untuk mengurangi risiko bencana dan perubahan iklim, sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, dalam lima tahun ke depan (2025-2029), pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Keseluruhan upaya tersebut dapat didukung oleh peningkatan peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi pembangunan.

Arah kebijakan pembangunan transportasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda yang diarahkan pada peningkatan aksesibilitas terhadap layanan dasar, pusat perekonomian, serta integrasi antarmoda transportasi darat, laut, dan udara untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan pergerakan penumpang dan barang melalui intervensi kebijakan:

- a. Pengembangan konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan.
- b. Pengembangan kereta api penumpang antarkota dan penguatan kereta api angkutan barang.
- c. Pengembangan jaringan pelabuhan terpadu.
- d. Pengembangan jaringan bandara terpadu.
- e. Penguatan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- f. Pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan.



- g. Pengembangan sumber daya manusia untuk peningkatan kinerja layanan transportasi,
 - h. Peningkatan layanan pencarian dan pertolongan kecelakaan transportasi.
- Dukungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam pembangunan transportasi nasional 2025-2029 cukup strategis melalui kegiatan yang berfokus pada:
- a. Penyediaan transportasi perintis multimoda melalui layanan angkutan kereta api penumpang bersubsidi (perintis dan PSO).
 - b. Pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi kereta api.
 - c. Penyediaan kereta api regional/antar kota melalui pengembangan layanan kereta api penumpang antarkota, kereta api kecepatan tinggi dan kereta api logistik dalam mendukung kawasan strategis/prioritas (kawasan industri dan ekonomi khusus, kawasan pariwisata dan kawasan sentra produksi pangan/food estate dan kawasan strategis lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah).
 - d. Pengembangan dan pembangunan angkutan umum massal perkotaan berbasis rel kereta api di kawasan perkotaan prioritas.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategis Kementerian Perhubungan

Pemetaan isu strategis dan lingkungan strategis untuk menghasilkan arah kebijakan pembangunan transportasi nasional untuk periode 2025-2029. Secara umum, lingkungan strategis dipilah menjadi 3 bagian sesuai dengan aspek pembangunan yang berkelanjutan yakni dari aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Sedangkan isu strategis secara umum dipisahkan berdasarkan transportasi perkotaan, transportasi dalam pulau, transportasi antar pulau dalam negeri, transportasi internasional. Arah kebijakan tersebut untuk selanjutnya akan didetailkan ke dalam sejumlah aktivitas/inisiatif strategis berupa indikasi kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan selama periode 2025-2029.



Tabel 3-1 | Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Program Kementerian Perhubungan

Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SS1 Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas transportasi nasional	AK.1 Peningkatan konektivitas internasional untuk mendukung daya saing ekonomi dan kedaulatan nasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan standar teknis dan pelayanan <i>Pelabuhan Hub Internasional</i> (PHI) Kuala Tanjung, Tanjung Priok dan Bitung sesuai perkembangan kebutuhan pelayanan internasional Mengembangkan konektivitas terhadap jaringan utama internasional (<i>international core route</i>) Menguatkan konektivitas terhadap jaringan penerbangan internasional pada bandara internasional Mendorong pelaku nasional menjadi pemain global melalui aliansi strategis pada jaringan pelabuhan, pelayaran, bandara, dan penerbangan global
	AK.2 Peningkatan efektivitas konektivitas backbone antar pulau dan sistem pendukungnya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Mengharmonisasikan standar teknis dan integrasi pelayanan pada jaringan pelabuhan utama (<i>Integrated Port Network</i>) Mengembangkan Simpul Distribusi Utama Baru Nasional (Superhub IKN, Pelabuhan/Bandara Hub) Menata kembali jaringan pelayaran nasional sesuai konsep pendulum nusantara yang berpola <i>loop</i> Mengintegrasikan sistem jaringan perintis angkutan laut, darat, dan udara untuk menjamin pemerataan konektivitas ke seluruh wilayah NKRI Optimalisasi sistem <i>direct-line</i> (tol laut dan pendukungnya: jembatan udara, <i>long distance ferry</i>, subsidi angkutan barang) untuk menurunkan biaya logistik barang pokok dan penting ke DTPK
	AK.3 Peningkatan efisiensi sistem distribusi dalam pulau untuk mengurangi biaya transportasi dan logistik	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan jaringan logistik pulau besar (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua) yang menghubungkan secara efektif antar pusat kegiatan, pusat produksi, dan simpul transportasi Revitalisasi sistem perusahaan angkutan umum penumpang dan barang moda jalan Menuntaskan pengintegrasian jaringan jalur kereta api Trans Sumatera Mengembangkan akses jalur kereta api dan/atau akses jalan Kelas I dari Kawasan Industri, Kawasan Tambang, dan Kawasan Pertanian berskala Besar Optimalisasi pemanfaatan kereta api Pulau Jawa untuk logistik barang khusus (semen, batu dan pasir, batu bara, besi baja, dll) yang berpotensi menyebabkan ODOL di jalan (termasuk pengembangan stasiun barang dan dry port moda kereta api)
	AK.4 Pengembangan sistem angkutan massal perkotaan terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan sistem angkutan massal pada seluruh PKN sesuai klasifikasi ukuran kotanya Menguatkan sistem integrasi pendukung angkutan massal (fasilitas integrasi, sistem feeder, sistem pembayaran terintegrasi, jalur Reorientasi tata ruang perkotaan (TOD, mix-use, urban renewal) Menerapkan <i>Intelligent Transport System</i> untuk pengaturan lalu lintas dan angkutan perkotaan
	AK.5 Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi	<ul style="list-style-type: none"> Memanfaatkan teknologi untuk penyediaan konektivitas ke seluruh NKRI (sea plane, drone, dll) Optimalisasi pengelolaan sistem PSO angkutan umum perkotaan yang lebih tepat sasaran Mendukung pengembangan sistem angkutan umum kawasan perdesaan Memfasilitasi pengembangan layanan angkutan khusus (bus sekolah, kapal rumah sakit, pesawat siaga, kapal ternak, kapal pelra, kapal rede, dlsb)
SS2 Meningkatnya kinerja pelayanan	AK.6 Peningkatan kualitas pelayanan angkutan publik	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan standar regularitas/reliabilitas dan kualitas pelayanan angkutan kelas ekonomi/perintis bersubsidi untuk golongan ekonomi/wilayah tertentu Memberikan dukungan pengoperasian angkutan massal perkotaan kepada Daerah (program BTS)



Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
transportasi	sebagai bagian dari pelayanan dasar	
	AK.7 Peningkatan efisiensi dan kualitas pelayanan pada sistem utama melalui digitalisasi untuk mendukung daya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan standar pelayanan pada pelabuhan hub internasional dan bandara internasional • Optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas dan integrasi pelayanan pada sistem angkutan penumpang • Optimalisasi integrasi pelayanan transportasi unimodal dan multimoda barang (termasuk: INSW, NLE, Airport Cargo-Village, Market Place <i>Trucking</i>, dlsb)
SS3 Meningkatnya Keselamatan transportasi	AK.8 Pemenuhan (<i>compliance</i>) standar teknis sarana dan prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja pelaksanaan pengujian dan perizinan sarana dan prasarana • Meningkatkan kinerja monitoring dan audit keselamatan sarana dan prasarana • Meningkatkan efektivitas pelaksanaan SOP tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana • Meningkatkan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan
	AK.9 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan <i>safety awareness</i> dan peran masyarakat dlm peningkatan keselamatan transportasi • Meningkatkan kepatuhan Operator Transportasi untuk melakukan self-assessment keselamatan • Optimalisasi koordinasi antar K/L terkait dan Pemda dalam peningkatan keselamatan • Meningkatkan efektivitas penegakan aturan keselamatan transportasi
SS4 Menurunnya dampak lingkungan Sektor transportasi	AK.10 Percepatan transformasi energi di sector	<ul style="list-style-type: none"> • Mendukung percepatan peralihan kepada kendaraan listrik dan moda <i>non-motorized</i> • Mendukung transformasi energi di sektor pelayanan dan penerbangan • Perluasan penerapan elektrifikasi perkeretaapian
	AK.11 Peningkatan penerapan konsep transportasi ramah lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Modernisasi/refurbishments teknologi sarana prasarana (dalam rangka efisiensi, transformasi energi, mengurangi emisi, dan adaptif terhadap perubahan iklim) • Mendorong penerapan konsep eco/greenbuilding/system pada simpul transportasi
SS5 Meningkatnya kualitas kebijakan di Bidang transportasi	AK.12 Peningkatan kualitas perencanaan kebijakan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam pelaksanaan <i>agenda setting</i> (identifikasi permasalahan dan kebutuhan rumusan kebijakan Transportasi) • Meningkatkan kualitas formulasi kebijakan yang bersifat evidence based dan inovatif yang berorientasi keluar/<i>stakeholders</i> dan ke depan (<i>outward looking</i> dan <i>forward looking</i>)
	AK.13 Peningkatan efektivitas implementasi kebijakan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan pengorganisasian, komunikasi, monitoring dan evaluasi dalam implementasi kebijakan bidang transportasi • Melaksanakan evaluasi atas efisiensi, efektivitas, dampak dan kemanfaatan, penerimaan stakeholders, serta responsivitas dari implementasi kebijakan bidang transportasi



Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SS6 Meningkatkan SDM transportasi yang kompeten	AK.14 Pemenuhan kebutuhan SDM unggul yang <i>link and match</i> Dengan kebutuhan industri dan pengembangan sarana prasarana transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan <i>Training Needs Analysis</i> (TNA) dan <i>Grand Design</i> SDM Transportasi • Meningkatkan jenis Pendidikan dan Pelatihan Kerjasama Vokasi bidang transportasi sesuai dengan kebutuhan Industri, swasta, BUMN dan Luar Negeri • Penguatan SDM Transportasi berbasis wilayah dan kemasyarakatan (termasuk di dalamnya pola pembibitan, diklat pemberdayaan masyarakat (DPM), • fasilitasi diklat operator di daerah, akses diklat ke daerah 3TP/DTPK, afirmasi bagi daerah tertentu/beasiswa)
	AK.15 Peningkatan kualitas Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan standar pelaksanaan diklat, melalui penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), pengembangan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), serta Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) • Peningkatan kualitas dan relevansi kurikulum diklat, penyediaan tenaga pendidik yang berkompeten, serta penyediaan fasilitas yang mendukung, peningkatan • kerjasama dan penelitian) • Peningkatan efektivitas pelaksanaan diklat pembentukan karakter SDM Transportasi dan <i>Leadership Training Program</i>
SS7 Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan yang baik	AK.16 Peningkatan efektivitas regulasi dan kelembagaan penyelenggaraan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan peran regulasi sebagai pendorong transformasi struktural penyelenggaraan sector transportasi yang modern, berdaya saing, dan berkelanjutan • Meningkatkan peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan transportasi nasional
	AK.17 Peningkatan kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya dan akuntabilitas kinerja pemerintahan di Lingkungan Kementerian Perhubungan • Transformasi kinerja kelembagaan Kementerian Perhubungan menuju good governance yang didorong oleh pemanfaatan teknologi



3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029

Sesuai arah kebijakan dan strategi pembangunan perkeretaapian dalam RPJMN 2025-2029 dan Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029, dilakukan inventarisasi arah kebijakan dan strategi utama Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk mendukung RPJMN 2025-2029 antara lain :

1. Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota
2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel maupun Berbasis Otonom Terintegrasi dan Berkelanjutan, melalui strategi:
3. Pengembangan Kereta Api Angkutan Barang Penduduk Logistik
4. Pengembangan Jaringan Kereta Api di Ibukota Negara Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan Berbasis Rel maupun Berbasis Otonom Terintegrasi dan Berkelanjutan, melalui strategi :

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2025-2029 untuk setiap Sasaran Program (SP) berdasarkan hasil analisis yang memetakan perkembangan isu dan lingkungan strategis menjadi elemen kelemahan, kekuatan, peluang, dan tantangan yang perlu diantisipasi oleh jajaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian melalui identifikasi risiko pada setiap Sasaran Program dan pelaksanaan arah kebijakan strategis.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan serta mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Direktorat Jenderal Perkeretaapian, ditetapkan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 (T.1) Terwujudnya perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan dengan arah kebijakan, yakni:
 - a. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian melalui pembangunan jaringan kereta api antar kota sesuai RIP Nasional, peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan, peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik dan reaktivitas jalur kereta api mati.



- b. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api, peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian, peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian, peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian, peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian.
 - c. Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian melalui peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting, peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api, peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian, peningkatan subsidi pelayanan kereta api, peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender, peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api, peningkatan aspek keselamatan perlintasan sebidang serta peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang.
2. Tujuan 2 (T.2) Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yang berkualitas dengan arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran adalah peningkatan pencapaian nilai AKIP, peningkatan pencapaian nilai kinerja anggaran, peningkatan pencapaian realisasi PNBPN Direktorat Jenderal Perkeretaapian, peningkatan pencapaian kinerja tata kelola pemerintahan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.



Tabel 3-2 | Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Bidang Transportasi Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029

Arah Kebijakan		Strategi Implementasi	
Tujuan	Sasaran Program		
Terwujudnya transportasi perkeretaapian yang terhubung, terintegrasi serta memenuhi kebutuhan pelayanan dan keselamatan yang berkelanjutan	SP1 Meningkatnya konektivitas transportasi perkeretaapian	AK1 Peningkatan jaringan kereta api antar kota sesuai RIPNasional	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jalur kereta api antar kota • Pembangunan jaringan kereta api cepat (<i>high speed</i>) • Pembangunan jaringan kereta api <i>medium speed</i> • Pembangunan jembatan/terowongan • Pembangunan/peningkatan fasilitas operasional (persinyalan, telekomunikasi, instalasi listrik)
		AK2 Peningkatan jaringan kereta api perkotaan terintegrasi dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) pembangunan jalur kereta api perkotaan • Peningkatan jalur kereta api perkotaan termasuk jalur ganda • Pembangunan jalur kereta api massal cepat • Pembangunan jalur kereta api ringan • Pembangunan sistem angkutan umum massal berbasis rel dan otonom di perkotaan Ibukota Negara (IKN) • Pembangunan/pengembangan stasiun terintegrasi • Pembangunan fasilitas operasi kereta api (sistem persinyalan, telekomunikasi, sistem listrik termasuk LAA)
		AK3 Peningkatan jaringan dan layanan kereta api pendukung logistik	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan pengintegrasian jaringan jalan rel Pulau Sumatera (<i>Trans Sumatera Railways</i>) untuk mendukung peningkatan angkutan komoditas utama dan efisiensi logistik barang • Pengembangan sistem logistik rel di Pulau Jawa untuk mengoptimalkan pemanfaatan kapasitas jalur rel ganda/<i>double track</i> untuk logistik angkutan khusus • Pengembangan stasiun barang/<i>dry port</i> dalam mendistribusikan logistik barang • Pengembangan jaringan kereta api komoditas utama di Pulau Kalimantan
		AK4 Reaktivasi jalur kereta api mati	<ul style="list-style-type: none"> • Penyiapan dokumen pembangunan (<i>readiness criteria</i>) reaktivasi jalur kereta api • Pembangunan reaktivasi jalur kereta api lintas mati • Penyediaan prasarana stasiun, fasilitas operasi
	SP2 Meningkatnya kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian	AK5 Peningkatan kapasitas lintas jalur kereta api eksisting	<ul style="list-style-type: none"> • Pemeliharaan dan peremajaan jalur kereta api yang telah usang • Peningkatan pada prasarana, persinyalan dan fasilitas operasi keamanan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan perjalanan
		AK6 Peningkatan penerapan teknologi perkeretaapian dalam pelayanan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan konsep transportasi perkeretaapian yang ramah lingkungan



Arah Kebijakan			
Tujuan	Sasaran Program	Strategi Implementasi	
	AK7 Peningkatan sistem monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja pelayanan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan manajemen berbasis teknologi informasi untuk mengatur jadwal, pemeliharaan, dan distribusi tiket secara otomatis termasuk sistem pemantauan kereta secara real-time • Bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan start-up untuk mengadopsi inovasi terbaru dalam sistem perkeretaapian, seperti kecerdasan buatan dan analitik data • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja pelayanan angkutan kereta api • Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pemenuhan standar kinerja prasarana, sarana angkutan kereta api • Pelaksanaan survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan angkutan kereta api antarkota dan perkotaan • Pengembangan sistem penerimaan dan respon pengaduan • Pengembangan norma/standar/pedoman/manual pelayanan kereta api perkeretaapian 	
	AK8 Pelaksanaan subsidi pelayanan angkutan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Skema pengadaan sarana kereta api perintis • Pengembangan keberlanjutan dan perbaikan skema PSO dan subsidi yang tepat sasaran • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja layanan PSO dan angkutan perintis 	
	AK9 Peningkatan akses layanan kereta api yang inklusif bagi berkebutuhan khusus dan responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan standar layanan berkebutuhan khusus • Peningkatan penyediaan aksesibilitas bagi berkebutuhan khusus • Penyediaan kursi prioritas di kereta dan stasiun kereta api • Penyediaan kereta khusus wanita 	
	AK10 Peningkatan fasilitas keterpaduan/integrasi di stasiun kereta api	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keterpaduan jadwal pelayanan, sistem pembayaran terpadu, sistem informasi terpadu • Penyediaan <i>park and ride</i> di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas <i>non-motorized</i> (pejalan kaki, sepeda) dan berkebutuhan khusus di stasiun kereta api • Penyediaan fasilitas integrasi antarmoda di stasiun kereta api 	
	AK11 Pemenuhan aspek keselamatan perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan peralatan keselamatan perlintasan sebidang (pintu perlintasan/<i>early warning system</i> dll) • Penyediaan petugas jaga dan pos jaga • Potensi penutupan perlintasan sebidang liar • Peningkatan perawatan perlintasan sebidang • Pembangunan perlintasan tidak sebidang 	
	AK12 Peningkatan peran pemangku kepentingan dalam peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi implementasi kewenangan pengelolaan dan peningkatan keselamatan perlintasan sebidang sesuai kewenangan pengelolaan jalan 	



Arah Kebijakan			
Tujuan	Sasaran Program	Strategi Implementasi	
	SP3 Meningkatnya keselamatan transportasi perkeretaapian	keselamatan di perlintasan sebidang	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi evaluasi perlintasan sebidang dengan melibatkan pemangku kepentingan (Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan, Kepolisian, Dinas Bina Marga dan operator)
		AK13 Peningkatan pengawasan dan evaluasi kinerja keselamatan kereta api	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian Peningkatan pelaksanaan self-assessment keselamatan perkeretaapian Peningkatan kinerja monitoring, evaluasi, inspeksi dan audit penerapan sistem manajemen keselamatan perkeretaapian Peningkatan efektivitas pelaksanaan standar operasional prosedur tanggap darurat gangguan sarana dan prasarana perkeretaapian Peningkatan teknologi dan sistem informasi dalam pendataan dan ketanggapan penanganan gangguan keselamatan perkeretaapian
		AK14 Peningkatan pengawasan kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan perawatan sarana perkeretaapian Peningkatan perawatan prasarana perkeretaapian Peningkatan pengujian sarana perkeretaapian Peningkatan pengujian prasarana perkeretaapian Keberlanjutan skema IMO dan TAC
		AK15 Peningkatan pemenuhan fasilitas pengujian dan perawatan perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian Pemenuhan peralatan perawatan prasarana perkeretaapian Pemenuhan peralatan perawatan sarana perkeretaapian Pengembangan workshop laboratorium dan simulator Pengembangan peralatan dan SDM pengujian dan perawatan perkeretaapian
		AK16 Peningkatan pemeliharaan peralatan dan pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan prasarana perkeretaapian Peningkatan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan perawatan sarana perkeretaapian
		AK17 Peningkatan sertifikasi kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian Peningkatan sertifikasi pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian Peningkatan sertifikasi perawatan sarana perkeretaapian
		AK18 Peningkatan sertifikat kompetensi SDM perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi SDM perkeretaapian Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM regulator (perencana/Pembina, penguji sarana, penguji prasarana, auditor/inspektur keselamatan)



Arah Kebijakan			
Tujuan	Sasaran Program	Strategi Implementasi	
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang berintegritas dan adaptif di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	SP4 Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	AK19 Peningkatan pencapaian nilai AKIP	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sertifikasi kompetensi SDM operator (awak sarana, pengatur perjalanan, tenaga pemeriksa dan perawatan sarana jalur dan bangunan, fasilitas operasi, penjaga perlintasan, pengawas peron, penjaga rumah sinyal, wesel, juru langsir)
		AK20 Peningkatan pencapaian Nilai Kinerja Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan sistem <i>e-performance</i> dalam penilaian kinerja Penguatan penerapan AKIP di lingkungan Ditjen Perkeretaapian Peningkatan kompetensi SDM di bidang AKIP melalui bimtek dan sosialisasi Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan DJKA Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran Penerapan penggunaan SBK bidang perkeretaapian Monitoring capaian realisasi output kegiatan
		AK21 Peningkatan pencapaian Realisasi PNBPDJKA	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pembayaran <i>Track Access Charge</i> Monitoring dan Evaluasi Optimalisasi PNBPD atas Pemanfaatan BMN di Lingkungan Direktorat Jenderal perkeretaapian
		AK22 Peningkatan legislasi dan litigasi transportasi perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Harmonisasi dan Uji Publik rancangan peraturan di bidang perkeretaapian Peningkatan sosialisasi tahapan pembentukan perundang-undangan Peningkatan pelaksanaan advokasi hukum dan sosialisasi hukum di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian
		AK23 Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Penataan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pembinaan karier dan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pengelolaan kegiatan konseling pegawai Penerapan zona integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Pengembangan pola dan kurikulum pendidikan dan pelatihan perkeretaapian. Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital Peningkatan efektivitas kegiatan bimbingan teknis dan diklat di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Penguatan efektivitas pengelolaan kepegawaian di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian



3.4 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029

3.4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian Sasaran Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 - 2029

Arah kebijakan dan strategi Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029 untuk setiap Sasaran Kegiatan (SK) berdasarkan hasil analisis yang memetakan perkembangan isu dan lingkungan strategis menjadi elemen kelemahan, kekuatan, peluang dan tantangan yang perlu diantisipasi oleh Balai Pengujian Perkeretaapian melalui identifikasi risiko pada setiap Sasaran Kegiatan dan pelaksanaan arah kebijakan strategis.

Dalam rangka mendukung agenda pembangunan nasional dan mendukung pencapaian tujuan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian serta mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Balai Pengujian Perkeretaapian, ditetapkan arah kebijakan Balai Pengujian Perkeretaapian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan 1 Terlaksananya Kinerja Pelayanan Publik Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Balai Pengujian Perkeretaapian

AK.1 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian

2. Tujuan 2 Terlaksananya penyelenggaraan pengujian perkeretaapian yang mendukung konektivitas perkeretaapian

Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian:

AK.2 Peningkatan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian

AK.3 Pengembangan Sistem Pengujian Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi

AK.4 Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi

AK.5 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian



Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian:

- AK.6 Peningkatan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian
- AK.7 Pengembangan Sistem Pengujian SDM Perkeretaapian Berbasis Teknologi
- AK.8 Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi
- AK.9 Perawatan Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

- AK.10 Peningkatan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian
- AK.11 Pengembangan Sistem Pengujian Prasarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi
- AK.12 Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi
- AK.13 Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian

3. Tujuan 3 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government* di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian

- AK.14 Peningkatan Pencapaian Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian
- AK.15 Peningkatan Pencapaian Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian
- AK.16 Peningkatan Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian
- AK.17 Peningkatan Pencapaian Realisasi PNBK Balai Pengujian Perkeretaapian
- AK.18 Peningkatan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian
- AK.19 Peningkatan Pengelolaan BMN di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian



AK.20 Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Balai Pengujian Perkeretaapian

AK.21 Peningkatan Pengawasan Intern di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian

3.4.2 Kegiatan-Kegiatan Strategi Pencapaian Sasaran Balai Pengujian Perkeretaapian 2025-2029

Berdasarkan KMK Nomor 392/KMK.05/2022 Tentang Penetapan Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai Badan Layanan Umum, maka dari itu Balai Pengujian memiliki kegiatan-kegiatan strategis yang akan direncanakan untuk dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pada periode 2025 – 2029. Kegiatan ini merupakan langkah-langkah Balai Pengujian Perkeretaapian untuk menjadi BLU yang terus berkembang. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

NO	RENCANA KEGIATAN	RENCANA TAHUN PENYELESAIAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pembangunan Fasilitas Laboratorium Uji Komponen Pengujian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian					
	• Kajian <i>Basic Engineering Design</i> dan <i>Detailed Engineering Design</i> Fasilitas Laboratorium Uji Komponen					
	• Pembangunan Fasilitas Laboratorium Uji Komponen					
	• Studi Kebutuhan Alat Pengujian Komponen Perkeretaapian					
	• Pengadaan Peralatan Pengujian Komponen					



NO	RENCANA KEGIATAN	RENCANA TAHUN PENYELESAIAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
2	Pembangunan Fasilitas Klinik Balai Pengujian Perkeretaapian					
	• Penyusunan Kajian Pengoperasian Fasilitas Klinik Balai Pengujian Perkeretaapian					
	• Pemenuhan Kebutuhan SDM dan Fasilitas Klinik Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian					
	• Pemenuhan Izin Operasional Klinik Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian					
	• Penyusunan Kajian BED dan DED Pengoperasian Fasilitas Klinik Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian					
3	Transformasi Balai Pengujian Perkeretaapian menjadi Balai Besar Pengujian dan Sertifikasi Perkeretaapian					
	• Kajian Kelaikan Ekonomi dan Finansial Bekasi Timur					
	• Perizinan Pembangunan Bekasi Timur					
	• Studi Penyusunan Pedoman K3 Lingkungan					
	• Studi <i>Roadmap</i> Kompetensi Balai Pengujian Perkeretaapian					



Tabel 3-3 | Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi Balai Pengujian Perkeretaapian

Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
SK.1 Meningkatkan Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	AK.1 Peningkatan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	• Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Sarana Perkeretaapian
	AK.2 Pengembangan Sistem Pengujian Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi	• Sistem Informasi Pengujian Sarana Perkeretaapian
	AK.3 Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi	• Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi • Pemenuhan Fasilitas Peralatan Laboratorium Uji Komponen Sarana Perkeretaapian
	AK.4 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	• Perawatan dan pemeliharaan peralatan pengujian sarana perkeretaapian • Perawatan dan pengoperasionalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara
SK.2 Meningkatkan Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	AK.5 Peningkatan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	• Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Pengujian SDM Perkeretaapian • Penyusunan Dan Penyesuaian Materi Uji Kompetensi Terhadap Perkembangan Teknologi Perkeretaapian Dan Jenis Kompetensi
	AK.6 Pengembangan Sistem Pengujian SDM Perkeretaapian Berbasis Teknologi	• Sistem Informasi Uji Kompetensi SDM Perkeretaapian
	AK.7 Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi	• Peningkatan dan Pemenuhan Fasilitas Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian • Pemenuhan Fasilitas Tes Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian
	AK.8 Perawatan Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian	• Perawatan Dan Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian
SK.3 Meningkatkan Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung	AK.9 Peningkatan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	• Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian
	AK.10 Pengembangan Sistem Pengujian Prasarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi	• Sistem Informasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian



Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	AK.11 Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemenuhan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi • Pemenuhan Fasilitas Peralatan Laboratorium Uji Komponen Prasarana Perkeretaapian
	AK.12 Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Perawatan dan pemeliharaan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian
SK.4 Meningkatnya kinerja pelayanan publik Balai Pengujian Perkeretaapian	AK.13 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian
SK.5 Meningkatnya tata kelola pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	AK.14 Peningkatan Pencapaian Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja (LMCK, LKIP, LAPTAH) Triwulan dan Tahunan sesuai standar yang ditentukan • Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja (RKT, PK, RKA, RSB, RENSTRA) Tahunan sesuai standar yang ditentukan • Pengembangan sistem Informasi dan pengelolaan <i>database</i> Balai Pengujian Perkeretaapian
	AK.15 Peningkatan Pencapaian Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Tahunan sesuai standar yang ditentukan • Monitoring dan Evaluasi Rencana Tindak Lanjut Pengendalian per-Triwulan
	AK.16 Peningkatan Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan efektivitas pelaksanaan dan penyerapan anggaran di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian • Konsistensi RPD dengan realisasi anggaran • Monitoring capaian realisasi output kegiatan
	AK.17 Peningkatan Pencapaian Realisasi PNPB Balai Pengujian Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kerja sama pemanfaatan layanan utama • Peningkatan kerja sama pemanfaatan layanan penunjang



Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi Implementasi
	AK.18 Peningkatan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Kearsipan dan Tata Naskah Dinas
	AK.19 Peningkatan Pengelolaan BMN di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Inventarisasi aset yang dimiliki Balai Pengujian Perkeretaapian • Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Perkeretaapian
	AK.20 Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Balai Pengujian Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan dan penyempurnaan sistem manajemen kinerja seluruh pegawai di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian • Peningkatan pemenuhan kebutuhan jumlah dan kompetensi SDM aparatur dan teknis di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian • Penyusunan pedoman Kajian Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Balai Pengujian Perkeretaapian
	AK.21 Peningkatan Pengawasan Intern di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Kepatuhan Kinerja dan Keuangan • Pengawasan Intern dan Eksternal

3.5 Kerangka Regulasi Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029

Kerangka regulasi Balai Pengujian Perkeretaapian bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan kegiatan di Balai Pengujian Perkeretaapian telah memiliki aspek regulasi yang sudah sesuai dengan kebutuhan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program Balai Pengujian Perkeretaapian, diusulkan beberapa regulasi yang menjadi bidang tugas dan yang terkait dengan bidang tugas Balai Pengujian Perkeretaapian untuk ditetapkan dalam program legislasi tahun 2025-2029. Regulasi Balai Pengujian Perkeretaapian yang dibutuhkan penyesuaian/revisi/perbaikan dalam rangka mendukung pemenuhan tujuan dan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
Urgensi: perkembangan teknologi prasarana dan sarana perkeretaapian, pengaturan pengoperasian kereta api dengan sistem pengoperasian teknologi baru dan penyempurnaan/pendetailan pengaturan manajemen keselamatan perkeretaapian Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan dan inklusif dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong kemajuan penyelenggaraan perkeretaapian nasional.
2. Revisi Regulasi Bidang Perkeretaapian
Penguatan aspek regulasi bidang perkeretaapian dengan menyempurnaan dan melengkapi norma/standar/pedoman/kriteria sesuai perkembangan/kebutuhan penyelenggaraan perkeretaapian terkait perkembangan penerapan teknologi baru baik prasarana maupun, perbaikan tata kelola perijinan serta kebutuhan peningkatan implementasi dalam penerapan regulasi bidang perkeretaapian, perkembangan keselamatan perkeretaapian, dan peningkatan standar pelayanan kereta api sebagai respon terhadap masukan, harapan dan keinginan pengguna dalam rangka peniingkatan layanan kereta api.

3. Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Perkeretaapian

Perubahan dan penguatan kelembagaan dan organisasi di Balai Pengujian Perkeretaapian perlu didukung dengan adanya penyiapan berbagai regulasi terkait dengan bisnis proses, struktur organisasi tata kerja, peta jabatan, dan regulasi pendukung lainnya. Dukungan regulasi yang kuat diharapkan dapat memberikan kepastian dan arah perubahan kelembagaan yang tepat dengan memperhatikan berbagai ketentuan teknis dan administratif yang ada.



Tabel 3-4 | Kebutuhan Revisi Regulasi Balai Pengujian Perkeretaapian

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
1	Revisi UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Urgensi perkembangan teknologi prasarana dan sarana perkeretaapian, pengaturan pengoperasian kereta api dengan sistem pengoperasian teknologi baru dan penyempurnaan/pendetailan pengaturan manajemen keselamatan perkeretaapian. - Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan inklusif dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong 	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2	Regulasi Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang penentuan tarif layanan Balai Pengujian Perkeretaapian	mengoptimalkan komposisi layanan pengujian sebagai pedoman dalam layanan pengujian perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
3	Regulasi Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Remunerasi BLU Balai Pengujian Perkeretaapian	sebagai pedoman perhitungan Remunerasi BLU Balai Pengujian Perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
4	Regulasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	sebagai dasar Balai Besar Sertifikasi dan Pengujian Perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
5	Regulasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian	peningkatan kualitas layanan publik dan optimalisasi struktur organisasi untuk peluang penerimaan pendapatan layanan utama dan layanan penunjang	Balai Pengujian Perkeretaapian
6	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sertifikasi Kelaikan Lokomotif	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 	Direktorat Sarana Perkeretaapian
7	Revisi PM 15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sertifikasi Kelaikan Kereta yang ditarik lokomotif	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 	Direktorat Sarana Perkeretaapian
8	Revisi PM 16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 	Direktorat Sarana Perkeretaapian



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
9	Revisi PM 17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sertifikasi Kelaikan Gerbong	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 	Direktorat Sarana Perkeretaapian
10	Revisi PM 17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sertifikasi Kelaikan Gerbong	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 	Direktorat Sarana Perkeretaapian
11	Revisi PM 29 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> - Item ramp beserta pengaman dan guiding block pada stasiun yang berada pada interior maupun eksterior gedung stasiun diusulkan untuk dapat mengakomodir struktur bagi penyanggah difable - Menyantumkan persyaratan teknis ketersediaan ruangan satuan pelayanan DJKA; - Menyantumkan pembahasan persyaratan teknis struktur Bangunan Gedung Stasiun melingkupi Struktur atas dan Struktur bawah - Pembahasan terkait sterilisasi bangunan gedung stasiun - Pembahasan jarak bebas penumpang dari tangga/lift ke tepi peron - Pembahasan terhadap detail drainase di stasiun kereta api - Pembahasan detail terhadap jarak tepi peron kepada as track maupun kepada sarana pada kondisi lengkungan 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
12	Revisi PM 30 Tahun 2011 tentang Sertifikasi dan Tata Cara Pengujian Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya penyesuaian komponen yang diuji terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR - Pada PM fokus pengujian jalur KA hanya pada jalan rel sehingga perlu adanya penambahan dan pendetailan terhadap pemeriksaan jembatan dan terowongan - Pengujian stasiun belum terakomodir meliputi Pemeriksaan gedung, instalasi pendukung dan peron 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
13	Revisi PM 31 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Item ramp beserta pengaman dan guiding block pada stasiun yang berada pada interior maupun eksterior gedung stasiun diusulkan untuk dapat mengakomodir struktur bagi penyanggah difable - Menyantumkan persyaratan teknis ketersediaan ruangan satuan pelayanan DJKA; - Menyantumkan pembahasan persyaratan teknis struktur Bangunan Gedung Stasiun melingkupi Struktur atas dan Struktur bawah - Pembahasan terkait sterilisasi bangunan gedung stasiun 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> - Pembahasan jarak bebas penumpang dari tangga/lift ke tepi peron - Pembahasan terhadap detail drainase di stasiun kereta api - Pembahasan detail terhadap jarak tepi peron kepada as track maupun kepada sarana pada kondisi lengkungan 	
14	Revisi PM 32 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya penyesuaian komponen yang dirawat terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR - Dalam Lampiran Pedoman Perawatan jembatan dan terowongan terdapat poin terkait pemeriksaan sehingga perlu dirasa dipisahkan ke dalam PM 31; 3. Pedoman perawatan stasiun belum terakomodir meliputi perawatan gedung, instalasi pendukung dan peron - Perlu dilakukan pembahasan untuk memasukkan Indeks Kualitas Jalan Rel (Track Quality Index) yang telah disahkan oleh Pemerintah sebagai standar acuan perawatan 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
15	Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta A	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi perkeretaapian - Menyesuaikan dengan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
16	Revisi PM 156 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Perkeretaapian Miliki Negara	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya penambahan lingkup perawatan prasarana <p>Agar mengakomodir perawatan prasarana pada lintas non aktif mengingat dan mempertimbangkan besarnya aset perkeretaapian di lintas non aktif.</p>	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
17	Revisi PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Mengevaluasi perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi <p>Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi sistem persinyalan perkeretaapian</p>	- Direktorat Prasarana Perkeretaapian
18	Revisi PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi <p>Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi sistem telekomunikasi perkeretaapian</p>	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
19	Revisi PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian	<p>Perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi instalasi listrik perkeretaapian 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
20	Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Perkeretaapian	- Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi perkeretaapian Menyesuaikan dengan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
21	Revisi PM 19 Tahun 2023 perubahan atas PM 5 Tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan PPKA	Standar kompetensi masih menjadi satu, perlu dirincikan untuk standar kompetensi Pengatur Perjalanan Kereta Api (setempat, daerah & terpusat), Pengendali Perjalanan Kereta Api dan Asisten Pengatur Perjalanan Kereta Api	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
22	Revisi PM 86 tahun 2018 tentang sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian	Tahapan uji kompetensi belum diatur	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
23	Revisi PM 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian	Tahapan uji kompetensi belum diatur	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
24	Revisi PM 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM 19 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Kecakapan PJL	Tahapan uji kompetensi hanya ada uji teori dan uji praktek, perlu ditambahkan tes kesehatan dan uji wawancara	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
25	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik	Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
26	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Petugas Penanganan Kecelakaan	Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
27	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Petugas Pemeriksa Kecelakaan dan Petugas Analisis Kecelakaan	Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
28	Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang pengujian komponen, sistem serta peralatan	Merujuk pada PM. 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian	- Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
	pendukung prasarana dan sarana perkeretaapian		
29	Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Sektor Perkeretaapian belum memiliki pedoman terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
30	Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta Standar Penilaian Pengujian SDM Perkeretaapian	- Mengoptimalkan komposisi penilaian pengujian SDM Perkeretaapian, Membuat standar Penilaian praktek, teori, dan wawancara pengujian SDM Perkeretaapian Meminimalisir miskomunikasi dan kesalahan dengan operator yang berkaitan dengan hasil pengujian SDM Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
31	Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi	Masa berlaku <i>smart card</i> belum diatur	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
32	Revisi PM 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian	Standar kompetensi masih menjadi satu, perlu dirincikan untuk standar kompetensi untuk Tingkat Pelaksana dan Tingkat Pelaksana Lanjutan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
33	Revisi PM 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian	Standar kompetensi masih menjadi satu, perlu dirincikan untuk standar kompetensi untuk Tingkat Pelaksana dan Tingkat Pelaksana Lanjutan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
34	Revisi PM 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian	Standar kompetensi masih menjadi satu, perlu dirincikan untuk standar kompetensi untuk Tingkat Pelaksana dan Tingkat Pelaksana Lanjutan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
35	Revisi PM 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Standar kompetensi masih menjadi satu, perlu dirincikan untuk standar kompetensi untuk Tingkat Pelaksana dan Tingkat Pelaksana Lanjutan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
36	Penyusunan Regulasi Tentang Asisten Penguji	Belum adanya regulasi tentang asisten penguji	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

3.6 Kerangka Kelembagaan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029

Untuk menjaga organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat, efektif dan efisien, organisasi harus menyesuaikan diri dari perubahan lingkungan dan tuntutan publik. Selain itu Balai Pengujian Perkeretaapian Perkeretaapian perlu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat. Maka untuk itu organisasi memerlukan sumber daya manusia yang tepat secara kualitas dan kuantitas dengan dilakukan monitoring, evaluasi dan penataan organisasi dan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

3.6.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian

Kelembagaan Balai Pengujian Perkeretaapian telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian. Balai Pengujian Perkeretaapian dipimpin oleh Kepala Balai yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian. Balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana, dan sumber daya manusia perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengujian Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategis bisnis, dan rencana bisnis anggaran;
2. pelaksanaan pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian;
3. pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana per keretaapian;
4. pelaksanaan pengujian kecakapan dan keahlian sumber daya manusia bidang perkeretaapian;
5. pelaksanaan pengujian komponen, sistem serta peralatan pendukung prasarana dan sarana perkeretaapian lainnya;
6. pelaksanaan analisis isu aktual perkembangan perkeretaapian;
7. pelaksanaan pengelolaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pelaksanaan pengujian perkeretaapian;
8. pelaksanaan pemeriksaan intern;

9. pelaksanaan urusan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama; dan
10. pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, ketatausahaan, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, serta evaluasi dan pelaporan.

Struktur organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai berikut:

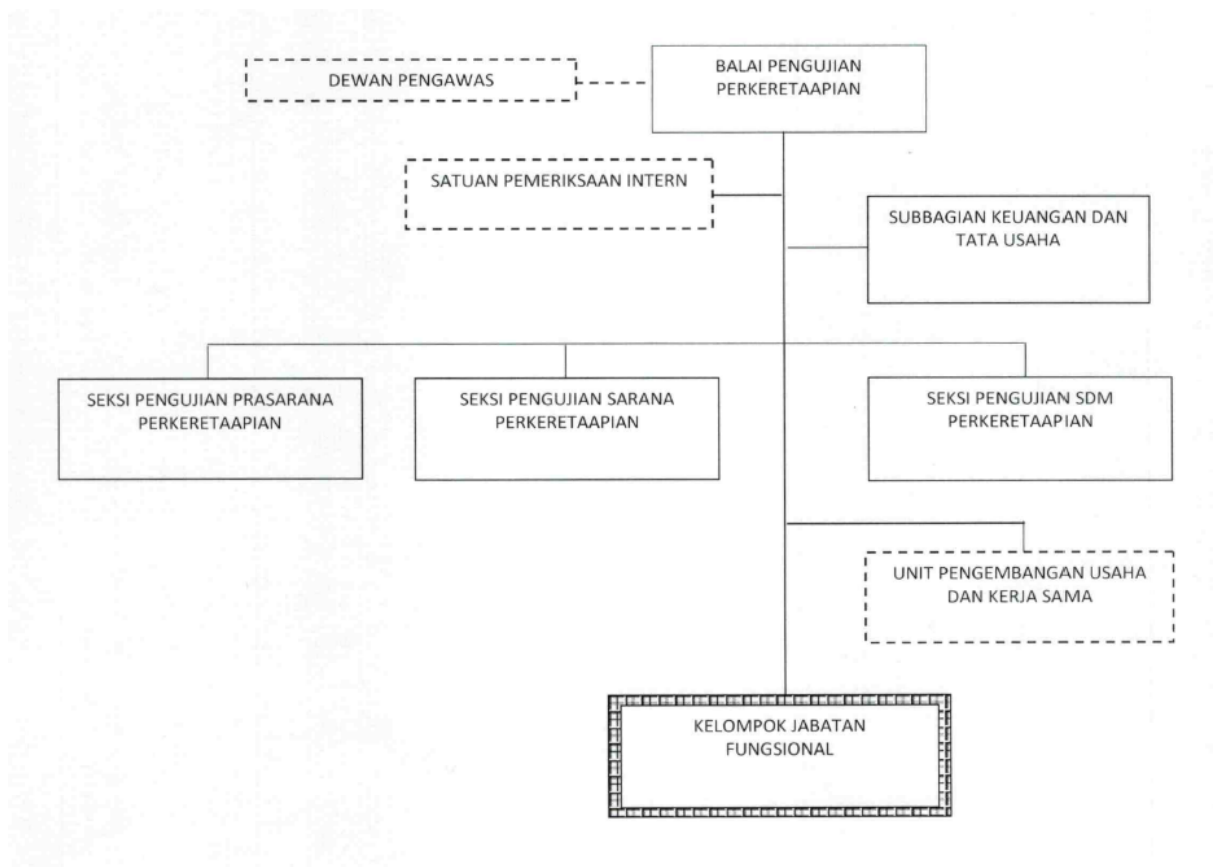
1. Subbagian Keuangan dan Tata Usaha
2. Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian;
3. Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian;
4. Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
5. Satuan Pemeriksaan Intern;
6. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama.

Penjabaran tugas masing-masing subbagian antara lain dapat dilihat pada penjelasan dibawah berikut ini:

- a. Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, rencana strategi bisnis, rencana bisnis anggaran, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi, hukum, ketatausahaan, hubungan masyarakat, data dan informasi, pengelolaan barang milik negara, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian perkeretaapian.
- b. Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian
melakukan pengujian pertama dan berkala prasarana perkeretaapian, pengujian komponen, sistem dan peralatan pendukung prasarana lainnya, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian prasarana perkeretaapian, serta analisis isu aktual perkembangan prasarana perkeretaapian.
- c. Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian
melakukan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian, pengujian komponen, sistem dan peralatan pendukung lainnya, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian sarana perkeretaapian, serta analisis isu aktual perkembangan sarana perkeretaapian.

- d. Seksi Pengujian Sumber Daya Manusia Perkeretaapian
melakukan pengujian kecakapan dan keahlian sumber daya manusia bidang perkeretaapian, pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang pengujian sumber daya manusia perkeretaapian.
- e. Satuan Pemeriksaan Intern
pemeriksaan intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Unit Pengembangan Usaha dan Kerja Sama
melakukan pengembangan usaha, pemasaran, dan kerja sama.

Gambaran mengenai struktur organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Gambar 3-3 | Struktur Organisasi Balai Pengujian Perkeretaapian

3.6.2 Penguatan Kelembagaan Balai Pengujian Perkeretaapian

Balai Pengujian Perkeretaapian sebagai unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengujian Sarana, Prasarana dan SDM di bidang perkeretaapian perlu didukung organisasi, proses bisnis dan sumber daya aparatur yang tepat dari segi kuantitas dan kualitas.

Arah kebijakan dari sisi kelembagaan berkaitan erat dengan perbaikan proses bisnis yang diarahkan untuk berbasis digital. Organisasi diharapkan adaptif terhadap perubahan kondisi eksternal, melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan dengan tetap menjaga efisiensi dan efektivitas struktur organisasi.

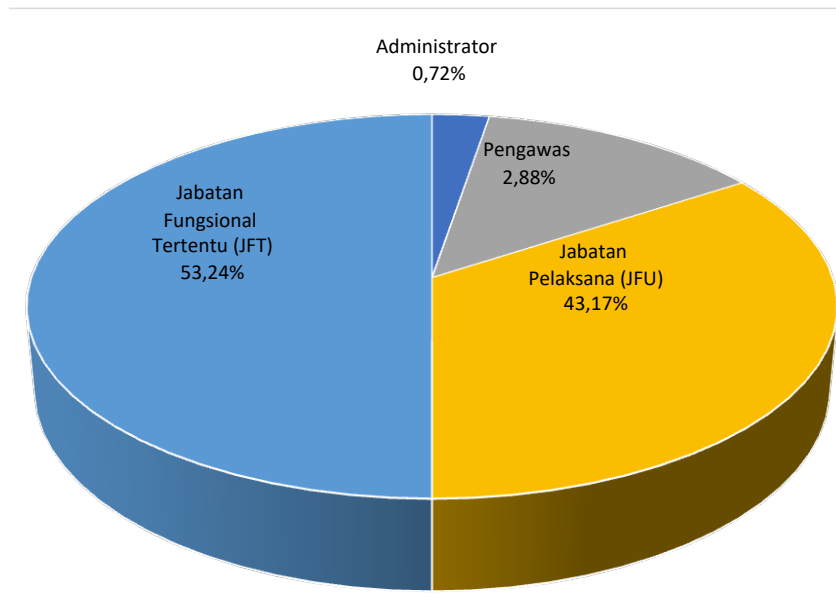
Dengan memperhatikan dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara, Peraturan Presiden No 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Perhubungan dan , Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kelola Balai Pengujian Perkeretaapian, berikut ini disampaikan penguatan kelembagaan Direktorat Jenderal Perkeretaapian yaitu sebagai berikut:

Penguatan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Perkeretaapian

Pada tahun 2025, jumlah pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian berjumlah 139 orang pegawai yang terdiri dari 105 orang pegawai PNS dan 34 orang pegawai PPPK. Pada **Tabel 3.6** disampaikan jumlah pegawai ASN sesuai jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu (JFT) dan jabatan pelaksana (JFU) tahun 2025.

Tabel 3-5 | Jumlah Pegawai PNS dan PPPK Balai Pengujian Perkeretaapian

No	Jenis Jabatan	CPNS	PNS	PPPK	Jumlah
1	Administrator (Eselon III)	1			1
2	Pengawas (Eselon IV)		4		4
3	Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)	5	54	15	74
4	Jabatan Pelaksana (JFU)	13	27	19	59
	Jumlah Seluruhnya	19	85	34	138



Gambar 3-4 | Komposisi Jabatan Pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian
Tahun 2025 – 2029

Pada **Gambar 3.5** terlihat komposisi jabatan pegawai Direktorat Jenderal Perkeretaapian lebih dominan jabatan fungsional tertentu 53% dibandingkan jabatan pelaksana yang hanya 43% dari jumlah pegawai PNS dan PPPK.

Dalam rangka memastikan tercapainya target penyelenggaraan perkeretaapian 2025-2029 dibutuhkan penguatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perkeretaapian melalui kebijakan peningkatan kemampuan sumber daya regulator perkeretaapian yang profesional, adaptif, mengerti perkembangan teknologi, memiliki kompetensi, berdaya saing serta mampu menjawab tantangan perkembangan teknologi perkeretaapian.

Arah kebijakan dan strategi penguatan dan pengelolaan sumber daya manusia perkeretaapian 2025-2029 dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Transformasi kelembagaan Unit Pelaksana Pengujian (UPP) khususnya pada lokasi yang sering dilakukan pengujian pada Daerah Operasi (DAOP) dan Divisi Regional (Divre);
2. Transformasi Balai Pengujian Perkeretaapian menjadi Balai Besar Pengujian dan Sertifikasi Perkeretaapian;
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia Balai Pengujian Perkeretaapian dalam penyelenggaraan perkeretaapian;
4. Peningkatan standar kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;

5. Modernisasi layanan sumber daya manusia melalui transformasi digital; dan
6. Pemenuhan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia perkeretaapian teknis.

Perkembangan teknologi transportasi perkeretaapian yang cepat membutuhkan SDM transportasi perkeretaapian yang profesional, adaptif, memiliki kompetensi, berdaya saing serta mampu menjawab tantangan perkembangan transportasi perkeretaapian. Sistem informasi Jabatan Fungsional Transportasi Perkeretaapian harus terintegrasi dalam Sistem Informasi Kepegawaian.

Berikut ini pada **Tabel 3-7** disampaikan kebutuhan pegawai Balai Pengujian Perkeretaapian

Tabel 3-6 | Kebutuhan Pegawai Balai Pengujian Tahun 2025-2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	Bezzeting ASN	111	138	138	138	139
2	Prediksi Pensiun	0	2	1	0	0
3	Penerimaan CPNS	8	1	0	0	0
4	Penerimaan Polbit Kemenhub	0	1	1	1	1
5	Penerimaan PKN Stan	0	0	0	0	0
6	Penerimaan PPPK	19	0	0	0	0
	Jumlah Seluruhnya	138	138	138	139	140

Secara keseluruhan, pemenuhan target kebutuhan SDM Balai Pengujian Perkeretaapian memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan perencanaan strategis, rekrutmen yang cermat, pengembangan berkelanjutan, dan manajemen kinerja yang efektif.

3.6.3 Hubungan Interaksi Balai Pengujian Perkeretaapian dengan Pemangku Kepentingan

Dalam kerangka penyelenggaraan perkeretaapian nasional, Balai Pengujian Perkeretaapian tidak bisa bekerja sendiri namun diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan transportasi perkeretapaian nasional. Beberapa pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain pemerintah daerah, badan usaha sarana perkeretaapian, badan usaha prasarana perkeretaapian.

1. Penguatan peran badan usaha penyelenggaraan perkeretaapian sebagai operator sarana dan prasarana perkeretaapian

Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2007 diarahkan menjadi diselenggarakan dengan skema multioperator. Saat ini penyelenggaraan perkeretaapian dengan multioperator sudah terjadi dengan terbentuk sejumlah badan usaha baru selain PT. KAI (Persero) sebagai badan usaha penyelenggaraan sarana perkeretaapian dan/atau badan usaha penyelenggaraan prasarana, seperti antara lain:

- a. PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI) adalah badan usaha yang merupakan anak perusahaan dari PT. KAI (Persero) yang bergerak di bidang pengoperasian kereta api komuter, kereta api bandara dan kereta api lokal.
- b. PT. Railink adalah badan usaha yang merupakan anak usaha dari PT. KAI (Persero) yang bergerak di bidang pengoperasian kereta api bandara.
- c. PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) adalah badan usaha yang merupakan perusahaan Indonesia yang bergerak di bidang penyelenggaraan jaringan kereta kecepatan tinggi di Indonesia.
- d. PT. MRT Jakarta merupakan badan usaha milik daerah DKI Jakarta yang mengoperasikan MRT Jakarta.
- e. PT. LRT Jakarta adalah badan usaha yang merupakan anak usaha dari PT Jakarta Propertindo (Perseroda), sebuah badan usaha milik daerah DKI Jakarta yang mengoperasikan LRT Jakarta.
- f. PT. KAI (Persero) Divisi LRT Jabodebek merupakan badan usaha yang mengoperasikan LRT Jabodetabek.
- g. PT. KAI (Persero) Divisi LRT Sumatera Selatan merupakan badan usaha yang mengoperasikan LRT Sumatera Selatan.
- h. Konsorsium Kereta Api Sulawesi Selatan adalah badan usaha yang merupakan konsorsium PT. KAI (Persero) dengan PT. Sulsel Citra Indonesia dalam mengoperasikan kereta api Makassar-Parepare.
- i. PT. Celebes Railway Indonesia (CRI) adalah badan usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan perawatan prasarana jalur kereta api Makassar-Parepare dengan skema KPBU.

2. Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perkeretaapian

Dalam aspek operasional, pelayanan dan keselamatan perkeretaapian, pemerintah daerah dapat mendorong untuk memastikan akses masyarakat terhadap layanan perkeretaapian yang aman, nyaman, selamat, terjangkau dan berdaya saing. Dalam rangka meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api dengan jalan, pemerintah daerah dapat berperan aktif sesuai amanat PM 94 Tahun 2018 yaitu mengelola, meningkatkan, dan mengamankan keselamatan di perlintasan sebidang sesuai kewenangannya, sebagai contoh evaluasi tahunan untuk perlintasan sebidang kereta api dengan jalan provinsi dan kabupaten/kota, berperan dalam pembangunan fasilitas seperti flyover/underpass untuk mengurangi jumlah perlintasan sebidang, menutup perlintasan liar dan mengelola perlintasan sebidang kereta api yang dikelola bersama pemerintah pusat dan operator kereta api termasuk melakukan audit dan menyediakan prasarana pendukung (rambu, marka, alat pemberi isyarat) dan petugas penjaga pintu perlintasan sebidang kereta api untuk memastikan keselamatan perkeretaapian.

3.7 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses terstruktur yang membantu organisasi memahami lingkungan internal dan eksternal yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan. Manajemen risiko di Balai Pengujian Perkeretaapian menjadi elemen strategis dalam memastikan seluruh kegiatan pengujian sarana, prasarana, serta SDM perkeretaapian berlangsung secara aman, andal, dan sesuai standar.

Dengan menerapkan pendekatan manajemen risiko yang terstruktur, Balai Pengujian Perkeretaapian mampu meminimalkan kegagalan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan bahwa setiap hasil pengujian dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pengembangan dan pengoperasian sistem perkeretaapian nasional.

Penerapan manajemen risiko di Balai Pengujian Perkeretaapian yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mencapai target kinerja organisasi secara efektif dan efisien.

Pada **tabel 3-8** disampaikan rencana tindaklanjut penyelesaian (RTP) dari hasil identifikasi risiko-risiko utama terhadap pencapaian masing-masing sasaran kegiatan di Balai Pengujian Perkeretaapian serta tabel B dan tabel C disampaikan matriks penjelasan mengenai hal-hal yang dapat mengancam dan melemahkan unit pemilik risiko baik ancaman internal maupun ancaman eksternal.



Tabel 3-7 | Identifikasi dan Mitigasi Risiko Utama Sasaran Kegiatan dan Rencana Tindakanjnt Pengendalian

No	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggungjawab Risiko
SK1. Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian			
1	Ketidaksesuaian informasi data dalam penyampaian hasil pengujian sarana	melakukan review berjenjang (Tim>ketua tim>kepala seksi>Kepala Balai)	Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian
2	Pelaksanaan pengujian tidak optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konfirmasi kesiapan alat 2. Peminjaman alat pengujian milik operator 3. Membagi tim sesuai dengan titik lokasi pengujian 4. Pendampingan oleh operator ke titik lokasi pengujian 	Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian
3	Alat pengujian dan check sheet belum siap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi alat pengujian yang perlu dikalibrasi 2. Penjadwalan kalibrasi alat pengujian 3. Penambahan pengadaan alat pengujian 	Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian
SK2. Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian			
4	Terjadi gangguan pada simulator pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Perawatan / perbaikan Simulator dan alat secara parsial 2. Pembuatan panduan terkait penggunaan simulator 3. Melakukan pengecekan dan perawatan penangkal petir secara berkala dan mematikan peralatan setelah selesai digunakan 	Seksi Pengujian SDM Perkeretaapian



No	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggungjawab Risiko
		<ul style="list-style-type: none"> 4. Menjaga kebersihan lingkungan simulator 5. Menggunakan cadangan sumber listrik seperti UPS dan Genset 	
5	Persiapan alat pengujian terhambat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeliharaan terhadap peralatan pengujian secara berkala 2. Peningkatan sistem uji teori 3. Menyimpan peralatan pengujian pada tempat yang memadai 	Seksi Pengujian SDM Perkeretaapian
6	TUK (Tempat Uji Kompetensi) praktek di daerah kurang mendukung untuk pengujian SDM	Melakukan evaluasi terhadap fasilitas di daerah yang tersedia dan mumpuni untuk dijadikan sebagai TUK (Tempat Uji Kompetensi)	Seksi Pengujian SDM Perkeretaapian
7	Penumpukan arsip hasil pengujian	<ul style="list-style-type: none"> 1. Menambah kapasitas penyimpanan arsip hasil pengujian (gudang atau tempat penyimpanan sementara) 2. Melakukan digitalisasi pengujian SDM Perkeretaapian 3. Melakukan mobilisasi arsip inaktif ke Pusat Arsip Kemenhub 	Seksi Pengujian SDM Perkeretaapian
8	Persiapan MUK terhambat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perbaikan sistem pengarsipan MUK (Materi Uji Kompetensi) 2. Membuat arsip digital terhadap Soal Uji Teori, Soal Wawancara dan Lembar Observasi (MUK) 3. Menambah lemari penyimpanan untuk Soal Teori yang tersedia 	Seksi Pengujian SDM Perkeretaapian



No	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggungjawab Risiko
SK3. Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian			
9	Perubahan jadwal pelaksanaan pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan revisi anggaran menggunakan sumber dana BLU 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait perubahan jadwal pengujian 	Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian
10	Pelaksanaan pengujian yang kurang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pelaksanaan alat pengujian 2. Melakukan pengecekan kondisi alat 3. Penyusunan intruksi kerja terkait tata cara penggunaan alat pengujian 	Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian
11	Terdapat perbedaan data hasil pengujian	Pemeriksaan dan pembahasan berita acara beserta lampiran hasil pengujian	Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian
12	Terjadi kecelakaan kerja pada saat pelaksanaan pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan safety briefing sebelum pelaksanaan pengujian 2. Membawa perlengkapan APD/payung/jas hujan sebelum pelaksanaan pengujian 	Seksi Pengujian Prasarana Perkeretaapian
SK4. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Balai Pengujian Perkeretaapian			
13	Sarana tidak ada di lokasi saat pengujian berlangsung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkordinasi dengan operator 2. Penundaan pengujian sarana dalam rentang waktu penugasan 	Seksi Pengujian Sarana Perkeretaapian



No	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggungjawab Risiko
		3. Penjadwalan ulang pengujian sarana dalam penugasan berikutnya	
14	Keterlambatan verifikasi pembayaran pengujian	1. Menghubungi atau konfirmasi perihal pembayaran kepada pihak Pemohon 2. Melakukan manual cek pada rekening melalui bendahara penerimaan atau pegawai yang ditugaskan	Seluruh Seksi Pengujian Perkeretaapian
15	Keterlambatan dalam memberikan informasi publik yang diberikan pemohon informasi	1. Menyusun Tim PPID melalui SK Kepala Balai 2. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik setiap tahunnya	Seluruh Seksi Pengujian Perkeretaapian, Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
SK5. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian			
16	Rekomendasi kelas jabatan tidak diterima atau tidak diproses sesuai prosedur	menyusun anjab, evjab dan abk untuk keperluan dokumen remunerasi dan berkoordinasi dengan Biro SDMO dan Biro Keuangan	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
17	Ketidakpatuhan pelaksanaan kinerja dengan SKP	Optimalisasi penerapan coaching, mentoring dan counseling oleh pimpinan	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha
18	Pelaksanaan penggunaan anggaran tidak optimal	1. Menyusun SK tim pengelola anggaran 2. Catatan blokir di lembar ke IV DIPA 3. Mengajukan revisi anggaran	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha



No	Identifikasi Risiko	Uraian Mitigasi Risiko	Penanggungjawab Risiko
19	Terlambat menyampaikan usulan target pada pagu indikatif PNB	Dilakukan rapat koordinasi internal pembahasan rencana target	Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha



Tabel 3-8 | Hal-hal yang dapat Mengancam dan Melemahkan Unit Pemilik Risiko (Ancaman Internal)

Ancaman	Kekuatan	Kelemahan
Man	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan jabatan fungsional tertentu di bidang pengujian perkeretaapian 2. Tersedianya tenaga penguji yang telah tersertifikasi 3. Tersedianya tenaga penguji dan asisten penguji dalam jumlah yang memadai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pelatihan atau diklat teknis 2. Belum terpenuhinya kebutuhan pelatihan teknis Asesor SDM Perkeretaapian sesuai peraturan yang berlaku 3. Kurangnya pengetahuan secara menyeluruh terkait pengujian prasarana perkeretaapian sesuai dengan jabatan fungsional tertentu penguji prasarana perkeretaapian 4. Kurangnya penguatan kompetensi sesuai dengan perkembangan teknologi dan standar industri yang semakin dinamis
Money	Sudah menjadi Balai dengan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dimana pengelolaan keuangan dapat lebih fleksibel, efisien, dan profesional	Sebagian anggaran masih bergantung dengan sumber pembiayaan APBN
Method	Sudah memiliki SOP Pengujian Prasarana Perkeretaapian dan sudah memiliki sertifikat ISO 9001 yang berlaku sampai 13 Agustus 2026	1. Beberapa kegiatan pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan SOP



Ancaman	Kekuatan	Kelemahan
		2. Belum memiliki sertifikat standar ISO terkait laboratorium pengujian
Machine	Tersedianya peralatan pengujian untuk menunjang tugas dan fungsi kegiatan pengujian	1. Pengadaan, perawatan dan kalibrasi alat pengujian belum maksimal akibat dari efisiensi anggaran 2. Belum memiliki peralatan uji komponen sarana perkeretaapian
Material	1. Pelaksanaan pengujian telah menerapkan teknologi informasi dengan berbasis <i>Computer Based Exam</i> (CBE) 2. Sistem pembayaran sudah menggunakan aplikasi sehingga meminimalisir adanya kesalahan pembayaran	1. Belum seluruh jenis kompetensi SDM Perkeretaapian melakukan ujian teori melalui Sistem CBE 2. Alur pengujian prasarana perkeretaapian belum terintegrasi secara digital

Tabel 3-9 | Hal-hal yang Dapat Mengancam dan Melemahkan Unit Pemilik Risiko (Ancaman Eksternal)

Ancaman	Kekuatan	Kelemahan
Politik	Potensi perubahan regulasi atau kebijakan terkait pengujian perkeretaapian yang mendukung	1. Potensi perubahan regulasi atau kebijakan yang menghambat pengujian perkeretaapian



		<ul style="list-style-type: none"> 2. Perubahan metode perawatan operator yang menyebabkan perubahan pola pengujian 3. Adanya potensi intervensi terkait pengujian prasarana perkeretaapian
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pertambahan sarana perkeretaapian baru secara langsung berkontribusi pada peningkatan pendapatan Balai Pengujian Perkeretaapian 2. Meningkatnya pembangunan prasarana perkeretaapian secara langsung meningkatkan pendapatan BLU Balai Pengujian Perkeretaapian 3. Mampu melayani SDM seluruh Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan ekonomi makro yang menyebabkan turunya kemampuan daya beli operator terhadap tarif pengujian 2. Sarana yang di konservasi oleh pihak operator berimbas pada ancaman berkurangnya pendapatan balai pengujian perkeretaapian 3. Adanya efisiensi anggaran pada stakeholder dapat mempengaruhi proses pengujian 4. Adanya pemberlakuan tarif 0 rupiah untuk pengujian SDM Perkeretaapian pada Jabatan PJJL Dinas Perhubungan 5. Tarif yang ada belum sepenuhnya sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan pada saat pengujian SDM Perkeretaapian



Sosial-Budaya	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi perkeretaapian telah mendorong peningkatan signifikan dalam kebutuhan layanan pengujian sarana guna mendukung mutu dan keselamatan operasional.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adaptasi operator/pemohon terhadap mekanisme pengujian berbasis teknologi masih berlangsung 2. Adanya persepsi negatif publik terhadap insiden kecelakaan kereta api yang dapat menyebabkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengujian 3. Proses pelayanan pengujian yang kurang optimal dapat mempengaruhi kredibilitas Balai Pengujian Perkeretaapian 4. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam keselamatan perkeretaapian
Lingkungan	Kondisi lingkungan yang kondusif dapat mempengaruhi kelancaran pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat vandalisme di beberapa lokasi sehingga menghambat proses pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian 2. Kondisi lingkungan yang tidak terawat 3. Adanya kemungkinan muncul kompetitor di bidang pengujian SDM Perkeretaapian



Alam	Kondisi cuaca yang mendukung dapat mengoptimalkan pelaksanaan pengujian di lapangan	Cuaca ekstrem dan bencana alam menjadi potensi hambatan pengujian lapangan di beberapa wilayah
Informasi dan Teknologi	Pengadaan sistem informasi dapat mendukung dan meningkatkan efektifitas tugas serta fungsi Balai Pengujian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman keamanan data digital, serangan siber, serta problem interoperabilitas di masa transisi sistem IT nasional 2. Belum ada sistem yang mengakomodir terintegrasinya data Pengujian Perkeretaapian



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN





BAB 4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah alat ukur yang mengidentifikasi keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program di Balai Pengujian Perkeretaapian. Target indikator kinerja kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029 disampaikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4-1 | Target Kinerja Renstra
Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029 (Persentase)

SK	Sasaran Kegiatan	IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target (Persentase)						
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Balai Pengujian Perkeretaapian	IKK.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	91,50	96,50	96,75	97,00	97,25	97,50
SK.2	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.2	Persentase pemenuhan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian	%	109,52	19,760	39,584	59,575	79,714	100
SK.3	Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.3	Persentase pemenuhan pengujian kompetensi SDM perkeretaapian	%	65,66	19,542	34,448	53,529	79,663	100
SK.4	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.4	Persentase pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian	%	98,82	18,284	39,067	58,986	79,107	100

SK	Sasaran Kegiatan	IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target (Persentase)						
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK.5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	IKK.5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	80,55
		IKK.6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	N/A	16	16	16	17	17
		IKK.7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	87,04	81	81,50	82,00	82,50	83,00
		IKK.8	Persentase Realisasi Pendapatan Balai Pengujian Perkeretaapian	%	101,66	100	100	100	100	100
		IKK.9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	N/A	76,50	76,60	76,70	76,80	76,90

Tabel 4-2 | Target Kinerja Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029 (Angka)

SK	Sasaran Kegiatan	IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target (Angka)						
				Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029
SK.1	Meningkatnya kinerja pelayanan publik Balai Pengujian Perkeretaapian	IKK.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	3,66	3,86	3,87	3,88	3,89	3,9
SK.2	Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.2	Persentase pemenuhan pengujian kelaikan sarana perkeretaapian	Unit	47.094	13.268	26.579	40.002	53.525	67.146
SK.3	Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.3	Persentase pemenuhan pengujian kompetensi SDM perkeretaapian	Orang	39.134	8.528	15.033	23.360	34.765	43.640
SK.4	Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian	IKK.4	Persentase pemenuhan pengujian kelaikan prasarana perkeretaapian	Unit	1.137	285	585	885	1.187	1.504
				Km	4.605,58	360	720	1.085	1.455	1.835

SK	Sasaran Kegiatan	IKK	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Baseline 2024	Target (Angka)				
						2025	2026	2027	2028	2029
SK.5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian	IKK.5	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	80,30	80,35	80,40	80,45	80,50	80,55
		IKK.6	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	N/A	16	16	16	17	17
		IKK.7	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	87,04	81	81,50	82,00	82,50	83,00
		IKK.8	Persentase Realisasi Pendapatan Balai Pengujian Perkeretaapian	%	101,66	100	100	100	100	100
		IKK.9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	Nilai	N/A	76,50	76,60	76,70	76,80	76,90

Perhitungan *baseline* 2024 dan target Indikator Kinerja (IKK) tahun 2025 – 2029 dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

1. SK.1 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Balai Pengujian Perkeretaapian
Untuk mencapai sasaran meningkatnya kinerja pelayanan publik Balai Pengujian Perkeretaapian, *baseline* Indikator Kinerja Kegiatan (IKK1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2024 sebesar 3,66 yang didapat dari hasil *survey* elektronik pada aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat kepada *stakeholder* pengguna layanan pengujian.

HASIL AGREGAT SURVEI JANUARI S.D DESEMBER 2024



Gambar 4-1 | Realisasi IKM pada Aplikasi SKM

Pada tahun 2025-2029 terkait Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian ditargetkan mengalami kenaikan sesuai perkembangan kenaikan IKM tahun sebelumnya dan didukung adanya peningkatan pelayanan pengujian perkeretaapian.

2. SK.2 Meningkatnya Keandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran meningkatnya keandalan sarana perkeretaapian mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian, *baseline* Indikator Kinerja Kegiatan (IKK2) Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian tahun 2024 sebesar 109,52% yang didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi s. d Desember 2024} = \left[\frac{2630+7391+11740+12524+12808}{43000} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2025-2029 terkait Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian rencana nya akan mengalami kenaikan pertahunnya dihitung dari rencana pengujian berkala yang dilakukan setiap tahun akan tetapi tetap memperhitungkan sarana yang dalam status konservasi berkaitan dengan usia sehingga tidak dilakukan pengujian.

3. SK.3 Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kompetensi SDM perkeretaapian mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian, *baseline* Indikator Kinerja Kegiatan (IKK3) Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian tahun 2024 sebesar 65,66% yang didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi s. d Desember 2024} = \left[\frac{3334+6135+4062+11127+14476}{55000} \right] \times 100\%$$

Pada tahun 2025-2029 terkait Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun dikarenakan untuk pengujian SDM perkeretaapian memiliki perbedaan masa perpanjangan 4 tahun dan 5 tahun.

4. SK.4 Meningkatnya Kehandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kehandalan prasarana perkeretaapian mendukung keselamatan transportasi perkeretaapian, *baseline* Indikator Kinerja Kegiatan (IKK4) Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian tahun 2024 sebesar 101,06% yang didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Realisasi s. d Desember 2024} = \frac{\left(\frac{347+94+188+285+223}{990} \right) + \left(\frac{2936,15+272,4+444,61+468,073+484,348}{5277} \right)}{2} \times 100\%$$

Pada tahun 2025-2029 terkait Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian didasarkan rencana pengujian berkala dan pelaksanaan tindak lanjut pengujian yang belum sesuai.

5. SK. 5 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian

Untuk mencapai sasaran kegiatan meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan Balai Pengujian Perkeretaapian menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan 5 sampai dengan 9, yang dapat dilihat sebagai berikut. *Baseline* tahun 2024 mencakup pemenuhan kinerja sebagai berikut :

Nilai AKIP : 80,30

Nilai Tingkat Manajemen Risiko : N/A (penilaian tahun 2024 berbeda dengan tahun 2025)

Nilai NKA : 87,04

Realisasi PNB : 101,06%

Nilai Pengawasan Kearsipan : N/A.

4.2 Indikasi Kegiatan Strategis

4.2.1 Indikasi Program, Kegiatan dan Proyek Prioritas Bidang Transportasi Perkeretaapian dalam RPJMN 2025 - 2029

Sesuai arahan dalam Misi Kementerian Perhubungan 2025-2029 (Sub Bab 2.2.3) yang secara konsisten berpasangan satu-satu dengan Misi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 atau yang dikenal sebagai Astacita, maka Kementerian Perhubungan berkomitmen mendukung semua Astacita dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode 2025-2029.

Dalam RPJMN 2025-2029 (Perpres No 12 Tahun 2025), Astacita Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029 diterjemahkan menjadi Prioritas Nasional (PN) seperti yang dijelaskan pada Gambar 2.3. Meskipun dalam RPJMN 2025-2029 dukungan Kementerian Perhubungan hanya pada PN3 dan PN5 yang terdapat sasaran yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan untuk menjadi koordinator dan/atau pengampu (lihat Tabel 4.3), namun pada PN/Astacita lainnya terdapat beberapa Program Prioritas/Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas yang ditugaskan kepada Kementerian Perhubungan yang berkesesuaian dengan lingkup tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Program prioritas nasional Kementerian Perhubungan terdiri dari: (1) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan di bidang transportasi serta (2) Program Infrastruktur Konektivitas yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian, integrasi dan transportasi Jabodetabek serta kebijakan transportasi.

No	Program Kegiatan	Program Prioritas Nasional
A Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
1	Pendidikan Transportasi (Pengampu/Pelaksana: Badan Pengembangan SDM Perhubungan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana Penunjang Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara (PN) 2. Prasarana Penunjang Diklat Transportasi Darat, Laut, Udara (PN) 3. Diklat Pembentukan Non Reguler (mandiri) dan Reguler (Pola Pembibitan) Transportasi Darat, Laut, Udara (PN) 4. Diklat Teknis Transportasi Udara dan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Transportasi Darat, Laut, Udara (PN)
B Program Infrastruktur Konektivitas		
1	Transportasi Darat (Pengampu/Pelaksana: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan angkutan jalan perintis, angkutan pemadu moda/antarmoda, angkutan barang, angkutan umum massal perkotaan, angkutan penyeberangan perintis, angkutan umum massal perkotaan berbasis jalan (PN) 2. Subsidi angkutan umum perkotaan (PN) 3. Fasilitas pendukung dan integrasi moda (PN) 4. Terminal barang internasional. Pelabuhan penyeberangan, Pelabuhan sungai (PN) 5. Pembangunan terminal penumpang tipe A, terminal barang internasional, pelabuhan penyeberangan (PN) 6. Pembangunan system angkutan umum massal (PN) 7. Pekan Nasional Keselamatan Jalan, SALUD (PN) 8. Pembayaran AP KPBU, pendampingan KPBU (PN) 9. Perlengkapan jalan, SBNP/rambu suar (PN)
2	Perkeretaapian (Pengampu/Pelaksana: Direktorat Jenderal Perkeretaapian)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan layanan KA perintis, perintis LRT 2. Pembangunan jalur KA, jalur ganda KA, jalur elevated, sistem persinyalan dan telekomunikasi, fasilitas stabling stasiun KA 3. Peningkatan jalur KA, stasiun KA, underpass, elektrifikasi, telekomunikasi, fasilitas operasi KA, 4. Penggantian/peningkatan jembatan KA, 5. Revitalisasi/pembangunan terowongan KA 6. IMO 7. Penanganan perlintasan sebidang, amblesan/longsor, rintang jalan 8. Studi penyiapan pembangunan jalur KA 9. Jabodetabek railway capacity enhancement, Jakarta MRT, SRRL 10. Pembayaran AP KPBU

No	Program Kegiatan	Program Prioritas Nasional
3	Transportasi Laut (Pengampu/Pelaksana: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan angkutan laut perintis (PN) 2. Layanan angkutan tol laut, angkutan ternak, angkutan rede, angkutan lebaran natal dan tahun baru (PN) 3. Pembangunan kapal patrol, kapal kenavigasian 4. Pembangunan Pelabuhan 5. Pembangunan/Pengembangan/peningkatan/replacement/rehabilitasi fasilitas Pelabuhan 6. Pendampingan KPBU 7. Patimban Port Development Project 8. Perlengkapan jalan, SBNP/rambu suar (PN)
4	Transportasi Udara (Pengampu/Pelaksana: Direktorat Jenderal Perhubungan Udara)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan Udara Perintis Penumpang dan Kargo 2. Angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan perintis penumpang dan kargo 3. Layanan operasi angkutan udara kargo (MP) 4. Angkutan udara perintis kargo (MP) 5. Angkutan BBM pesawat udara untuk angkutan perintis kargo (MP) 6. Pengembangan bandara 7. Bandara perairan 8. Pembangunan bandara baru, bandara VVIP 9. Pendampingan KPBU
5	Integrasi dan Transportasi Jabodetabek (Pengampu/Pelaksana: Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan/perencanaan/ penyusunan NSPK prasarana integrasi, integrasi system informasi, integrasi layanan transportasi antarmoda 2. Pembangunan/perencanaan/ penyusunan NSPK prasarana integrasi, integrasi system informasi, integrasi layanan transportasi multimoda
6	Kebijakan Transportasi (Pengampu/Pelaksana: Badan Kebijakan Transportasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem transportasi IKN 2. Transportasi di KSPN, 3 TP 3. Efisiensi dan konektivitas logistik 4. Angkutan umum massal dan transportasi perkotaan

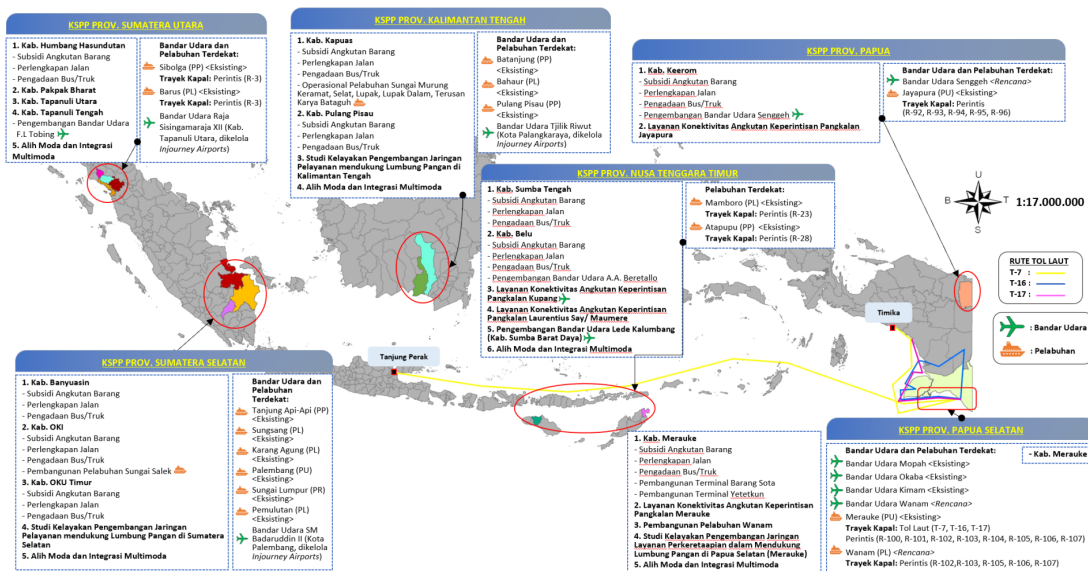
4.2.2 Indikasi Program dan Kegiatan Prioritas Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025 - 2029

Secara umum bidang transportasi selain melaksanakan penugasannya pada PN3 dan PN5 sebagai koordinator pelaksanaan indikator Program Prioritas (PP), pengampu indikator Kegiatan Prioritas (KP), dan pelaksana sejumlah Proyek Prioritas (Pro P), juga diharapkan mendukung pelaksanaan sejumlah agenda strategis nasional dalam Prioritas Nasional (PN) lainnya (PN 1 sd PN 8).

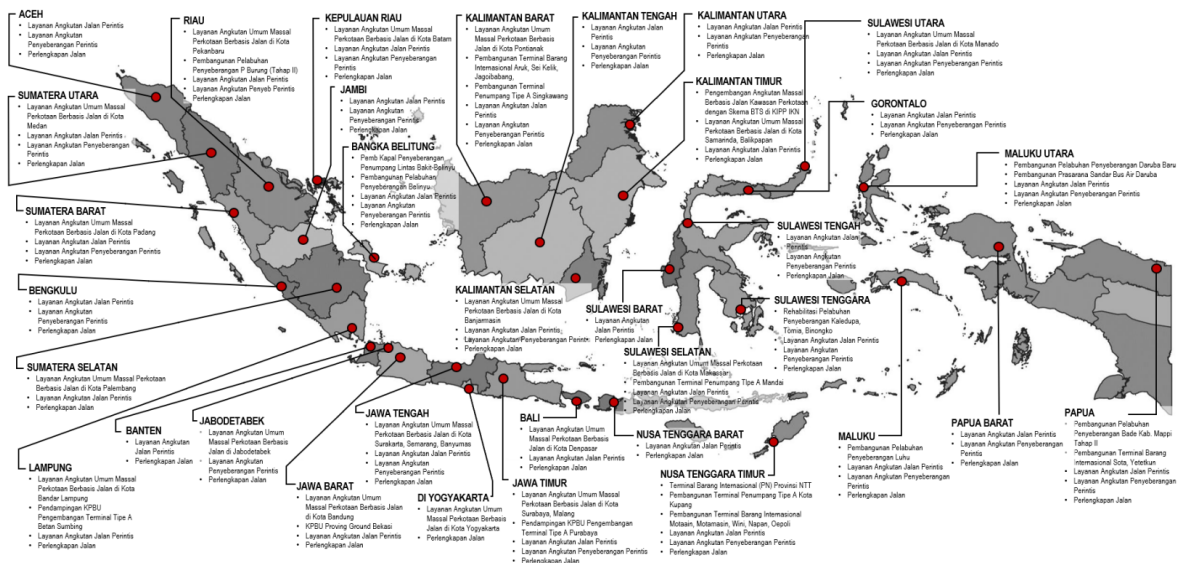
Indikasi dukungan Kementerian Perhubungan terhadap berbagai prioritas RPJMN 2025-2029 tersebut ditunjukkan melalui berbagai skema dukungan simpul ataupun jaringan transportasi yang mengakses secara umum dan/atau khusus

dikembangkan untuk mendukung kawasan prioritas dalam RPJMN 2025-2029, diantaranya KSPP (Kawasan Sentra Produksi Pertanian), KI (Kawasan Industri), KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), KPBPB (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas), DPP (Destinasi Pariwisata Prioritas), Hilirisasi SDA, kawasan transmigrasi, daerah tertinggal, maupun perkotaan prioritas.

Secara ilustratif, indikasi kegiatan strategis Kementerian Perhubungan 2025-2029 yang mendukung pelaksanaan sejumlah agenda pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) RPJMN 2025-2029 disampaikan pada beberapa gambar berikut ini. Adapun detail lokasi, jenis kegiatan, serta alokasi pendanaannya disampaikan pada Anak Lampiran 2.



Gambar 4-2 | Peta Dukungan Kementerian Perhubungan terhadap Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)



Sumber: dipetakan dari Lampiran 3 RPJMN 2025-2029

Gambar 4-3 | Peta Indikasi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Pendukung Penguatan Konektivitas Darat dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan



Sumber: dipetakan dari Lampiran 3 RPJMN 2025-2029

Gambar 4-4 | Peta Indikasi Pembangunan/Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kereta Api Penumpang Antar Kota dan Penguatan Kereta Api Barang

4.2.3 Program dan Kegiatan Direktif Presiden Bidang Transportasi Perkeretaapian

Dalam hal ini terdapat beberapa potensi program dan kegiatan direktif Presiden yang harus diakomodir, diantaranya sebagai konsekuensi dari:

1. Adanya perubahan/penetapan Peraturan Perundang-Undangan terkait bidang transportasi, misalnya: ditetapkannya UU Sistranas, perubahan UU Pelayaran/ Penerbangan/LLAJ/Perkeretaapian, PP Penjagaan Laut dan Pantai, Perpres tentang Badan tertentu di bidang transportasi, dan lain-lain). Perubahan tersebut dapat berdampak pada lingkup program dan kegiatan yang dilaksanakan Kementerian Perhubungan.
2. Adanya perubahan kebijakan nasional terkait perencanaan pembangunan, misalnya: perubahan/penetapan PP tentang RTRWN, PP tentang KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), Perpres tentang Proyek Strategis Nasional (PSN), dan lain-lain, yang di dalamnya menugaskan kepada Kementerian Perhubungan untuk mengkoordinir dan/atau mendukung pelaksanaan dari kebijakan perencanaan tersebut.
3. Adanya perubahan kebijakan nasional terkait penganggaran (misalnya: UU APBN, PP PNBP Kementerian Perhubungan, Perpres Penugasan Proyek Strategis, dlsb) yang berdampak terhadap perubahan target kinerja ataupun program dan kegiatan di lingkungan Kementerian Perhubungan.
4. Adanya Instruksi Presiden tentang penanggulangan bencana ataupun kondisi darurat lainnya, yang menugaskan Kementerian Perhubungan untuk memberikan fokus program dan kegiatan pada kawasan/lokasi tertentu yang perlu penanganan kedaruratan.
5. Adanya Instruksi Presiden mengenai program pembangunan tertentu, misalnya: Inpres Pelayaran Rakyat, Inpres Transportasi Publik, dlsb, yang mengharuskan adanya perubahan dalam struktur ataupun prioritas program dan kegiatan Kementerian Perhubungan.
6. Adanya arahan Presiden dalam Rapat Kabinet/Kunjungan Kerja/Acara lainnya yang menugaskan kepada jajaran Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan atau mendukung program dan kegiatan tertentu sebagai respon atas perkembangan tertentu pada sektor terkait dan kondisi lapangan.
7. Adanya usulan dari pemangku kepentingan (misalnya: DPR/DPD, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat) yang setelah berkonsultasi dengan Presiden mendapatkan arahan untuk melaksanakan program dan kegiatan tertentu sebagai respon atas usulan publik.
8. Adanya usulan dari jajaran Kementerian Perhubungan yang disampaikan pada Rapat Kabinet/Kunjungan Kerja/Acara lainnya yang telah dikonsultasikan dan mendapatkan arahan dari Presiden untuk menjalankan program dan kegiatan tertentu dalam bidang transportasi.

Program dan kegiatan direktif Presiden di atas, baik yang disampaikan langsung maupun ditetapkan melalui Peraturan, akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian sesuai ketentuan proses perencanaan dan penganggaran yang berlaku. Sekretariat Jenderal mengkoordinir penyiapan justifikasi teknis serta dokumen pendukung pelaksanaan program dan kegiatan direktif presiden.

Dalam hal terdapat hambatan dalam penyiapan readiness criteria dari program dan kegiatan direktif presiden tersebut, Sekretaris Jenderal melaporkannya kepada Menteri untuk mendapatkan arahan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan direktif presiden, terdapat konsekuensi anggaran yang mengharuskan dilakukannya prioritas ulang atas program dan kegiatan yang telah tertuang dalam Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029, maka selanjutnya perubahan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam evaluasi dan pengendalian serta usulan perubahan terhadap Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2025-2029.

4.3 Kerangka Pendanaan

4.3.1 Kerangka Pendanaan Secara Umum Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 - 2029

Analisis kerangka anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian dilakukan dengan pendekatan komprehensif untuk memastikan keselarasan antara rumusan indikator kinerja kegiatan (IKK) tahun 2025-2029 dengan kerangka pendanaan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Melalui tabel yang disusun, terlihat bagaimana tiap komponen program dan kegiatan diklasifikasikan berdasarkan kode program, kegiatan, hingga sub komponen yang diikuti dengan rincian pagu anggaran tahunan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menilai efektivitas pendanaan tetapi juga untuk mengevaluasi apakah anggaran yang disediakan mampu mendukung pencapaian target IKK. Keselarasan ini penting agar setiap upaya yang dilakukan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan, efisiensi, dan akuntabilitas di bidang pengujian dan keselamatan perkeretaapian.

Kerangka pendanaan Balai Pengujian Perkeretaapian untuk periode 2025-2029 dirancang untuk mendukung peningkatan keselamatan, keamanan, dan kualitas transportasi perkeretaapian. Fokus utama pendanaan mencakup pengujian dan sertifikasi kelaikan sarana serta prasarana perkeretaapian, pengadaan peralatan uji, pengujian kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta pembangunan fasilitas pendukung. Alokasi anggaran yang signifikan diarahkan pada kegiatan-kegiatan strategis, seperti pengujian sarana perkeretaapian dengan total pagu mencapai Rp40,6 milyar dan pengujian prasarana perkeretaapian sebesar Rp43,7 milyar. Selain itu, pengadaan peralatan pengujian sarana dan prasarana juga mendapat perhatian dengan total masing-masing Rp18,5 milyar dan Rp25,1 milyar.

Program ini juga mencakup pengembangan SDM perkeretaapian melalui pengujian kompetensi, yang mengalokasikan anggaran sekitar Rp41,3 milyar untuk kegiatan reguler dan Rp42,6 milyar untuk layanan BLU. Selain aspek teknis, kerangka ini juga memprioritaskan manajemen risiko, dukungan operasional, dan peningkatan pelayanan publik. Dukungan untuk manajemen internal, termasuk pembayaran gaji dan tunjangan, mencapai lebih dari Rp192 milyar. Dengan kerangka ini, Balai Pengujian Perkeretaapian bertujuan mencapai standar tinggi dalam keselamatan transportasi, layanan publik, dan efisiensi operasional selama lima tahun mendatang.

4.3.2 Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 - 2029

Indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran program Balai Pengujian Perkeretaapian terangkum dalam Tabel 4.6. Total indikasi pendanaan selama 5 tahun mencapai Rp. 519,737 milyar dengan komposisi indikasi pendanaan untuk Program Infrastruktur Konektivitas sebesar Rp. 173,099 milyar atau 33.3% dari total indikasi pendanaan. Sisanya sebesar Rp. 346,637 milyar atau 66.7% digunakan untuk kegiatan Program Dukungan Manajemen.

Indikasi pendanaan program infrastruktur konektivitas transportasi perkeretaapian didominasi untuk kegiatan pelayanan transportasi perkeretaapian mencapai 2.73% dan kegiatan keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian mencapai 97.27%. Artinya Balai Pengujian Perkeretaapian selama

5 tahun ke depan difokuskan pada peningkatan keselamatan dan kemanan transportasi perkeretaapian.

Optimalisasi operasional transportasi perkeretaapian eksisting melalui peningkatan layanan transportasi perkeretaapian yang sudah ada. Kereta api saat ini menjadi moda transportasi massal yang bermanfaat dan digunakan oleh seluruh golongan masyarakat dengan jumlah penumpang mencapai rata-rata 500 juta penumpang per tahun (didominasi oleh penumpang kereta api KRL Jabodetabek 328 juta penumpang per tahun). Peningkatan pelayanan kereta api tentunya memberikan nilai tambah bagi Masyarakat sebagai pengguna kereta api terutama dalam mengurangi biaya transportasi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Optimalisasi dan peningkatan pelayanan angkutan barang dengan kereta api juga menjadi fokus perhatian Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk meningkatkan jumlah angkutan barang kereta api yang saat ini masih 69 juta ton per tahun. Peningkatan kapasitas lintas kereta api barang, terutama di wilayah Sumatera untuk mengangkut komoditas utama seperti batubara dan CPO, sudah harus dilakukan sebagai dukungan moda kereta api untuk mengurangi biaya logistik nasional dalam rangka mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional.

Tentunya dengan peningkatan pelayanan transportasi perkeretaapian harus seiring dengan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perkeretaapian. Direktorat Jenderal Perkeretaapian perlu meningkatkan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan sesuai dengan perkembangan teknologi perkeretaapian modern, meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menjamin keamanan operasi perkeretaapian, pengembangan budaya *safety first*, menyiapkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia perkeretaapian yang unggul memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan bidang penugasan, serta mengutamakan pencegahan terhadap pelanggaran keselamatan dan keamanan operasi perkeretaapian.

Tabel 4-3 | Pagu Indikatif Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025 – 2029

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Ribuan)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	ADC.001.052	Pengujian sarana perkeretaapian	Pengujian Sarana Perkeretaapian	250,609	3,160,000	3,476,000	3,823,600	4,205,960	14,916,169
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	CCK.004.005.0B	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perawatan dan Kalibrasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	978,759	6,214,000	6,314,000	6,414,000	6,514,000	26,434,759
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	CCK.004.005.0D	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Kegiatan Perawatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	0	4,640,000	4,740,000	4,840,000	4,940,000	19,160,000
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	CCK.004.005.0E	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Kegiatan Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	0	4,356,000S	4,456,000	4,556,000	4,656,000	18,024,000
4642.02.02	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	ADI.001	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	ADI.001.051	Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	2,140,975	8,456,447	9,302,091	10,232,300	11,255,530	41,387,343
4642.02.02	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	CCK.004.005.0A	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Pengujian SDM Perkeretaapian	399,945	1,193,781	1,293,781	1,393,781	1,493,781	5,775,069

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Ribuan)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4642.03.03	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.002	Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	ADC.002.051	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	192,787	4,288,243	4,717,067	5,188,774	5,707,651	20,094,522
4642.03.03	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	CCK.004.005.0C	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perawatan, Perbaikan dan Kalibrasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	392,880	5,396,438	5,496,438	5,596,438	5,696,438	22,578,632
4641.04.04	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	EBA.958.051.0A	Pelayanan Humas dan Protokol	Penyusunan Laporan Hubungan Masyarakat	72,720	1,003,388	1,103,726	1,214,099	1,335,509	4,729,442
4601.05.05	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	EBD.953.052.0A	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Balai Pengujian Perkeretaapian	90,975	689,959	23,483,697	23,583,697	23,683,697	71,532,025
4601.05.06	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	EBD.953.052.0B	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Penyusunan Dokumen SPIP dan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	39,835	689,957	23,483,697	23,583,697	23,683,697	71,480,883
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA.960.054.0B	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Administrasi Kegiatan Satker	152,447	1,037,699	23,483,697	23,583,697	23,683,697	71,941,237

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Ribuan)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.001.0A	Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Vakasi	9,766,801	9,809,326	9,809,326	9,809,326	9,809,326	49,004,105
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.001.0B	Gaji dan Tunjangan	Uang Makan, Uang Lembur, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Lainnya	7,396,286	7,449,385	7,449,385	7,449,385	7,449,385	37,193,826
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	26,796	327,454	427,454	527,454	627,454	1,936,612
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Perawatan Gedung Kantor	387,390	1,291,336	1,391,336	1,491,336	1,591,336	6,152,734
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10	56,426	444,359	544,359	644,359	744,359	2,433,862
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0D	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Perawatan Sarana Gedung	100,004	71,086	81,086	91,086	101,086	444,348

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Ribuan)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Langganan Daya dan Jasa	442,010	895,800	905,800	935,800	965,800	4,145,210
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0F	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Administrasi Kegiatan	206,756	243,792	343,792	443,792	543,792	1,781,924
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Belanja Sewa	273,736	761,329	761,329	761,329	761,329	3,319,052
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0H	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1,317,629	1,248,085	1,248,085	1,248,085	1,248,085	6,309,969
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0I	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pengadaan Pakaian Dinas	0	116,874	126,874	136,874	146,874	527,496
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0J	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Administrasi Kegiatan Pelanggaran	8,160	18,900	18,900	18,900	18,900	83,760

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Ribuan)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Balai Pengujian Perkeretaapian	39,166	738,436	812,279	893,507	982,853	3,466,241
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	EBD.955.051.0B	Pengelolaan Keuangan	Tim SABMN	54,410	0	0	0	0	54,410
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	EBD.955.052	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) Balai Pengujian Perkeretaapian	151,040	747,564	640,040	740,066	774,472	3,053,182
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	EBD.961.051	Pengelolaan Kepegawaian	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawaian	19,347	1,993,747	640,040	740,066	774,472	4,167,672

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Ribuan)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4601.05.08	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	EBD.955.052.0A	Pengelolaan Keuangan	Tim SAI	109,708	581,873	640,040	740,066	774,472	2,846,159
4601.05.09	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA.960.054.0A	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Ketatausahaan	206,398	902,741	1,103,726	1,214,099	1,335,509	4,762,473
TOTAL													25,273,995	68,767,999	138,294,045	141,895,613	145,505,464	519.737.116

4.3.3 Indikasi Potensi Pendanaan Non APBN Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 – 2029

Tabel 4-4 | Indikasi Pendataan Non APBN Balai Pengujian Perkeretaapian Tahun 2025-2029

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Ribuan)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	ADC.001.052	Pengujian sarana perkeretaapian	Pengujian Sarana Perkeretaapian	1,816,278	5,880,573	5,980,573	6,000,573	6,100,573	25,778,570

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Ribuan)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	ADC.001.053	Pengadaan Peralatan Pengujian/Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian	Pengadaan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	0	4,487,920	4,587,920	4,687,920	4,787,920	18,551,680
4642.02.02	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	ADI.001	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	ADI.001.051	Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	1,532,457	8,867,447	9,754,191	10,729,610	11,802,571	42,686,276
4642.02.02	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	ADI.001	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	ADI.001.054	Pengadaan Peralatan Pengujian/Pemeriksaan Kompetensi SDM Perkeretaapian	Pembangunan Fasilitas Pengujian Perkeretaapian	0	8,867,447	8,967,447	9,067,447	9,167,447	36,069,788
4642.03.03	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.002	Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	ADC.002.051	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	811,005	5,570,800	5,670,800	5,770,800	5,870,800	23,694,205
4642.03.03	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.002	Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	ADC.002.053	Pengadaan Peralatan Pengujian/Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian	Pengadaan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	0	6,146,000	6,246,000	6,346,000	6,446,000	25,184,000
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA.960.051.0A	Layanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Administrasi Kegiatan Badan Layanan Umum	2,418,702	19,864,483	21,850,931	24,036,024	26,439,626	94,609,766
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA.960.051.0B	Layanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Balai Pengujian Perkeretaapian	0	1,443,000	1,543,000	1,643,000	1,743,000	6,372,000

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Ribuan)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA.960.051.0C	Layanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Penyusunan Kajian Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis	199,740	0	0	0	0	199,740
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Interna	EBB.951	Layanan Sarana Internal	EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	0	424,534	424,534	424,534	424,534	1,698,136
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	CAN.001	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	CAN.001.051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	666,000	66,700	668,000	669,000	2,069,700
TOTAL													6,778,182	62,218,204	65,092,096	69,373,908	73,451,471	276.913.861

4.3.4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan APBN Balai Pengujian Perkeretaapian 2025 - 2029

b. Sumber Dana/Biaya

Secara sederhana, sumber dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk di dalamnya adalah infrastruktur perkeretaapian terbagi ke dalam enam sumber, yaitu: APBN, APBD, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta dan campuran atau kombinasi di antara ke-5 nya.

Pada APBN, dapat dirinci lagi sumber perolehan dananya, yaitu dari pendapatan negara (pajak dan bukan pajak), hibah luar negeri, dan utang. Untuk utang, terbagi lagi ke dalam surat utang negara (SUN) dan surat berharga syariah negara (SBSN) / Sukuk Negara, serta pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam negeri. Secara spesifik, pembiayaan proyek infrastruktur dapat didanai melalui sumber Sukuk Negara atau yang dikenal dengan nama Project Based Sukuk (PBS).

Pada APBD, sumber perolehannya adalah dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Yang Sah, dan Pinjaman Daerah. Untuk Dana Perimbangan akan dapat dirinci lagi yaitu: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil (pajak dan bukan pajak). Untuk Lain-Lain Pendapatan yang Sah, adalah meliputi: Pendapatan Hibah, Pendapatan Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus.

Terkait dengan pemerintah daerah dan pengelolaan APBD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah pula memberi penekanan yang kuat tentang pembiayaan kreatif. Hal itu diatur pada BAB VII pasal 167 terkait Sinergi Pendanaan yang didefinisikan sebagai sinergi sumber-sumber pendanaan dari APBD dan selain APBD dalam rangka pelaksanaan program prioritas nasional dan/atau daerah yang dilakukan dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur dan/atau program prioritas lainnya sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah. Sinergi pendanaan tersebut pada prinsipnya bersifat opsional dan diatur untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan kreatif.

Pendanaan dari APBD dapat berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Transfer ke Daerah (TKD), dan/atau Pembiayaan Utang Daerah sedangkan pendanaan selain dari APBD dapat berupa kerja sama dengan pihak swasta, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau pemerintah daerah lainnya. Dalam rangka mendukung Sinergi Pendanaan dimaksud, Pemerintah Pusat juga dapat menyinergikan dengan belanja kementerian/lembaga dan/atau tugas pembantuan.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dalam UU HKPD, pembiayaan kreatif telah diatur melalui Sinergi pendanaan yang dimaksudkan untuk mendorong dan memberikan insentif bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembiayaan kreatif. Insentif dimaksud diberikan dalam bentuk belanja K/L dan/atau tugas pembantuan untuk mendanai sebagian infrastruktur yang diusulkan. Lebih lanjut, dengan adanya UU HKPD sebagai dasar hukum, pemerintah pusat juga akan lebih nyaman dalam memberikan sosialisasi kepada daerah, termasuk sosialisasi untuk mengatasi tantangan-tantangan di atas.

Sebelum menyelenggarakan sinergi pendanaan, pemerintah daerah perlu membuat dokumen perencanaan atas infrastruktur-infrastruktur yang akan dibangun, termasuk usulan pembiayaannya yang dapat terdiri dari APBD, selain APBD, dan belanja kementerian/lembaga dan/atau tugas pembantuan. Dokumen perencanaan tersebut akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan akan membahas dokumen perencanaan dimaksud dengan K/L terkait di tingkat pemerintah pusat seperti Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, dan K/L teknis terkait. Dalam hal disetujui, peserta rapat akan menandatangani berita acara sebagai komitmen K/L terkait untuk mendanai sebagian infrastruktur yang diusulkan. Hal dimaksud diharapkan dapat memberikan insentif dan menarik pemerintah daerah untuk melaksanakan pembiayaan kreatif.

Selain menyediakan insentif, pemerintah pusat (Kementerian Keuangan) juga memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada pemerintah daerah terkait UU HKPD. Sosialisasi ini merupakan hal yang penting mengingat terdapat aturan-aturan baru di dalam UU HKPD, salah satunya terkait sinergi pendanaan melalui skema pembiayaan kreatif. Melalui edukasi tersebut,

pemerintah daerah diharapkan dapat memahami maksud dan tujuan dari skema pembiayaan kreatif serta memahami bagaimana skema pembiayaan kreatif dapat membantu menyelesaikan permasalahan infrastruktur di daerah.

Lebih lanjut, Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas juga dapat melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi sesuai kewenangan masing-masing. Pemantauan dan evaluasi tersebut dapat berupa kunjungan lapangan dan pengecekan penganggaran kewajiban pemerintah daerah di dalam APBD terkait pembayaran kewajiban kepada investor.

Sementara itu, untuk BUMN, BUMD, dan Swasta, pada prinsipnya sumber perolehan dananya adalah dapat berasal dari modal sendiri, laba ditahan, dan pinjaman pihak ketiga baik itu melalui penerbitan obligasi maupun dari perbankan/lembaga keuangan. Dari rincian sumber dana tersebut di atas maka terlihat bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perkeretaapian sebenarnya memiliki banyak sumber pembiayaan yang dapat digunakan

c. Jenis Biaya

Adapun dari sisi jenis biaya, maka pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur perkeretaapian adalah terdiri dari:

- 1) Biaya investasi pengadaan dan penyiapan lahan;
- 2) Biaya investasi infrastruktur prasarana;
- 3) Biaya investasi infrastruktur sarana;
- 4) Biaya pengoperasian dan pemeliharaan (setelah infrastruktur tersedia & bersifat rutin); dan
- 5) Biaya investasi kembali prasarana dan sarana (di masa pengoperasian)

Pembiayaan kreatif atau sinergi pendanaan pada dasarnya adalah menciptakan kombinasi dari sumber dana dan jenis biaya. Bahkan pada trase atau jalur kereta api yang lintas provinsi dan/atau lintas kabupaten/kota, bisa menghasilkan pembiayaan infrastruktur yang berasal dari beberapa provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Hal lainnya yang dapat menjadi faktor pendukung adalah lokasi lahan yang sudah menjadi barang milik daerah (BMD) atau barang milik negara (BMN) maka pemanfaatannya dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

Artinya pembangunan infrastruktur perkeretaapian dapat pula dilakukan tanpa adanya biaya investasi pengadaan lahan. Secara khusus pemerintah sebenarnya telah menerbitkan peraturan yang terkategori sebagai skema pembiayaan kreatif salah satunya yaitu skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

Skema KPBU

Menurut Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, KPBU didefinisikan sebagai kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

Skema KPBU ini menitikberatkan pembiayaan infrastruktur melalui pendanaan dari badan usaha, dimana badan usaha dapat memperoleh pengembalian modal investasi dan margin keuntungannya melalui dua pilihan, yaitu dari APBN/APBD atau dari pembayaran para pengguna jasa infrastruktur tersebut.

KPBU bukan berfokus pada pengadaan aset, melainkan KPBU untuk mencari solusi paling efektif dan efisien dalam upaya menyediakan jasa/layanan publik bagi masyarakat dalam jangka waktu relatif panjang. Pemerintah dapat memberikan dukungan pada skema KPBU ini yaitu melalui,

- *Project Development Facility* – untuk *penyiapan business case proyek hingga* perolehan mitra dan pembiayaan;
- *Viability Gap Fund* – untuk *meningkatkan kelayakan finansial proyek*;
- Penjaminan Infrastruktur – untuk meningkatkan kelayakan kredit proyek; dan
- Konfirmasi atas Mekanisme Availability Payment – untuk mengoptimalkan nilai guna anggaran dan kontinuitas layanan.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

BAB 5 PENUTUP





BAB 5. PENUTUP

5.1 Arahan Pelaksanaan

Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025-2029 disusun mengacu pada Permen PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025-2029, serta dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari perundang-undangan dan dokumen perencanaan terkait sesuai tugas dan fungsi Balai Pengujian Perkeretaapian, khususnya RPJPN 2025-2045 (UU No 59 Tahun 2024), RPJMN 2025-2029 (Perpres No. 12 Tahun 2025, Renstra Kementerian Perhubungan 2025-2029 (PM No. 12 Tahun 2025) dan Renstra Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Rencana kegiatan dalam Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025-2029 ini masih bersifat indikatif, sehingga perlu didetailkan lebih lanjut melalui tahap perencanaan teknis maupun proses penganggaran sesuai kaidah yang berlaku. Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025-2029 merupakan acuan bagi penyusunan dokumen SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian, khususnya Perjanjian Kinerja (PK), pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja melalui LKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) setiap tahun.

5.2 Mekanisme Perubahan dan Pelaksanaan Evaluasi

Sesuai ketentuan Permen PPN/Bappenas No 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Renstra K/L Tahun 2025-2029, dokumen Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025-2029 ini hanya dapat ditinjau ulang jika terdapat perubahan yang mendasar dalam lingkungan strategis maupun arahan Pimpinan yang mengharuskan adanya penyesuaian terhadap arah kebijakan, rencana kegiatan, maupun target kinerja yang harus dilaksanakan. Perubahan terhadap target kinerja serta target pelaksanaan kegiatan setiap tahun untuk disesuaikan dengan alokasi APBN dalam DIPA Balai Pengujian Perkeretaapian dapat dilakukan pada Perjanjian Kinerja (PK) setiap Pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian.



Laporan tahunan terhadap hasil pelaksanaan Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025-2029 ini dituangkan dalam LKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang disampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LKIP Balai Pengujian Perkeretaapian merupakan bagian dari penilaian prestasi kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian.

Evaluasi Paruh Waktu (EPW) terhadap pelaksanaan Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025-2029 dapat dilakukan setidaknya 1 (satu) kali di pertengahan masa berlaku (sekitar Tahun 2027-2028) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kinerja dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, serta untuk menyesuaikan daftar prioritas program dan kegiatan yang diperlukan untuk memastikan tercapainya target di akhir masa perencanaan (Tahun 2029). Evaluasi Akhir Periode (EAP) dari pelaksanaan Renstra Balai Pengujian Perkeretaapian 2025-2029 dilakukan pada akhir Tahun ke-4 (Tahun 2028) yang dilengkapi prognosis capaian akhir di Tahun 2029 sebagai bahan pertimbangan untuk penyusunan naskah teknokratik Renstra untuk periode pembangunan selanjutnya (Tahun 2030-2034).



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
BALAI PENGUJIAN PERKERETAAPIAN

LAMPIRAN



Lampiran I Rincian Kegiatan/Program Tahun 2025 – 2029 sesuai Arah Kebijakan dan Strategi Implementasi

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Sasaran Kegiatan 1 (SK.1) Meningkatnya Kehandalan Sarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian												
AK1 Peningkatan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian												
1	Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Sarana Perkeretaapian						1.Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Sarana Perkeretaapi an sebanyak 13.268 unit 2.Pedoman Pengujian Sarana Sesuai dengan Perkembang an Teknologi Perkeretaapi an	1.Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Sarana Perkeretaapian sebanyak 13.311 unit 2.Pedoman Pengujian Sarana Sesuai dengan Perkembangan Teknologi Perkeretaapian	1.Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Sarana Perkeretaapian sebanyak 13.423 unit 2.Pedoman Pengujian Sarana Sesuai dengan Perkembangan Teknologi Perkeretaapian	1.Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Sarana Perkeretaapian sebanyak 13.532 unit 2.Pedoman Pengujian Sarana Sesuai dengan Perkembangan Teknologi Perkeretaapian	1.Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Sarana Perkeretaapian sebanyak 13.621 unit 2.Pedoman Pengujian Sarana Sesuai dengan Perkembangan Teknologi Perkeretaapian	
AK2 Pengembangan Sistem Pengujian Sarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi												
2	Sistem informasi pengujian sarana perkeretaapian							Peningkatan Sistem Informasi pada aplikasi pengujian sarana perkeretaapian				
AK3 Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi												
3	Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian yang adaptif terhadap perkembangan teknologi						Pemenuhan peralatan pengujian sarana perkeretaapian					

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
4	Pemenuhan Fasilitas Peralatan Laboratorium Uji Komponen Sarana Perkeretaapian							1.Studi BED dan DED alat pengujian komponen sarana perkeretaapian 2.Studi kebutuhan alat pengujian komponen sarana perkeretaapian		Pengadaan peralatan pengujian komponen	Pengadaan peralatan pengujian komponen
AK4 Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian											
5	Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian						Perawatan, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian sarana perkeretaapian				
6	Perawatan dan Pengoperasionalan Sarana Perkeretaapian Milik Negara							Perawatan dan pengoperasian sarana milik negara			
Sasaran Kegiatan 2 (SK.2) Meningkatnya Kompetensi SDM Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian											
AK5 Peningkatan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian											
7	Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Pengujian SDM Perkeretaapian						1.Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Pengujian SDM Perkeretaapi an sebanyak 8.528 Orang 2.Penyusunan Pedoman Pengujian SDM Perkeretaapi an Terhadap Perkembang an Teknologi	1.Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Pengujian SDM Perkeretaapian sebanyak 6.505 Orang 2.Penyusunan Pedoman Pengujian SDM Perkeretaapian Terhadap Perkembangan Teknologi	1.Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Pengujian SDM Perkeretaapian sebanyak 8.327 Orang 2.Penyusunan Pedoman Pengujian SDM Perkeretaapian Terhadap Perkembangan Teknologi	1.Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Pengujian SDM Perkeretaapian sebanyak 11.405 Orang 2.Penyusunan Pedoman Pengujian SDM Perkeretaapian Terhadap Perkembangan Teknologi	1.Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Pengujian SDM Perkeretaapian sebanyak 8.875 Orang 2.Penyusunan Pedoman Pengujian SDM Perkeretaapian Terhadap Perkembangan Teknologi

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
8	Penyusunan dan Penyesuaian Materi Uji Kompetensi Terhadap Perkembangan Teknologi Perkeretaapian dan Jenis Kompetensi							1. Penyesuaian MUK sebanyak 69 Kompetensi 2. Pembuatan MUK sebanyak 34 Kompetensi	Penyesuaian MUK sebanyak 16 Kompetensi Teknologi Perkeretaapian terbaru	Pembuatan MUK sebanyak 8 Kompetensi Kereta Kecepatan Tinggi	
AK6 Pengembangan Sistem Pengujian SDM Perkeretaapian Berbasis Teknologi											
9	Sistem Informasi Uji Kompetensi SDM Perkeretaapian								1. Pelaksanaan uji kompetensi berbasis sistem (IoT) Penyusunan 2. Peningkatan Server Pengujian SDM Perkeretaapian		
AK7 Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi											
10	Peningkatan dan Pemenuhan Fasilitas Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian							1. Peningkatan Simulator Lokomotif CC 203/204 (Penambahan lintas, serta <i>upgrade soft & hardware & instrumen</i>) 2. Kajian Pemenuhan Fasilitas Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian dan alat peraga berbasis <i>Virtual Reality</i>	1. Pengadaan Lokomotif (Sarana) untuk Peraga Praktek Riksawat Sarana 2. Pengadaan Peraga dan Peralatan Praktek Riksawat Fasilitas Operasi	1. Penambahan Rute Simulator <i>Multipurpose</i> (rute KRL) 2. Pembuatan Simulator Lok CC 206 3. Pengadaan Kereta Penumpang yang dilengkapi dengan Pembangkit untuk Peraga Praktek Riksawat Sarana	1. Penambahan Rute Simulator <i>Multipurpose</i> (rute MRT) 2. Peningkatan <i>Virtual Reality</i> untuk Riksawat Sarana 3. Pengadaan <i>Virtual Reality</i> untuk Riksawat Jalur dan Bangunan serta Fasilitas Operasi
11	Pemenuhan Fasilitas Tes Kesehatan Balai							1. Penyusunan Kajian Pengoperasian		1. Pemenuhan Kebutuhan SDM Klinik	1. Pemenuhan Kebutuhan SDM Klinik

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pengujian Perkeretaapian							Fasilitas Klinik Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian 2. Pemenuhan izin operasional klinik kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian 3. Penyusunan Kajian BED dan DED Pengoperasian Fasilitas Klinik Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian		Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian sesuai Hasil Kajian 2. Pemenuhan kebutuhan fasilitas klinik kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian	Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian sesuai Hasil Kajian 2. Pemenuhan kebutuhan fasilitas klinik kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian
AK8 Perawatan Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian											
12	Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Peralatan Pengujian SDM Perkeretaapian						Perawatan dan pemeliharaan fasilitas peralatan dan peraga Pengujian SDM Perkeretaapian				
Sasaran Kegiatan 3 (SK.3) Meningkatnya Keandalan Prasarana Perkeretaapian Mendukung Keselamatan Transportasi Perkeretaapian											
AK9 Peningkatan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian											
13	Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian						1. Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian sebanyak 261 Unit dan 320 Kmsp 2. Penyusunan Pedoman Pengujian Prasarana terhadap Perkembangan	1. Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian sebanyak 247 Unit dan 320 Kmsp 2. Penyusunan Pedoman Pengujian Prasarana terhadap Perkembangan	1. Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian sebanyak 288 Unit dan 336 Kmsp 2. Penyusunan Pedoman Pengujian Prasarana terhadap Perkembangan	1. Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian sebanyak 302 Unit dan 353 Kmsp 2. Penyusunan Pedoman Pengujian Prasarana terhadap Perkembangan	1. Pemenuhan Sertifikasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian sebanyak 317 Unit dan 370 Kmsp 2. Penyusunan Pedoman Pengujian Prasarana terhadap Perkembangan

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
							an Teknologi Perkeretaapi an	Teknologi Perkeretaapian	Teknologi Perkeretaapian	Teknologi Perkeretaapian	Teknologi Perkeretaapian
AK10 Pengembangan Sistem Pengujian Prasarana Perkeretaapian Berbasis Teknologi											
14	Sistem Informasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian							Peningkatan Sistem Informasi Pengujian Prasarana Perkeretaapian			
AK11 Peningkatan Fasilitas Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi											
15	Pemenuhan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian Yang Adaptif Terhadap Perkembangan Teknologi						Penambahan dan modernisasi alat pengujian prasarana perkeretaapian				
16	Pemenuhan Fasilitas Peralatan Laboratorium Uji Komponen Prasarana Perkeretaapian							1.Studi Penyusunan identifikasi dan kebutuhan alat Pengujian komponen prasarana perkeretaapian 2.Studi BED dan DED Workshop pengujian komponen prasarana perkeretaapian		Pengadaan peralatan pengujian komponen	Pengadaan peralatan pengujian komponen
AK12 Perawatan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian											
17	Perawatan dan pemeliharaan peralatan pengujian prasarana perkeretaapian						Perawatan, pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengujian prasarana perkeretaapian				
Sasaran Kegiatan 4 (SK.4) Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Balai Pengujian Perkeretaapian											

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
AK.13 Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan Balai Pengujian Perkeretaapian											
18	Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian						Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	1. Penyusunan SOP pelayanan publik Balai Pengujian Perkeretaapian 2. Sosialisasi SOP pelayanan publik Balai Pengujian Perkeretaapian 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian
Sasaran Kegiatan 5 (SK.5) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian											
AK.14 Peningkatan Pencapaian Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian											
19	Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja (LMCK, LKIP, LAPTAH) Triwulan dan Tahunan sesuai standar yang ditentukan						1. Menyusun SK Tim Pelaporan Kinerja 2. Rapat Pembahasan Target Kinerja dan Keuangan 3. Rapat Pembahasan Capaian Kinerja Triwulanan dan Tahunan 4. Pemenuhan Data Dukung oleh setiap seksi, subbag dan unit 5. Penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja				
20	Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja (RKT, PK, RKA, RSB, RENSTRA) Tahunan sesuai standar yang ditentukan						1. Menyusun SK Tim Perencanaan Kinerja 2. Rapat Pembahasan Target Kinerja dan Keuangan 3. Pemenuhan Data Dukung oleh setiap seksi, subbag dan unit 4. Penyusunan Dokumen perencanaan kinerja Balai pengujian perkeretaapian				
21	Pengembangan sistem Informasi dan pengelolaan <i>database</i> Balai Pengujian Perkeretaapian.							Pengembangan sistem Informasi dan pengelolaan <i>database</i> Balai Pengujian Perkeretaapian.			

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
AK.15 Peningkatan Pencapaian Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian											
22	Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko Tahunan sesuai standar yang ditentukan						1.Menyusun SK UPR dan UMR 2.Rapat pembahasan penetapan konteks dan identifikasi risiko 3.Menyusun dokumen penetapan konteks, identifikasi risiko dan RTP				
23	Monitoring dan evaluasi Rencana Tindak Lanjut Pengendalian per-Triwulan						1.Rapat pembahasan RTP 2.Menyusun laporan triwulan RTP				
AK.16 Peningkatan Pencapaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian											
24	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan dan Penyerapan Anggaran di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian						1.Melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran di lingkungan balai pengujian perkeretaapian 2.Tindaklanjut temuan audit keuangan				
25	Konsistensi RPD Dengan Realisasi Anggaran						Menyusun rencana penarikan dana sesuai dengan realisasi anggaran				
26	Monitoring Capaian Realisasi Output Kegiatan						Melakukan rencana capaian realisasi output balai pengujian perkeretaapian				
AK.17 Peningkatan Pencapaian Realisasi PNBP Balai Pengujian Perkeretaapian											
27	Peningkatan Kerja Sama Pemanfaatan <i>Core Bussines</i> /Layanan Utama						Kegiatan pengujian sarana, prasarana dan sdm perkeretaapian dapat tercapai sesuai target yang telah ditentukan				
28	Peningkatan Kerja Sama Pemanfaatan <i>Non Core Bussiness</i> /Layanan Penunjang						1.Pendataan aset yang akan dioptimalisasikan untuk layanan penunjang 2.Melakukan penilaian aset dan penyusunan tarif 3.Melakukan penawaran layanan penunjang 4.Melakukan pemanfaatan aset melalui skema sewa 5.Melakukan inovasi layanan 6.Penyusunan pedoman pemanfaatan aset				
AK.18 Peningkatan Penilaian Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian											

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
29	Kearsipan dan Tata Naskah Dinas						1. Monitoring Kearsipan dan Tata Naskah Dinas 2. Evaluasi Kearsipan dan Tata Naskah Dinas 3. Inventarisasi daftar arsip aktif dan inaktif				
AK.19 Peningkatan pengelolaan BMN di lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian											
30	Inventarisasi aset yang dimiliki Balai Pengujian Perkeretaapian						Pendataan aset yang dimiliki balai pengujian perkeretaapian	1.Pendataan aset yang dimiliki balai pengujian perkeretaapian 2.Usulan penghapusan aset bangunan lainnya bekasi timur 3.usulan penetapan status penggunaan 4.usulan pengawasan dan pengendalian (wasdal) bmn 5.Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset 6.kajian kelaikan ekonomi dan finansial lahan bekasi timur 7.Studi <i>grand design</i> pengembangan gedung operasional Balai Pengujian Perkeretaapian di Bekasi Barat 8.Proses pemindahan aset bekasi	1.Pendataan aset yang dimiliki balai pengujian perkeretaapian 2.Usulan penghapusan aset 3.usulan penetapan status penggunaan 4.usulan pengawasan dan pengendalian (wasdal) bmn 5.Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset 6.Studi BED dan DED pengembangan gedung operasional Balai Pengujian Perkeretaapian di Bekasi Barat 7.Pembangunan gedung operasional Balai Pengujian Perkeretaapian	1.Pendataan aset yang dimiliki balai pengujian perkeretaapian 2.Usulan penghapusan aset 3.usulan penetapan status penggunaan 4.usulan pengawasan dan pengendalian (wasdal) bmn 5.Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset 6.Pembangunan gedung operasional Balai Pengujian Perkeretaapian	1.Pendataan aset yang dimiliki balai pengujian perkeretaapian 2.Usulan penghapusan aset 3.usulan penetapan status penggunaan 4.usulan pengawasan dan pengendalian (wasdal) bmn 5.Monitoring dan evaluasi pemanfaatan aset

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
								barat dan bekasi timur dari btp jakarta ke balai pengujian perkeretaapian			
31	Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Pengujian Perkeretaapian						Perawatan gedung dan halaman kantor	1. Kajian Optimalisasi Aset (Studi optimalisasi aset Balai Pengujian Perkeretaapian) 2. Pengadaan Kendaraan Investasi (Kendaraan R4 Berbasis Hybrid dan listrik) 3. Perawatan gedung dan halaman kantor 4. Studi Evaluasi keselamatan gedung bekasi barat 5. Sewa Kantor 6. Penyediaan genset 7. Penyediaan peralatan dan mesin 8. Studi BED dan DED 9. Perizinan (Amdal, Andalalin, IMB)	1. Perawatan gedung dan halaman kantor 2. Penyediaan peralatan dan mesin 3. Pengadaan Tanah 1 Ha 4. Pembangunan workshop balai pengujian perkeretaapian 5. Perawatan kendaraan R2 dan R4 6. Perawatan printer dan komputer 7. Perawatan genset	1. Perawatan gedung dan halaman kantor 2. Pengadaan Kendaraan Investasi (Kendaraan R4) 3. Penyediaan peralatan dan mesin 4. Pembangunan workshop balai pengujian perkeretaapian 5. Perawatan kendaraan R2 dan R4 6. Perawatan printer dan komputer 7. Perawatan genset	1. Perawatan gedung dan halaman kantor 2. Pengadaan Kendaraan Investasi (Kendaraan R4) 3. Penyediaan peralatan dan mesin 4. Perawatan kendaraan R2 dan R4 5. Perawatan printer dan komputer 6. Perawatan genset

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
								10. Perawatan kendaraan R2 dan R4 11. Perawatan printer dan komputer 12. perawatan genset Perizinan pembuatan Nomor Induk Berusaha			
AK.20 Peningkatan Pencapaian Kinerja Tata Kelola Pemerintahan di Balai Pengujian Perkeretaapian											
32	Pengembangan dan Penyempurnaan Sistem Manajemen Kinerja Seluruh Pegawai di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian						Penyusunan Kajian Remunerasi Balai Pengujian Perkeretaapian	1. Penyusunan Remunerasi Balai Pengujian Perkeretaapian 2. Sosialisasi Remunerasi Balai Pengujian Perkeretaapian 3. Sosialisasi bidang kepegawaian 4. Penyusunan Sertifikasi ISO	1. Sosialisasi bidang Kepegawaian 2. Penyusunan Sertifikasi ISO	1. Sosialisasi bidang Kepegawaian 2. Penyusunan Sertifikasi ISO	1. Sosialisasi bidang Kepegawaian 2. Penyusunan Sertifikasi ISO
33	Peningkatan Pemenuhan Kebutuhan Jumlah dan Pengembangan Kompetensi SDM di Lingkungan Balai Pengujian Perkeretaapian							1. Studi Kebutuhan pegawai balai pengujian perkeretaapian berdasarkan analisis jabatan 2. Diklat Dasar perkeretaapian 3. Diklat Pengujian perkeretaapian 4. Diklat Asisten pengujian perkeretaapian	1. Sertifikasi asisten pengujian 2. Sertifikasi pengujian 3. Diklat Pemasaran 4. Diklat Pengembangan bisnis dan kewirausahaan 5. Diklat <i>Hospitality</i> 6. <i>Assessor Certification</i>	1. Pelatihan terkait ilmu bahan dan uji komponen sarana dan prasarana perkeretaapian 2. Sertifikasi Tenaga operasional uji komponen sarana dan prasarana perkeretaapian	1. Pelatihan terkait ilmu bahan dan uji komponen sarana dan prasarana perkeretaapian 2. Sertifikasi Tenaga operasional uji komponen sarana dan prasarana perkeretaapian

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
								5. Diklat Keselamatan dan Kesehatan Kerja 6. Diklat Manajemen Resiko 7. Diklat bahasa asing 8. Diklat Pelatihan Fungsional 9. Diklat Ahli K3 Umum 10. Diklat Auditor (SPI) 11. Diklat <i>Public Speaking</i> 12. Diklat Keuangan 13. Diklat Pemasaran 14. Diklat Pengembangan bisnis dan kewirausahaan 15. Diklat <i>Hospitality</i> 16. <i>Assessor Certification Program - Basic Level</i> (Bidang Psikologi) 17. Roadmap kompetensi balai pengujian perkeretaapian	<i>Program - Intermediate Level</i> (Bidang Psikologi)	3. Diklat Pelatihan Fungsional 4. Diklat Ahli K3 Umum 5. Diklat Auditor (SPI) 6. Diklat Public Speaking 7. Diklat Keuangan 8. Diklat Pemasaran 9. Diklat Pengembangan bisnis dan kewirausahaan 10. Diklat <i>Hospitality</i>	3. Sertifikasi asisten penguji 4. Sertifikasi penguji 5. Diklat Pemasaran 6. Diklat Pengembangan bisnis dan kewirausahaan 7. Diklat <i>Hospitality</i>
34	Penyusunan pedoman Kajian Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan pada Balai							Studi pedoman kajian keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja

No	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	TARGET					KEGIATAN PROGRAM PER-TAHUN				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pengujian Perkeretaapian							pada balai pengujian perkeretaapian	dan lingkungan pada balai pengujian perkeretaapian	dan lingkungan pada balai pengujian perkeretaapian	dan lingkungan pada balai pengujian perkeretaapian
AK.21 Peningkatan Pengawasan Intern di Balai Pengujian Perkeretaapian											
35	Pengawasan Kepatuhan Kinerja dan Keuangan						1. Menyusun Program kerja SPI Tahunan 2. Pemeriksaan efektivitas, inventarisasi dan pemeliharaan BMN 3. Pemeriksaan Pengelolaan PNBK 4. Pemeriksaan Efektifitas Pelaksanaan Pengujian Sarana, Prasarana, SDM 5. Rekon Internal 6. Reviu Laporan Keuangan 7. Reviu RSB/RBA 8. Reviu RKA 9. Pendampingan Audit Eksternal 10. Monitoring pemetaan risiko 11. Monitoring evaluasi risiko 12. Monitoring mitigasi risiko 13. Penyusunan pedoman pemeriksaan dan pengawasan intern				
36	Pengawasan Intern dan Eksternal						1. Monitoring Tindak Lanjut Audit 2. Koordinasi/penyampaian laporan SPI kepada Dewas 3. Penyusunan Laporan tahunan SPI 4. Koordinasi/penyampaian Laporan SPI kepada Inspektorat Jenderal				

Lampiran II. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Balai Pengujian Perkeretaapian

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	ADC.001.052	Pengujian Sarana perkeretaapian	Pengujian Sarana Perkeretaapian	250,609	3,160,000	3,476,000	3,823,600	4,205,960	14,916,169
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	CCK.004.005.0B	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perawatan, Perbaikan dan Kalibrasi Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	978,759	6,214,000	6,314,000	6,414,000	6,514,000	26,434,759
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	CCK.004.005.0D	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Kegiatan Perawatan Sarana Perkeretaapian Milik Negara	0	4,640,000	4,740,000	4,840,000	4,940,000	19,160,000
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	CCK.004.005.0E	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Kegiatan Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Milik Negara	0	4,356,000S	4,456,000	4,556,000	4,656,000	18,024,000
4642.02.02	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	ADI.001	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	ADI.001.051	Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	2,140,975	8,456,447	9,302,091	10,232,300	11,255,530	41,387,343
4642.02.02	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	CCK.004.005.0A	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Pembiayaan Operasional dan Pemeliharaan Fasilitas Pengujian SDM Perkeretaapian	399,945	1,193,781	1,293,781	1,393,781	1,493,781	5,775,069
4642.03.03	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.002	Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	ADC.002.051	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	192,787	4,288,243	4,717,067	5,188,774	5,707,651	20,094,522

4642. 03.03	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	CCK	OM Sarana Bidang Konektivitas Perkeretaapian	CCK.004	Perawatan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	CCK.004.005.0C	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	Perawatan, Perbaikan dan Kalibrasi Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	392,880	5,396,438	5,496,438	5,596,438	5,696,438	22,578,632
4641. 04.04	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Balai Pengujian Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4641	Pelayanan Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	EBA.958.051.0A	Pelayanan Humas dan Protokoler	Penyusunan Laporan Hubungan Masyarakat	72,720	1,003,388	1,103,726	1,214,099	1,335,509	4,729,442
4601. 05.05	Nilai AKIP Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	EBD.953.052.0A	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Penyusunan Dokumen SAKIP dan Pengelolaan Data Balai Pengujian Perkeretaapian	90,975	689,959	23,483,697	23,583,697	23,683,697	71,532,025
4601. 05.06	Tingkat Penerapan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	EBD.953.052.0B	Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Penyusunan Dokumen SPIP dan Manajemen Risiko Balai Pengujian Perkeretaapian	39,835	689,957	23,483,697	23,583,697	23,683,697	71,480,883
4601. 05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA.960.054.0B	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Administrasi Kegiatan Satker	152,447	1,037,699	23,483,697	23,583,697	23,683,697	71,941,237
4601. 05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.001.0A	Gaji dan Tunjangan	Pembayaran Gaji, Honorarium, Tunjangan dan Vakasi	9,766,801	9,809,326	9,809,326	9,809,326	9,809,326	49,004,105
4601. 05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.001.0B	Gaji dan Tunjangan	Uang Makan, Uang Lembur, Tunjangan Kinerja dan Tunjangan Lainnya	7,396,286	7,449,385	7,449,385	7,449,385	7,449,385	37,193,826

4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pengadaan Makanan/Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh	26,796	327,454	427,454	527,454	627,454	1,936,612
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0B	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Perawatan Gedung Kantor	387,390	1,291,336	1,391,336	1,491,336	1,591,336	6,152,734
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0C	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4/6/10	56,426	444,359	544,359	644,359	744,359	2,433,862
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0D	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Perawatan Sarana Gedung	100,004	71,086	81,086	91,086	101,086	444,348
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0E	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Langganan Daya dan Jasa	442,010	895,800	905,800	935,800	965,800	4,145,210
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0F	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Administrasi Kegiatan	206,756	243,792	343,792	443,792	543,792	1,781,924
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0G	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Belanja Sewa	273,736	761,329	761,329	761,329	761,329	3,319,052
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0H	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	1,317,629	1,248,085	1,248,085	1,248,085	1,248,085	6,309,969

4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0I	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Pengadaan Pakiaian Dinas	0	116,874	126,874	136,874	146,874	527,496
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.994	Layanan Perkantoran	EBA.994.002.0J	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Administras i Kegiatan Pelelangan	8,160	18,900	18,900	18,900	18,900	83,760
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	EBD.952.051	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran	Penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA) Balai Pengujian Perkeretaapian	39,166	738,436	812,279	893,507	982,853	3,466,241
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	EBD.955.051.0B	Pengelolaan Keuangan	Tim SABMN	54,410	0	0	0	0	54,410
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	EBD.955.052	Penyusunan Laporan Keuangan	Penyusunan Laporan SIMAK Barang Milik Negara (BMN) Balai Pengujian Perkeretaapian	151,040	747,564	640,040	740,066	774,472	3,053,182
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	EBD.961.051	Pengelolaan Kepegawai an	Pembinaan dan Pengembangan Kepegawai an	19,347	1,993,747	640,040	740,066	774,472	4,167,672

4601.05.08	Persentase Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	EBD.955.052.0A	Pengelolaan Keuangan	Tim SAI	109,708	581,873	640,040	740,066	774,472	2,846,159
4601.05.09	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA.960.054.0A	Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Penyusunan Laporan Pengelolaan Kepegawaian, Keuangan, Hukum, Hubungan Masyarakat dan Ketatausahaan	206,398	902,741	1,103,726	1,214,099	1,335,509	4,762,473
													25,273,995	68,767,999	138,294,045	141,895,613	145,505,464	

Indikasi Potensi Pendanaan Non APBN Bidang Transportasi Perkeretaapian 2025-2029

Kode IKK	Nama IKK	Kode Program	Program	Kode Kegiatan	Kegiatan	Kode KRO	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Kode RO	Rincian Output (RO)	Kode Komponen	Komponen	Sub Komponen	Pagu Anggaran (Dalam Juta Rupiah)					Total
													2025	2026	2027	2028	2029	
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	ADC.001.052	Pengujian sarana perkeretaapian	Pengujian Sarana Perkeretaapian	1,816,278	5,880,573	5,980,573	6,000,573	6,100,573	25,778,570
4642.01.01	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Sarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.001	Sertifikasi Sarana Perkeretaapian	ADC.001.053	Pengadaan Peralatan Pengujian/Pemeriksaan Sarana Perkeretaapian	Pengadaan Peralatan Pengujian Sarana Perkeretaapian	0	4,487,920	4,587,920	4,687,920	4,787,920	18,551,680
4642.02.02	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	ADI.001	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	ADI.001.051	Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	1,532,457	8,867,447	9,754,191	10,729,610	11,802,571	42,686,276
4642.02.02	Persentase Pemenuhan Pengujian Kompetensi SDM Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADI	Sertifikasi Profesi dan SDM	ADI.001	Sertifikat Kompetensi SDM Perkeretaapian	ADI.001.054	Pengadaan Peralatan Pengujian/Pemeriksaan Kompetensi SDM Perkeretaapian	Pembangunan Fasilitas Pengujian Perkeretaapian	0	8,867,447	8,967,447	9,067,447	9,167,447	36,069,788
4642.03.03	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.002	Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	ADC.002.051	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Pengujian Prasarana Perkeretaapian	811,005	5,570,800	5,670,800	5,770,800	5,870,800	23,694,205
4642.03.03	Persentase Pemenuhan Pengujian Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	GA	Program Infrastruktur Konektivitas	4642	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Perkeretaapian	ADC	Sertifikasi Produk	ADC.002	Sertifikat Kelaikan Prasarana Perkeretaapian	ADC.002.053	Pengadaan Peralatan Pengujian/Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian	Pengadaan Peralatan Pengujian Prasarana Perkeretaapian	0	6,146,000	6,246,000	6,346,000	6,446,000	25,184,000
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA.960.051.0A	Layanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Administrasi Kegiatan Badan Layanan Umum	2,418,702	19,864,483	21,850,931	24,036,024	26,439,626	94,609,766

4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960.051.0B	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA.960.051.0B	Layanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Pelatihan Peningkatan Kompetensi SDM Balai Pengujian Perkeretaapian	0	1,443,000	1,543,000	1,643,000	1,743,000	6,372,000
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	EBA.960.051.0C	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	EBA.960.051.0C	Layanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan	Penyusunan Kajian Kebijakan/Standar/Pedoman Teknis	199,740	0	0	0	0	199,740
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Interna	EBB.951.051	Layanan Sarana Internal	EBB.951.051	Pengadaan Kendaraan Bermotor	Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	0	424,534	424,534	424,534	424,534	1,698,136
4601.05.07	Nilai Kinerja Anggaran Balai Pengujian Perkeretaapian	WA	Program Dukungan Manajemen	4601	Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Perkeretaapian	CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	CAN.001.051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	CAN.001.051	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	666,000	66,700	668,000	669,000	2,069,700
													6,778,182	62,218,204	65,092,096	69,373,908	73,451,471	

Lampiran III. Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
1	Revisi UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Urgensi perkembangan teknologi prasarana dan sarana perkeretaapian, pengaturan pengoperasian kereta api dengan sistem pengoperasian teknologi baru dan penyempurnaan/pendetailan pengaturan manajemen keselamatan perkeretaapian. - Dengan adanya perkembangan teknologi perkeretaapian dan perubahan lingkungan strategis yang semakin kompetitif dan tidak terpisahkan dari sistem perekonomian yang menitikberatkan pada asas keadilan, keterbukaan, dan inklusif dipandang perlu melibatkan peran pemerintah daerah dan swasta guna mendorong 	Direktorat Jenderal Perkeretaapian
2	Regulasi Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang penentuan tarif layanan Balai Pengujian Perkeretaapian	mengoptimalkan komposisi layanan pengujian sebagai pedoman dalam layanan pengujian perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
3	Regulasi Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Remunerasi BLU Balai Pengujian Perkeretaapian	sebagai pedoman perhitungan Remunerasi BLU Balai Pengujian Perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
4	Regulasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan	sebagai dasar Balai Besar Sertifikasi dan Pengujian Perkeretaapian	Balai Pengujian Perkeretaapian
5	Regulasi Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian	peningkatan kualitas layanan publik dan optimalisasi struktur organisasi untuk peluang penerimaan pendapatan layanan utama dan layanan penunjang	Balai Pengujian Perkeretaapian
6	Revisi PM 14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sertifikasi Kelaikan Lokomotif	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 	Direktorat Sarana Perkeretaapian

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
7	Revisi PM 15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sertifikasi Kelaikan Kereta yang ditarik lokomotif	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 	Direktorat Sarana Perkeretaapian
8	Revisi PM 16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 	Direktorat Sarana Perkeretaapian
9	Revisi PM 17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sertifikasi Kelaikan Gerbong	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 	Direktorat Sarana Perkeretaapian
10	Revisi PM 17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Sertifikasi Kelaikan Gerbong	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan Teknologi - Menyesuaikan dengan substansi pengujian sarana pada PP 6 Tahun 	Direktorat Sarana Perkeretaapian
11	Revisi PM 29 Tahun 2011 Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api	<ul style="list-style-type: none"> - Item ramp beserta pengaman dan guiding block pada stasiun yang berada pada interior maupun eksterior gedung stasiun diusulkan untuk dapat mengakomodir struktur bagi penyangga difable - Menyantumkan persyaratan teknis ketersediaan ruangan satuan pelayanan DJKA; - Menyantumkan pembahasan persyaratan teknis struktur Bangunan Gedung Stasiun melingkupi Struktur atas dan Struktur bawah - Pembahasan terkait sterilisasi bangunan gedung stasiun - Pembahasan jarak bebas penumpang dari tangga/lift ke tepi peron - Pembahasan terhadap detail drainase di stasiun kereta api - Pembahasan detail terhadap jarak tepi peron kepada as track maupun kepada sarana pada kondisi lengkungan 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
12	Revisi PM 30 Tahun 2011 tentang Sertifikasi dan Tata Cara Pengujian Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya penyesuaian komponen yang diuji terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
		<ul style="list-style-type: none"> - Pada PM fokus pengujian jalur KA hanya pada jalan rel sehingga perlu adanya penambahan dan pendetailan terhadap pemeriksaan jembatan dan terowongan - Pengujian stasiun belum terakomodir meliputi Pemeriksaan gedung, instalasi pendukung dan peron 	
13	Revisi PM 31 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Item ramp beserta pengaman dan guiding block pada stasiun yang berada pada interior maupun eksterior gedung stasiun diusulkan untuk dapat mengakomodir struktur bagi penyanggah difable - Menyantumkan persyaratan teknis ketersediaan ruangan satuan pelayanan DJKA; - Menyantumkan pembahasan persyaratan teknis struktur Bangunan Gedung Stasiun melingkupi Struktur atas dan Struktur bawah - Pembahasan terkait sterilisasi bangunan gedung stasiun - Pembahasan jarak bebas penumpang dari tangga/lift ke tepi peron - Pembahasan terhadap detail drainase di stasiun kereta api - Pembahasan detail terhadap jarak tepi peron kepada as track maupun kepada sarana pada kondisi lengkungan 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
14	Revisi PM 32 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya penyesuaian komponen yang dirawat terhadap teknologi prasarana Perkeretaapian terbaru di Indonesia selain kereta konvensional seperti MRT, LRT dan HSR - Dalam Lampiran Pedoman Perawatan jembatan dan terowongan terdapat poin terkait pemeriksaan sehingga perlu dirasa dipisahkan ke dalam PM 31; 3. Pedoman perawatan stasiun belum terakomodir meliputi perawatan gedung, instalasi pendukung dan peron - Perlu dilakukan pembahasan untuk memasukkan Indeks Kualitas Jalan Rel (Track Quality Index) yang telah disahkan oleh Pemerintah sebagai standar acuan perawatan 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
15	Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta A	<ul style="list-style-type: none"> - Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi perkeretaapian - Menyesuaikan dengan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian 	Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
16	Revisi PM 156 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Perkeretaapian Miliki Negara	- Perlunya penambahan lingkup perawatan prasarana Agar mengakomodir perawatan prasarana pada lintas non aktif mengingat dan mempertimbangkan besarnya aset perkeretaapian di lintas non aktif.	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
17	Revisi PM 44 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian	- Mengevaluasi perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi sistem persinyalan perkeretaapian	- Direktorat Prasarana Perkeretaapian
18	Revisi PM 45 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian	- Perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi sistem telekomunikasi perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
19	Revisi PM 50 Tahun 2018 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian	Perubahan dan kebutuhan parameter teknis terhadap perkembangan teknologi - Updating standar yang mengatur persyaratan performansi dan fungsi instalasi listrik perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
20	Revisi PM 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api Perkeretaapian	- Menyesuaikan dengan perkembangan teknologi perkeretaapian Menyesuaikan dengan pelaksanaan pengujian prasarana perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian
21	Revisi PM 19 Tahun 2023 perubahan atas PM 5 Tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan PPKA	Standar kompetensi masih menjadi satu, perlu dirincikan untuk standar kompetensi Pengatur Perjalanan Kereta Api (setempat, daerah & terpusat), Pengendali Perjalanan Kereta Api dan Asisten Pengatur Perjalanan Kereta Api	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
22	Revisi PM 86 tahun 2018 tentang sertifikasi Inspektur dan Auditor Perkeretaapian	Tahapan uji kompetensi belum diatur	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
23	Revisi PM 87 Tahun 2018 tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian	Tahapan uji kompetensi belum diatur	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
24	Revisi PM 24 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM 19 Tahun 20211 Tentang Sertifikasi Kecakapan PJJ	Tahapan uji kompetensi hanya ada uji teori dan uji praktek, perlu ditambahkan tes kesehatan dan uji wawancara	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
25	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Pengendali Distribusi Listrik	Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
26	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Petugas Penanganan Kecelakaan	Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
27	Penyusunan Peraturan Menteri tentang Sertifikasi Petugas Pemeriksa Kecelakaan dan Petugas Analisis Kecelakaan	Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
28	Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang pengujian komponen, sistem serta peralatan pendukung prasarana dan sarana perkeretaapian	Merujuk pada PM. 56 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Perkeretaapian	- Direktorat Prasarana Perkeretaapian Direktorat Sarana Perkeretaapian
29	Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Sektor Perkeretaapian belum memiliki pedoman terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengujian Prasarana Perkeretaapian	Direktorat Prasarana Perkeretaapian

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi	Unit Penanggung Jawab
30	Penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta Standar Penilaian Pengujian SDM Perkeretaapian	- Mengoptimalkan komposisi penilaian pengujian SDM Perkeretaapian, Membuat standar Penilaian praktek, teori, dan wawancara pengujian SDM Perkeretaapian Meminimalisir miskomunikasi dan kesalahan dengan operator yang berkaitan dengan hasil pengujian SDM Perkeretaapian	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
31	Revisi PM 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kereta Api Kecepatan Tinggi	Masa berlaku <i>smart card</i> belum diatur	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
32	Revisi PM 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian	Standar kompetensi masih menjadi satu, perlu dirincikan untuk standar kompetensi untuk Tingkat Pelaksana dan Tingkat Pelaksana Lanjutan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
33	Revisi PM 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM 9 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian	Standar kompetensi masih menjadi satu, perlu dirincikan untuk standar kompetensi untuk Tingkat Pelaksana dan Tingkat Pelaksana Lanjutan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
34	Revisi PM 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM 16 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian	Standar kompetensi masih menjadi satu, perlu dirincikan untuk standar kompetensi untuk Tingkat Pelaksana dan Tingkat Pelaksana Lanjutan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
35	Revisi PM 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PM 17 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian	Standar kompetensi masih menjadi satu, perlu dirincikan untuk standar kompetensi untuk Tingkat Pelaksana dan Tingkat Pelaksana Lanjutan	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian
36	Penyusunan Regulasi Tentang Asisten Penguji	Belum adanya regulasi tentang asisten penguji	Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Lampiran IV. Matriks Kegiatan Balai Pengujian Perkeretaapian

NO	RENCANA KEGIATAN	RENCANA TAHUN PENYELESAIAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pembangunan Fasilitas Laboratorium Uji Komponen Pengujian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian					
	<ul style="list-style-type: none"> Kajian <i>Basic Engineering Design</i> dan <i>Detailed Engineering Design</i> Fasilitas Laboratorium Uji Komponen 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan Fasilitas Laboratorium Uji Komponen 					
	<ul style="list-style-type: none"> Studi Kebutuhan Alat Pengujian Komponen Perkeretaapian 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Peralatan Pengujian Komponen 					
2	Pembangunan Fasilitas Klinik Balai Pengujian Perkeretaapian					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kajian Pengoperasian Fasilitas Klinik Balai Pengujian Perkeretaapian 					

NO	RENCANA KEGIATAN	RENCANA TAHUN PENYELESAIAN				
		2025	2026	2027	2028	2029
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Kebutuhan SDM dan Fasilitas Klinik Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian 					
	<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan Izin Operasional Klinik Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian 					
	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Kajian BED dan DED Pengoperasian Fasilitas Klinik Kesehatan Balai Pengujian Perkeretaapian 					
3	Transformasi Balai Pengujian Perkeretaapian menjadi Balai Besar Pengujian dan Sertifikasi Perkeretaapian					
	<ul style="list-style-type: none"> Kajian Kelaikan Ekonomi dan Finansial Bekasi Timur 					
	<ul style="list-style-type: none"> Perizinan Pembangunan Bekasi Timur 					
	<ul style="list-style-type: none"> Studi Penyusunan Pedoman K3 Lingkungan 					
	<ul style="list-style-type: none"> Studi <i>Roadmap</i> Kompetensi Balai Pengujian Perkeretaapian 					